GREENWASHING

dan Derajat Transparansi pada sektor Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat

AHMAD SHOLIKIN | NOVITA EKA CHANDRA
YEBY MAASAN MAYRUDIN | NANDA NABILA AZZAHRA | NUR HABIBA

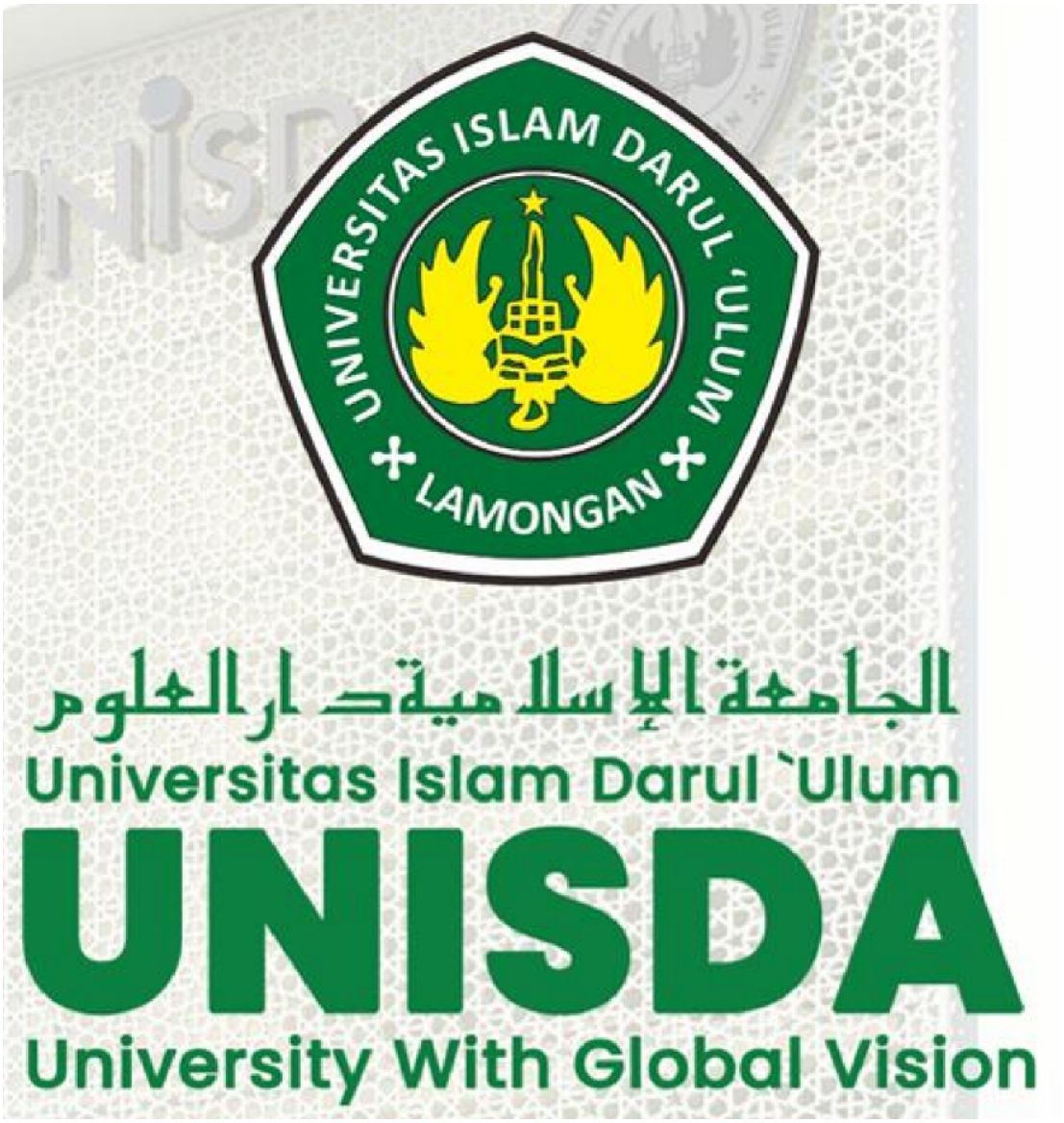
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
الجامعة الإسلامية دار العلوم
Universitas Islam Darul `Ulum
UNISDA
University With Global Vision

GREENWASHING

dan Derajat Transparansi pada sektor Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat

AHMAD SHOLIKIN | NOVITA EKA CHANDRA
YEBY MAASAN MAYRUDIN | NANDA NABILA AZZAHRA | NUR HABIBA

Greenwashing dan Derajat Transparansi pada sektor Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat

AHMAD SHOLIKIN

NOVITA EKA CHANDRA

YEBY MAASAN MAYRUDIN

NANDA NABILA AZZAHRA

NUR HABIBA

Greenwashing dan Derajat Transparansi pada sektor Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat

Penulis:
Ahmad Sholikin
Novita Eka Chandra
Yeby Maasan Mayrudin
Nanda Nabila Azzahra
Nur Habiba

ISBN:
978-623-89410-6-3

Editor:
Ahmad Sholikin

Penyunting:
Ahmad Sholikin

Ukuran:
160 hlm, 18 x 25 cm

Desain Sampul dan Tata Letak:
Nurul Laili

Penerbit:

Redaksi
Jl. Airlangga 03 Sukodadi Lamongan
Telp.(0322) 390497
Faks.0322-390929
Email: unisdapress@unisda.ac.id
Website: https://unisdapress.unisda.ac.id/

Cetakan Pertama, Desember, 2024
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Kata Pengantar

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena green-washing dan derajat transparansi di sektor industri ekstraktif, khususnya di dua provinsi besar di Indonesia, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Industri ekstraktif, yang mencakup pertambangan, minyak, gas, dan sektor-sektor terkait, memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun, di balik kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian, sektor ini juga menyimpan tantangan besar dalam hal keberlanjutan dan dampak lingkungan.

Green-washing, yang merujuk pada praktik perusahaan yang menggembar-gemborkan klaim keberlanjutan atau ramah lingkungan tanpa dilandasi oleh tindakan nyata, semakin menjadi perhatian publik, terutama di sektor industri ekstraktif. Praktik ini tidak hanya menipu konsumen dan pemangku kepentingan, tetapi juga menghambat upaya untuk mencapai keberlanjutan sejati dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Transparansi dalam sektor ekstraktif menjadi elemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi. Tanpa transparansi yang memadai, praktik green-washing akan terus berkembang dan menambah ketidakpercayaan terhadap sektor ini.

Melalui buku ini, penulis berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana fenomena

green-washing berkembang, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi di industri ekstraktif, serta dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Barat. Buku ini juga mengulas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memperbaiki transparansi dan mengurangi praktik green-washing di sektor ini.

Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh sektor industri ekstraktif dalam hal transparansi dan keberlanjutan, serta menginspirasi pembaca untuk lebih kritis terhadap klaim keberlanjutan yang sering kali terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Selain itu, kami juga berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya mereka untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di sektor ini demi keberlanjutan masa depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca, serta menjadi langkah awal dalam mendorong perubahan yang lebih baik dalam industri ekstraktif di Indonesia.

Penulis

2024

Daftar Isi

Kata Pengantar iv

Bab 1 1

Menyingkap Tabir Hijau: Transparansi dan Praktik Greenwashing dalam Sektor Industri Ekstraktif di Indonesia 1

Bab 2 19

Memahami Konsep Greenwashing: Strategi Hijau atau Tipu Daya? 19

Bab 3 46

Potret Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat: Tantangan dan Realitas 46

Bab 4 69

Mengupas Greenwashing di Industri Ekstraktif: Fakta di Balik Klaim Hijau 69

Bab 5 91

Mengukur Transparansi di Industri Ekstraktif: Antara Keterbukaan dan Kepentingan 91

Bab 6 111

Menguak Fakta di Balik Greenwashing dan Transparansi 111

Bab 7 136

Langkah Maju untuk Transparansi di Industri Ekstraktif 136

Daftar Pustaka 149

Bab 1

Menyingkap Tabir Hijau: Transparansi dan Praktik Greenwashing dalam Sektor Industri Ekstraktif di Indonesia

1.1 Greenwashing dan Transparansi Industri Ekstraktif

Industri ekstraktif, yang mencakup pertambangan, pengeboran minyak dan gas, serta eksploitasi sumber daya alam lainnya, adalah salah satu sektor ekonomi yang paling berpengaruh di banyak negara, termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dieksploitasi dari sektor ini merupakan bagian penting dari perekonomian, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan industri lainnya. Namun, sektor ini juga dikenal karena dampak lingkungannya yang besar. Kegiatan ekstraksi sumber daya alam sering kali melibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran air dan udara, serta dampak sosial negatif bagi masyarakat setempat, seperti perpindahan paksa dan konflik sosial (Tregidga, Milne, & Kearins, 2014).

Dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap isu-isu lingkungan, banyak perusahaan di sektor industri ekstraktif berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka menjalankan kegiatan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengklaim bahwa mereka menggunakan teknologi ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon, atau terlibat dalam program

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang menargetkan pelestarian lingkungan. Namun, tidak semua klaim tersebut mencerminkan kenyataan. Fenomena ini dikenal sebagai green-washing, di mana perusahaan atau organisasi memberikan citra atau gambaran palsu tentang upaya keberlanjutan mereka. Green-washing ini dapat berupa klaim yang menyesatkan tentang produk atau proses yang lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya terjadi (Delmas & Burbano, 2011).

Green-washing dalam sektor industri ekstraktif sering kali terjadi karena tekanan untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar yang semakin mengutamakan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Konsumen dan investor semakin peduli dengan isu-isu lingkungan, mendorong perusahaan untuk berupaya memperbaiki citra mereka tanpa benar-benar mengubah praktik mereka di lapangan. Dalam industri ekstraktif, di mana dampak negatif terhadap lingkungan sering kali tidak dapat dihindari, klaim keberlanjutan atau ramah lingkungan yang berlebihan dapat dianggap sebagai bentuk green-washing. Hal ini memunculkan masalah etika yang serius, karena klaim tersebut dapat menutupi kenyataan buruk yang terjadi di lapangan dan menghambat upaya untuk melakukan perbaikan yang sebenarnya (Lyon & Montgomery, 2015).

Transparansi dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana perusahaan dalam industri ekstraktif terbuka dalam melaporkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan mereka. Transparansi menjadi sangat penting karena memungkinkan masyarakat,

pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai apakah klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan sesuai dengan kenyataan. Laporan yang transparan dan akurat dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan memberikan dasar bagi kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial (Tregidga et al., 2014).

Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang hanya memberikan laporan keberlanjutan yang sangat umum atau tidak terperinci, yang membuatnya sulit untuk menilai apakah mereka benar-benar melakukan apa yang mereka klaim (Peattie, 2014). Bahkan, beberapa perusahaan mungkin melaporkan hasil yang sangat positif yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya di lapangan, yang berkontribusi pada fenomena green-washing.

Dalam sektor industri ekstraktif, transparansi menjadi sangat kompleks karena sifatnya yang sangat bergantung pada regulasi dan pengawasan yang kadang-kadang tidak memadai. Banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur industri ekstraktif, tetapi penerapannya sering kali kurang efektif. Salah satu tantangan utama adalah bahwa banyak perusahaan industri ekstraktif beroperasi di daerah-daerah yang sulit dijangkau atau di luar jangkauan pengawasan langsung dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini menciptakan celah di mana green-washing dapat berkembang (Walker & Wan, 2012).

Jawa Timur dan Jawa Barat adalah dua provinsi yang memiliki industri ekstraktif yang sangat besar. Kegiatan pertambangan, baik itu untuk batu bara, mineral, maupun gas alam, telah menjadi tulang

punggung perekonomian di kedua provinsi ini. Jawa Timur dikenal dengan tambang batu bara dan gas alamnya yang melimpah, sementara Jawa Barat memiliki cadangan pasir dan batu yang banyak digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun industri ekstraktif ini berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, dampak lingkungan dari kegiatan ini juga sangat besar.

Di Jawa Timur, salah satu sektor yang sangat berkembang adalah pertambangan batu bara, yang digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap. Selain itu, wilayah ini juga menjadi pusat pengolahan gas alam, yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di Indonesia. Namun, kegiatan ini telah menyebabkan sejumlah masalah lingkungan, seperti polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem pesisir (Rachmat & Setiawan, 2015). Di beberapa wilayah seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, pertambangan batu bara juga telah menyebabkan kerusakan lahan yang parah, yang berdampak pada kehidupan masyarakat lokal dan ekosistem sekitar.

Sementara itu, di Jawa Barat, sektor industri ekstraktif juga sangat berkembang, terutama dalam hal penggalian pasir dan batu. Sumber daya alam ini digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang pesat di wilayah ini. Namun, penggalian pasir dan batu ini sering kali menyebabkan kerusakan tanah dan erosi, serta mengancam kelestarian ekosistem di daerah tersebut. Di beberapa kawasan, penggalian pasir ilegal menjadi masalah besar, yang memperburuk kerusakan lingkungan yang sudah ada. Penggunaan air tanah yang berlebihan untuk kegiatan ekstraksi juga

menyebabkan masalah ketersediaan air di beberapa daerah di Jawa Barat (Prasetyaningsih et al., 2017).

Masalah transparansi dalam sektor ini sangat relevan untuk dibahas. Banyak perusahaan pertambangan di Jawa Timur dan Jawa Barat sering kali mengklaim bahwa mereka mematuhi standar lingkungan dan sosial yang ketat, tetapi klaim tersebut sering kali sulit diverifikasi. Dalam banyak kasus, laporan keberlanjutan yang diberikan oleh perusahaan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan, yang menambah masalah green-washing (Sinaga, 2020). Selain itu, pengawasan terhadap praktik-praktik ini sering kali terbatas, baik karena kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan inspeksi yang memadai, maupun karena banyak perusahaan yang menyembunyikan praktik buruk mereka melalui berbagai cara yang tidak transparan.

Di kedua provinsi ini, fenomena green-washing sering kali tidak hanya berhubungan dengan klaim perusahaan tentang keberlanjutan tetapi juga dengan ketidakjelasan informasi yang diberikan kepada publik. Banyak perusahaan besar yang terlibat dalam industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat yang melaporkan hasil yang sangat positif dalam hal pengurangan emisi atau pemulihan ekosistem, tetapi sulit untuk membuktikan kebenaran dari klaim tersebut tanpa data yang jelas dan terverifikasi (Sinaga, 2020). Hal ini menciptakan kesenjangan besar dalam transparansi, di mana masyarakat dan pemerintah tidak memiliki informasi yang memadai untuk menilai apakah perusahaan benar-benar melakukan apa yang mereka klaim.

Topik green-washing dan transparansi dalam industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat sangat penting untuk dibahas karena sektor ini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Seiring dengan semakin ketatnya regulasi terkait keberlanjutan dan tekanan dari konsumen serta investor yang peduli dengan isu lingkungan, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengklaim keberlanjutan dan transparansi mereka. Selain itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memahami sejauh mana perusahaan-perusahaan ini mematuhi standar keberlanjutan yang mereka klaim, serta dampaknya terhadap keberlanjutan jangka panjang bagi ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat.

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, terutama dalam konteks perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang lebih luas, adanya klaim green-washing dapat merugikan banyak pihak, termasuk konsumen, masyarakat, dan perusahaan itu sendiri. Tanpa adanya transparansi yang jelas, upaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan menanggulangi dampak negatif dari industri ekstraktif menjadi terhambat. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang praktik green-washing dan pentingnya transparansi di sektor ini dapat membantu membentuk kebijakan yang lebih efektif, mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, dan mendorong perusahaan untuk benar-benar bertindak lebih bertanggung jawab dalam menjalankan operasinya (Lyon & Montgomery, 2015).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, sektor industri ekstraktif di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Barat, menghadapi tantangan besar terkait transparansi dan praktik green-washing. Meskipun banyak perusahaan di sektor ini mengklaim bahwa mereka telah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan berkomitmen pada pelestarian lingkungan, banyak dari klaim tersebut yang sulit untuk diverifikasi kebenarannya. Fenomena green-washing ini semakin meresahkan karena perusahaan sering kali menyembunyikan dampak buruk dari kegiatan ekstraktif mereka dengan laporan yang tidak transparan atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki sejauh mana praktik green-washing terjadi dalam industri ekstraktif di kedua provinsi ini dan bagaimana derajat transparansi yang ada memengaruhi persepsi publik serta kebijakan pemerintah mengenai keberlanjutan industri ini.

Rumusan masalah utama dalam buku ini adalah bagaimana perusahaan-perusahaan dalam sektor industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat mengelola klaim keberlanjutan mereka, serta sejauh mana transparansi laporan lingkungan dan sosial yang mereka sampaikan dapat dipercaya oleh masyarakat dan pemangku kebijakan. Apakah perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar mengimplementasikan praktik ramah lingkungan yang mereka klaim, atau justru terlibat dalam green-washing? Bagaimana peran transparansi dalam mengurangi fenomena green-washing ini, dan apa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah serta masyarakat

dalam memastikan perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam? Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisis praktik yang terjadi di lapangan serta mengeksplorasi implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kurangnya transparansi dalam industri ekstraktif.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena green-washing yang terjadi dalam sektor industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat serta mengevaluasi derajat transparansi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di sektor tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan industri ekstraktif tersebut dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan dan sosial mereka. Dengan fokus pada praktik di Jawa Timur dan Jawa Barat, penelitian ini juga akan mengeksplorasi dinamika lokal yang mungkin mempengaruhi tingkat transparansi, seperti pengawasan pemerintah, kebijakan perusahaan, serta peran masyarakat dan media dalam mendukung akuntabilitas industri.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali apakah praktik green-washing di sektor ekstraktif ini lebih merupakan hasil dari kurangnya regulasi yang efektif atau karena kurangnya komitmen perusahaan untuk benar-benar beroperasi secara ramah lingkungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan transparansi dapat

membantu mengurangi fenomena green-washing dan memfasilitasi perbaikan praktik lingkungan dalam industri ekstraktif. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji hubungan antara laporan keberlanjutan yang disampaikan oleh perusahaan dan realitas yang terjadi di lapangan, serta menilai apakah laporan tersebut benar-benar mencerminkan upaya nyata dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Manfaat penelitian ini sangat besar bagi pemangku kebijakan, masyarakat, dan industri itu sendiri. Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur sektor industri ekstraktif, khususnya terkait dengan pelaporan keberlanjutan dan pengawasan terhadap perusahaan. Dengan mengetahui sejauh mana praktik green-washing merajalela di industri ini, pemerintah dapat merancang regulasi yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan sosial mereka. Hasil penelitian ini juga dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mencapai target keberlanjutan nasional, khususnya yang berkaitan dengan SDGs, seperti SDG 13 (Climate Action) dan SDG 12 (Responsible Consumption and Production).

Bagi masyarakat dan masyarakat sipil, manfaat penelitian ini terletak pada peningkatan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sektor industri ekstraktif. Masyarakat akan lebih dapat memahami praktik green-washing yang mungkin terjadi

dan dampaknya terhadap lingkungan serta kualitas hidup mereka. Penelitian ini juga akan memperkuat posisi masyarakat untuk menuntut perusahaan agar bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan ekstraktif mereka. Terakhir, bagi industri itu sendiri, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kebijakan dan praktik keberlanjutan mereka. Dengan mengidentifikasi celah-celah dalam pelaporan transparansi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, penelitian ini berpotensi membantu perusahaan dalam menciptakan citra yang lebih baik dan berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena green-washing dan transparansi dalam sektor industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang lebih mampu menggali informasi yang bersifat subjektif dan kontekstual, serta memungkinkan peneliti untuk menganalisis data yang tidak selalu dapat diukur dengan angka. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif, yang kemudian dianalisis untuk memahami praktik-praktik green-washing dan transparansi dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua metode utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interviews) dan analisis dokumen. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai stakeholder, termasuk manajer perusahaan dari sektor industri ekstraktif, pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan industri, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang lingkungan dan keberlanjutan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang berbeda tentang transparansi perusahaan dalam laporan keberlanjutan dan praktek green-washing yang mungkin terjadi. Pertanyaan wawancara akan dirancang untuk menggali informasi tentang bagaimana perusahaan menyusun laporan keberlanjutan, tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan, dan sejauh mana regulasi pemerintah mempengaruhi praktik transparansi mereka.

Selain wawancara, teknik pengumpulan data lainnya adalah analisis dokumen, yang dilakukan dengan memeriksa laporan keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan yang beroperasi di sektor industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat. Analisis dokumen bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan menyampaikan informasi yang transparan mengenai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan ekstraktif mereka. Dokumen yang dianalisis akan mencakup laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh perusahaan, serta dokumen regulasi dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan. Dengan memeriksa kesesuaian antara

klaim yang diajukan dalam laporan tersebut dengan data dan bukti yang ada di lapangan, peneliti dapat mengidentifikasi potensi praktik green-washing yang terjadi.

Untuk mendalami lebih lanjut mengenai konteks lokal, penelitian ini juga akan melibatkan studi kasus pada beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat. Studi kasus ini akan membantu peneliti untuk melihat perbedaan praktik transparansi dan green-washing di berbagai jenis industri ekstraktif, seperti pertambangan, minyak dan gas, serta perkebunan kelapa sawit. Peneliti akan memilih perusahaan berdasarkan kriteria tertentu, seperti ukuran perusahaan, jenis industri, dan tingkat keterlibatannya dalam inisiatif keberlanjutan. Setiap studi kasus akan dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana perusahaan mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan dan sejauh mana praktik mereka sesuai dengan laporan yang mereka sampaikan kepada publik.

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis tematik. Data dari wawancara dan analisis dokumen akan diorganisasikan dalam tema-tema utama yang muncul, yang berkaitan dengan isu-isu utama dalam penelitian, seperti transparansi laporan keberlanjutan, praktik green-washing, pengaruh regulasi, dan tantangan dalam implementasi keberlanjutan. Proses analisis ini akan dimulai dengan pengkodean data, diikuti dengan identifikasi pola-pola utama yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dan pemerintah berinteraksi dalam konteks keberlanjutan dan

transparansi. Setiap tema akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi hubungan antara klaim keberlanjutan perusahaan dan dampak sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Terakhir, untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data, seperti wawancara, analisis dokumen, dan studi kasus. Triangulasi ini penting untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh tidak bias dan dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga akan melakukan pengecekan kembali dengan para informan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang telah dikumpulkan. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang komprehensif dan valid mengenai green-washing dan transparansi dalam sektor industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Penelitian ini memiliki fokus yang jelas dalam menganalisis praktik green-washing dan derajat transparansi dalam sektor industri ekstraktif di dua provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Wilayah ini dipilih karena keduanya merupakan daerah dengan aktivitas industri ekstraktif yang signifikan, baik dalam sektor pertambangan, minyak dan gas, maupun perkebunan. Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, yang sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan industri ekstraktif. Kegiatan ekstraktif di wilayah ini juga berdampak besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, menjadikan kedua

provinsi ini sebagai area yang relevan untuk penelitian mengenai transparansi dan keberlanjutan.

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada sektor industri ekstraktif, yang mencakup pertambangan, eksplorasi dan produksi minyak dan gas, serta perkebunan kelapa sawit, yang merupakan sektor utama yang terlibat dalam praktik green-washing. Penelitian ini akan meneliti perusahaan-perusahaan besar dan menengah yang beroperasi di sektor-sektor tersebut dan mengklaim telah menerapkan kebijakan keberlanjutan dalam operasional mereka. Fokus utama adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana klaim keberlanjutan ini sesuai dengan praktek nyata di lapangan, serta bagaimana laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dapat dipercaya oleh publik dan pemangku kebijakan.

Selain itu, penelitian ini akan membatasi diri pada perusahaan yang telah mengeluarkan laporan keberlanjutan atau dokumen publik yang terkait dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki laporan semacam itu tidak akan dijadikan objek penelitian, karena tidak memenuhi kriteria transparansi yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Dalam analisisnya, penelitian ini akan mempertimbangkan perbedaan antara perusahaan yang secara aktif mempromosikan keberlanjutan dan mereka yang mungkin hanya melakukan green-washing untuk menciptakan citra yang lebih ramah lingkungan tanpa mengimplementasikan kebijakan yang benar-benar mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka.

Penelitian ini juga akan terbatas pada analisis dua aspek utama, yaitu transparansi dalam laporan keberlanjutan dan keberadaan praktik green-washing. Transparansi di sini dimaksudkan sebagai sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi yang jelas dan akurat mengenai dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional mereka. Green-washing, di sisi lain, merujuk pada upaya perusahaan untuk menciptakan citra ramah lingkungan dengan cara yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana kedua hal tersebut saling terkait dan bagaimana pengaruhnya terhadap persepsi publik serta kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Penelitian ini juga akan memfokuskan perhatian pada peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam memonitor dan mengatur praktik green-washing serta transparansi di sektor industri ekstraktif. Meskipun topik utama adalah perusahaan-perusahaan dalam sektor industri ekstraktif, peran kebijakan dan regulasi pemerintah akan dianalisis dalam konteks bagaimana hal itu dapat mendukung atau bahkan memperburuk praktik green-washing. Pemerintah provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, serta lembaga-lembaga pengawas nasional seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akan menjadi bagian dari analisis, mengingat pentingnya kebijakan dalam mempengaruhi standar transparansi dan akuntabilitas di sektor ini.

Sebagai tambahan, penelitian ini tidak akan menyelidiki sektor-sektor lain di luar industri ekstraktif, seperti sektor manufaktur

atau jasa, karena fokus penelitian adalah pada sektor yang memiliki dampak lingkungan langsung yang besar dan sering kali terlibat dalam praktik green-washing. Penelitian ini juga tidak akan mencakup perusahaan yang tidak beroperasi secara langsung di Jawa Timur dan Jawa Barat, meskipun perusahaan tersebut mungkin berpengaruh secara nasional. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang praktik green-washing dan transparansi khususnya dalam konteks industri ekstraktif yang beroperasi di dua provinsi ini.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena green-washing dan transparansi dalam sektor industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat. Setiap bab memiliki tujuan yang spesifik dan saling berkaitan untuk membahas topik-topik yang relevan dalam konteks ini. Berikut adalah uraian singkat mengenai isi setiap bab dalam buku ini.

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Dalam bab ini, pembaca akan diperkenalkan dengan isu green-washing yang terjadi dalam sektor industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat, serta pentingnya transparansi dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Bab ini juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian dan memberikan gambaran tentang kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini untuk pemangku kebijakan, masyarakat, dan industri.

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka, yang membahas teori-teori dan literatur terkait dengan green-washing, transparansi dalam industri ekstraktif, serta regulasi dan kebijakan lingkungan yang relevan. Bab ini akan memberikan dasar teori yang kuat untuk penelitian dengan meninjau berbagai konsep yang terkait dengan keberlanjutan, akuntabilitas perusahaan, dan fenomena green-washing. Pembahasan ini juga mencakup studi-studi terdahulu yang relevan untuk menunjukkan perkembangan pengetahuan mengenai topik ini serta gap yang perlu diisi oleh penelitian ini.

Bab ketiga adalah Metodologi Penelitian, yang menjelaskan secara rinci mengenai pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pembaca akan menemukan penjelasan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti wawancara mendalam, analisis dokumen, dan studi kasus, serta teknik analisis data yang diterapkan. Bab ini juga mencakup pembahasan mengenai batasan masalah, ruang lingkup penelitian, serta langkah-langkah yang diambil untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh selama proses penelitian.

Bab keempat adalah Hasil dan Pembahasan, yang menyajikan temuan-temuan utama dari penelitian dan analisis yang dilakukan. Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan hasil wawancara, analisis dokumen, serta studi kasus yang telah dilakukan, dan membandingkannya dengan teori-teori dan literatur yang relevan. Pembahasan ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi tingkat transparansi dan praktik green-washing di sektor industri ekstraktif, serta untuk mengidentifikasi hubungan

antara klaim keberlanjutan perusahaan dan dampak sebenarnya di lapangan.

Bab kelima adalah Simpulan dan Rekomendasi, yang merangkum hasil-hasil penelitian dan memberikan rekomendasi praktis untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Bab ini juga mengemukakan kesimpulan utama yang dapat diambil dari penelitian, seperti sejauh mana transparansi dapat mengurangi fenomena green-washing dan apa peran yang dapat dimainkan oleh kebijakan publik untuk mendorong akuntabilitas dalam sektor industri ekstraktif. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan solusi konkret untuk meningkatkan transparansi dan keberlanjutan di sektor ekstraktif.

Bab keenam adalah Penutup, yang berisi refleksi akhir terhadap hasil penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi keberlanjutan dan akuntabilitas di sektor industri ekstraktif. Penutup ini juga akan menyampaikan keterbatasan penelitian yang dilakukan serta saran-saran untuk penelitian lanjutan. Bab ini menandai akhir dari buku ini dan memberikan perspektif luas mengenai pentingnya keberlanjutan dan transparansi dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan di Indonesia.

Bab 2

Memahami Konsep Greenwashing: Strategi Hijau atau Tipu Daya?

Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengkaji literatur yang relevan, menggali teori-teori yang mendasari fenomena keberlanjutan, serta menganalisis praktik-praktik yang berkaitan dengan green-washing dalam industri yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan sosial. Dengan memahami teori-teori yang ada, kita dapat menilai sejauh mana perusahaan dalam sektor ekstraktif telah memenuhi standar transparansi dan keberlanjutan yang diharapkan.

Pertama, teori tentang keberlanjutan perusahaan (corporate sustainability) dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi landasan utama dalam bab ini. Keberlanjutan perusahaan mengacu pada praktik bisnis yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis tersebut. Dalam konteks ini, CSR berperan penting sebagai mekanisme bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Teori-teori ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana perusahaan di sektor ekstraktif menyusun kebijakan dan laporan keberlanjutan mereka, serta bagaimana hal itu seharusnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Kedua, fenomena green-washing menjadi bagian penting dalam kajian ini, di mana praktik ini merujuk pada upaya perusahaan

untuk memanipulasi persepsi publik dengan menunjukkan citra ramah lingkungan, meskipun aktivitas operasional mereka tidak sesuai dengan klaim tersebut. Teori-teori mengenai green-washing mengkaji berbagai motivasi dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan citra hijau yang menipu, serta dampaknya terhadap reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Memahami green-washing sebagai fenomena sosial dan bisnis yang berkembang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi cara-cara di mana perusahaan mengeksploitasi kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan tanpa benar-benar melakukan perubahan substantif dalam operasi mereka.

Selanjutnya, teori mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keberlanjutan juga menjadi bagian penting dalam landasan teori ini. Transparansi dalam laporan keberlanjutan mengacu pada sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi yang jujur, jelas, dan akurat mengenai dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Teori ini mengajarkan kita tentang pentingnya pengungkapan informasi yang memadai bagi pemangku kebijakan, investor, konsumen, dan masyarakat luas untuk menilai apakah perusahaan benar-benar berkomitmen pada praktik yang berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, teori transparansi digunakan untuk menganalisis apakah laporan keberlanjutan perusahaan-perusahaan di sektor ekstraktif telah memenuhi standar transparansi yang tinggi atau apakah mereka justru terlibat dalam praktik green-washing untuk menyembunyikan dampak negatif dari operasi mereka.

Selain itu, teori regulasi dan kebijakan lingkungan juga sangat relevan dalam bab ini, mengingat peran penting pemerintah dalam memastikan keberlanjutan industri ekstraktif. Regulasi yang efektif dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan dan memastikan bahwa laporan keberlanjutan yang disajikan kepada publik benar-benar mencerminkan kondisi yang ada. Teori mengenai kebijakan lingkungan akan digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah di Jawa Timur dan Jawa Barat mengatur dan mengawasi sektor ekstraktif, serta bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi transparansi dan praktik green-washing yang ada di industri ini. Pemahaman tentang teori regulasi dan kebijakan ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah mendukung atau bahkan menghambat terciptanya industri ekstraktif yang transparan dan berkelanjutan.

Terakhir, teori mengenai stakeholder dan peran mereka dalam pengawasan industri ekstraktif juga akan dibahas. Stakeholder, baik internal maupun eksternal, memainkan peran penting dalam mendorong perubahan di perusahaan, khususnya dalam hal keberlanjutan dan transparansi. Teori ini membantu untuk memahami bagaimana hubungan antara perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (NGO) dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik yang diambil oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, pendekatan stakeholder digunakan untuk menganalisis interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam sektor ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat, serta bagaimana hal

ini berkontribusi pada tingkat transparansi dan potensi green-washing yang ada.

2.1 Mengurai Teori di Balik Greenwashing dan Transparansi

Green-washing, atau yang sering disebut sebagai eco-washing, adalah praktik di mana perusahaan atau organisasi menggambarkan diri mereka lebih ramah lingkungan atau berkelanjutan daripada kenyataan yang ada. Praktik ini digunakan untuk menarik konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan tanpa perusahaan tersebut benar-benar mengambil langkah-langkah yang substansial dalam menjaga kelestarian lingkungan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 oleh Jay Westerveld, seorang penulis dan aktivis lingkungan yang mengkritik industri perhotelan yang mempromosikan penggunaan handuk yang dapat digunakan kembali untuk mengurangi sampah, sementara pada saat yang sama mereka tidak membuat perubahan berarti terhadap kebijakan lingkungan mereka secara keseluruhan.

Green-washing merujuk pada praktik manipulasi perusahaan yang mengklaim diri mereka lebih ramah lingkungan daripada kenyataannya. Westerveld (1986) pertama kali menggunakan istilah ini dalam konteks industri perhotelan, yang melibatkan klaim palsu tentang pengurangan penggunaan handuk untuk keberlanjutan (Westerveld, 1986). Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa praktik ini meluas ke berbagai sektor, terutama sektor industri ekstraktif dan manufaktur, di mana klaim ramah lingkungan sering kali tidak didukung oleh tindakan yang nyata (Delmas & Burbano, 2011). Volkswagen, sebagai contoh utama, melibatkan klaim

kendaraan ramah lingkungan yang terungkap sebagai penipuan besar dalam "dieselgate," di mana perusahaan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasi hasil uji emisi mereka (Ewing, 2017). Selain itu, industri tekstil global juga sering terlibat dalam green-washing, dengan perusahaan besar seperti H&M yang mengklaim produk mereka lebih berkelanjutan, meskipun audit lebih lanjut mengungkapkan ketidaksesuaian antara klaim dan praktik mereka di lapangan (Bick et al., 2018).

Definisi green-washing berkembang seiring berjalannya waktu, mencakup berbagai jenis klaim yang menyesatkan tentang keberlanjutan yang diangkat oleh perusahaan, mulai dari penggunaan logo "hijau" yang tidak mendasar, klaim produk ramah lingkungan yang tidak terverifikasi, hingga pelaporan keberlanjutan yang tidak mencerminkan tindakan nyata di lapangan. Green-washing berhubungan erat dengan upaya perusahaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan kepedulian konsumen terhadap lingkungan tanpa melakukan perubahan yang substansial pada praktik operasional mereka.

Sebagai contoh, pada tahun 2015, perusahaan otomotif Volkswagen terlibat dalam skandal yang dikenal dengan nama "dieselgate". Perusahaan ini mengklaim bahwa mobil diesel mereka adalah kendaraan yang ramah lingkungan, namun terungkap bahwa mereka telah memasang perangkat lunak yang memanipulasi hasil uji emisi kendaraan untuk menunjukkan emisi yang lebih rendah dari kenyataan. Volkswagen menggunakan green-washing untuk menciptakan citra sebagai perusahaan yang peduli terhadap

lingkungan, namun pada kenyataannya, kendaraan mereka menyebabkan polusi udara yang lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Kasus ini adalah salah satu contoh terbesar dari green-washing dalam sejarah industri otomotif.

Selain itu, sektor industri tekstil juga sering terlibat dalam praktik green-washing. Beberapa perusahaan pakaian mengklaim bahwa produk mereka dibuat dari bahan-bahan ramah lingkungan seperti kain organik atau daur ulang, namun sebagian besar dari klaim tersebut tidak dapat diverifikasi atau bahkan tidak didukung oleh bukti nyata. Misalnya, pada tahun 2019, sejumlah merek fashion besar, seperti H&M, mengklaim bahwa mereka menawarkan produk yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, tetapi setelah investigasi lebih lanjut, ditemukan bahwa praktik mereka tidak sepenuhnya mendukung klaim tersebut. Meskipun mereka meningkatkan jumlah bahan ramah lingkungan dalam produk mereka, sebagian besar produk masih diproduksi dengan cara yang tidak sepenuhnya berkelanjutan atau tidak mendukung kesejahteraan pekerja yang terlibat dalam rantai pasokan mereka.

Green-washing tidak hanya merusak kredibilitas perusahaan, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan penelitian oleh Lyon dan Montgomery (2015), green-washing sering kali menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap klaim keberlanjutan dan memicu skeptisisme terhadap perusahaan yang benar-benar berkomitmen untuk perubahan. Dalam konteks dampak lingkungan, penelitian menunjukkan bahwa praktik green-washing menghalangi pencapaian kebijakan

keberlanjutan yang efektif dan memperlambat inovasi teknologi ramah lingkungan (Walker & Wan, 2012). Di sektor industri ekstraktif, misalnya, beberapa perusahaan yang terlibat dalam klaim ramah lingkungan seringkali tidak memiliki prosedur yang memadai untuk mengelola dampak ekologis dari operasional mereka, menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap ekosistem (Lyon & Montgomery, 2015). Dampak negatif lainnya adalah ketidakadilan sosial, di mana perusahaan sering menutupi masalah sosial atau eksploitasi pekerja dengan klaim keberlanjutan (Bowen, 2013).

Fenomena green-washing tidak hanya terjadi pada perusahaan besar. Banyak perusahaan kecil dan menengah, terutama yang beroperasi dalam industri ekstraktif, juga terlibat dalam klaim green-washing. Mereka sering kali mengklaim bahwa mereka mematuhi standar keberlanjutan tertentu, padahal praktik mereka tidak mencerminkan komitmen terhadap lingkungan. Sebagai contoh, beberapa perusahaan tambang di Indonesia mengklaim bahwa mereka telah melakukan reforestasi atau restorasi lahan pasca tambang, namun setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa sebagian besar dari upaya tersebut hanya dilakukan di sebagian kecil area dan tidak dilakukan dengan benar. Dalam beberapa kasus, perusahaan bahkan menggunakan klaim keberlanjutan untuk menghindari regulasi atau untuk mengurangi kewajiban lingkungan mereka.

Praktik green-washing memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu dampak utamanya adalah pengurangan tingkat kepercayaan publik terhadap klaim

keberlanjutan perusahaan. Ketika konsumen merasa tertipu oleh klaim green-washing, mereka menjadi semakin skeptis terhadap perusahaan-perusahaan yang mengklaim memiliki kebijakan ramah lingkungan. Ini dapat menyebabkan pengurangan dukungan terhadap perusahaan yang benar-benar berkomitmen untuk keberlanjutan dan menghambat upaya kolektif untuk memerangi masalah lingkungan yang lebih besar.

Bagi masyarakat, green-washing dapat menyebabkan kebingungan dalam membuat keputusan pembelian yang didasarkan pada pertimbangan lingkungan. Konsumen yang berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dengan memilih produk-produk yang lebih berkelanjutan atau ramah lingkungan sering kali tertipu oleh klaim-klaim yang tidak berdasar. Ini mengarah pada keputusan pembelian yang tidak efektif dalam mengurangi jejak karbon mereka, padahal mereka sebenarnya menghabiskan uang untuk produk yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan mereka. Green-washing sering kali memanfaatkan kecenderungan konsumen untuk mencari solusi cepat dan mudah dalam memilih produk yang lebih ramah lingkungan, namun tanpa mempertimbangkan seberapa besar dampak sebenarnya dari produk tersebut terhadap planet ini.

Dampak lingkungan dari green-washing sangat besar, terutama jika klaim ramah lingkungan tersebut digunakan untuk menghindari regulasi yang sebenarnya dapat melindungi lingkungan. Ketika perusahaan terlibat dalam green-washing, mereka cenderung tidak melakukan perubahan substantif dalam

operasional mereka untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan yang mengklaim produk mereka "ramah lingkungan" tetapi tidak mengurangi emisi gas rumah kaca mereka atau mengelola limbah secara efektif, tetap berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang lebih besar. Ini juga menghalangi terciptanya kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah lingkungan, karena perusahaan yang terlibat dalam green-washing sering kali menggunakan citra keberlanjutan mereka untuk menghindari tindakan regulasi yang lebih ketat.

Lebih lanjut, green-washing juga dapat memperburuk masalah sosial, seperti ketidakadilan dalam rantai pasokan. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang terlibat dalam green-washing sering kali menutupi kondisi kerja yang buruk, eksploitasi pekerja, atau dampak sosial lainnya dengan klaim keberlanjutan yang tidak terverifikasi. Misalnya, dalam industri pertambangan, beberapa perusahaan menggunakan klaim reforestasi sebagai alat pemasaran meskipun mereka terus merusak ekosistem dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen yang tertipu, tetapi juga merugikan pekerja dan komunitas yang terkena dampak langsung dari operasi perusahaan tersebut.

Selain itu, dampak green-washing juga terkait dengan penghambatan inovasi yang sebenarnya diperlukan untuk menciptakan produk dan proses yang benar-benar berkelanjutan. Ketika perusahaan memilih untuk terlibat dalam green-washing alih-alih melakukan perubahan nyata dalam cara mereka beroperasi, mereka mengalihkan perhatian dari solusi yang lebih inovatif dan

efektif untuk masalah lingkungan. Hal ini dapat memperlambat kemajuan dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan yang benar-benar dapat mengurangi dampak industri terhadap planet ini. Sebagai contoh, dalam industri energi, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam green-washing mungkin berfokus pada klaim bahwa mereka menggunakan energi terbarukan, padahal mereka masih bergantung pada energi fosil atau tidak mengurangi emisi secara signifikan.

Green-washing adalah fenomena yang merugikan baik bagi perusahaan, konsumen, maupun lingkungan. Praktik ini merusak kepercayaan publik terhadap klaim keberlanjutan, menciptakan kebingungan di kalangan konsumen, dan menghalangi kemajuan dalam pencapaian tujuan keberlanjutan global. Di sektor industri ekstraktif, green-washing dapat memperburuk kerusakan lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan, regulator, dan masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik green-washing dan memastikan bahwa klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan benar-benar didasarkan pada tindakan yang substansial dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberlanjutan sejati hanya akan tercapai jika perusahaan benar-benar mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan ekonomi.

Green-washing berpotensi merusak upaya kolektif untuk mencapai keberlanjutan yang lebih luas, baik di tingkat perusahaan, masyarakat, maupun lingkungan. Praktik ini menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen dan merusak kepercayaan

terhadap klaim keberlanjutan. Dalam sektor industri ekstraktif, green-washing sering digunakan untuk menghindari regulasi yang lebih ketat atau menutupi dampak negatif operasional terhadap lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan keberlanjutan secara efektif, penting untuk menuntut transparansi yang lebih besar dalam laporan keberlanjutan dan mengidentifikasi klaim green-washing (Delmas & Burbano, 2011). Ini mencakup penerapan regulasi yang lebih ketat, pengawasan terhadap laporan keberlanjutan, dan peningkatan kesadaran publik terhadap praktik ini.

2.2 Keterbukaan dalam Industri Ekstraktif

Transparansi dalam konteks industri mengacu pada tingkat keterbukaan dan kejelasan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam menyampaikan informasi terkait operasionalnya, kebijakan, serta dampak yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan. Dalam sektor industri ekstraktif, transparansi menjadi sangat penting karena perusahaan-perusahaan di sektor ini sering kali beroperasi di wilayah yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat. Menurut Bovens (2007), transparansi tidak hanya melibatkan pengungkapan informasi tentang aktivitas finansial, tetapi juga mencakup bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar dan pemerintah, serta bagaimana mereka mengelola dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka. Dalam industri ekstraktif, ini berarti bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang terbuka dan dapat diakses mengenai kegiatan penambangan,

pengelolaan limbah, serta upaya mitigasi yang dilakukan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.

Sebagai contoh, industri pertambangan di Indonesia sangat bergantung pada sumber daya alam yang melibatkan tanah dan air, serta ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan memerlukan pengungkapan yang jelas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan, baik dalam hal kerusakan lingkungan maupun dampak sosial kepada masyarakat yang terlibat atau terkena dampaknya. Transparansi dalam hal ini dapat mencakup pelaporan tahunan mengenai jumlah sumber daya yang dieksploitasi, emisi yang dihasilkan, serta pemulihan yang dilakukan setelah kegiatan penambangan selesai (Lyon & Montgomery, 2015). Dengan demikian, transparansi menjadi alat untuk mengurangi potensi penyalahgunaan sumber daya alam yang dapat mengarah pada green-washing, di mana perusahaan mengklaim melakukan upaya ramah lingkungan tanpa bukti yang jelas.

Prinsip dasar transparansi dalam sektor industri ekstraktif dapat dilihat dari pengungkapan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Hal ini termasuk informasi tentang kebijakan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, bagaimana mereka mengelola dampak sosial dan ekonomi terhadap komunitas lokal, serta sejauh mana perusahaan mengikuti standar internasional dalam operasional mereka. Dalam banyak kasus, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan sering kali menjadi isu yang tersembunyi di balik pernyataan-pernyataan yang tidak memadai

atau tidak dapat diverifikasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu berkomitmen untuk melaporkan secara terbuka dan mendetail tentang kebijakan dan praktik operasional mereka yang terkait dengan keberlanjutan dan transparansi (Kolk, 2003).

Salah satu prinsip transparansi yang sangat penting dalam industri ekstraktif adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi mengharuskan perusahaan untuk menyediakan data yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kegiatan mereka, yang mencakup pengelolaan dampak lingkungan dan hubungan dengan komunitas sekitar. Perusahaan yang transparan dalam hal ini akan menyediakan laporan yang mencakup informasi terkait dengan penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, pengendalian emisi, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional mereka. Dalam sektor ekstraktif, ini juga termasuk pengungkapan informasi mengenai proyek-proyek yang dilakukan, terutama terkait dengan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi lokal dan pengelolaan sosial (Cummings & Lee, 2018). Sebagai contoh, perusahaan yang beroperasi di sektor minyak dan gas atau pertambangan harus mengungkapkan bagaimana mereka meminimalkan kerusakan terhadap lingkungan dan apa saja tindakan yang mereka ambil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan operasional mereka.

Prinsip kedua dalam transparansi yang relevan dalam sektor industri ekstraktif adalah keterlibatan stakeholder. Keterlibatan stakeholder menuntut perusahaan untuk membuka saluran komunikasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak langsung atau

tidak langsung oleh operasional mereka. Ini mencakup pemerintah, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Scherer & Palazzo (2011), melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tetap pada jalur yang sesuai dengan harapan masyarakat dan norma sosial. Stakeholder yang terlibat ini juga berfungsi sebagai pengawas terhadap dampak yang ditimbulkan oleh industri ekstraktif, serta memastikan bahwa perusahaan menjalankan praktik yang berkelanjutan dan tidak merugikan.

Akuntabilitas yang jelas merupakan prinsip ketiga yang tidak kalah penting dalam konteks transparansi. Akuntabilitas mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya mengungkapkan informasi tentang operasi mereka, tetapi juga untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Dalam sektor ekstraktif, ini berarti bahwa perusahaan harus dapat memberikan bukti yang jelas tentang bagaimana mereka mengelola dampak lingkungan dan sosial serta bagaimana mereka memperbaiki kesalahan yang terjadi. Akuntabilitas ini juga mencakup pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen, serta penerapan sanksi bagi perusahaan yang gagal memenuhi standar transparansi dan keberlanjutan. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab

atas setiap keputusan yang diambil, baik itu dalam hal kebijakan lingkungan maupun pengelolaan sumber daya alam.

Prinsip transparansi lainnya yang relevan dalam sektor industri ekstraktif adalah konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaporan. Perusahaan tidak hanya harus menyajikan data dan laporan yang akurat, tetapi juga harus melakukannya secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam industri ekstraktif, ini berarti bahwa laporan yang dikeluarkan perusahaan harus mencakup data tahunan tentang kegiatan operasional mereka, serta bagaimana mereka menangani masalah lingkungan dan sosial secara berkelanjutan. Keberlanjutan ini juga mencakup upaya jangka panjang perusahaan dalam hal pemulihan lahan pasca-penambangan atau rehabilitasi lingkungan. Laporan yang konsisten dan berkelanjutan membantu membangun kepercayaan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, serta menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang lebih luas (Lehman, 2004).

Terakhir, transparansi dalam sektor ekstraktif juga harus mematuhi standar internasional. Di banyak negara, termasuk Indonesia, perusahaan yang beroperasi di sektor ekstraktif diwajibkan untuk mematuhi standar internasional dalam pelaporan dan pengelolaan operasional mereka. Misalnya, standar Global Reporting Initiative (GRI) dan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) telah diadopsi oleh banyak perusahaan besar sebagai pedoman dalam pelaporan kinerja mereka, baik dari segi finansial maupun dampak sosial dan lingkungan. Kepatuhan terhadap standar-standar internasional ini memastikan bahwa laporan yang

diberikan memenuhi ekspektasi global terkait keberlanjutan dan transparansi, serta memberikan kredibilitas tambahan terhadap klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan (EITI, 2016).

Secara keseluruhan, transparansi dalam sektor industri ekstraktif sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan menjaga kepercayaan publik. Penerapan prinsip-prinsip transparansi seperti keterbukaan informasi, keterlibatan stakeholder, akuntabilitas, konsistensi dalam pelaporan, serta kepatuhan terhadap standar internasional dapat mendorong praktik yang lebih berkelanjutan dan lebih bertanggung jawab di sektor ini. Dengan transparansi yang baik, perusahaan tidak hanya dapat memperbaiki citra mereka, tetapi juga dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, serta perlindungan lingkungan di wilayah operasional mereka.

2.3 Industri Ekstraktif dan Dampaknya terhadap Lingkungan

Industri ekstraktif yang mencakup kegiatan eksplorasi dan pengambilan sumber daya alam seperti batu bara, logam, minyak, dan gas adalah salah satu pilar utama ekonomi Indonesia. Di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, industri ekstraktif berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal dan nasional. Meskipun sektor ini menyediakan lapangan pekerjaan dan menyumbang pendapatan besar melalui pajak dan ekspor, dampak negatifnya terhadap lingkungan sering kali terabaikan. Kerusakan ekosistem, degradasi lahan, polusi, dan perubahan iklim adalah beberapa dari banyak masalah yang ditimbulkan oleh industri ini. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana sektor

ekstraktif di kedua provinsi ini beroperasi dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya (Ge & He, 2020).

Jawa Timur dikenal sebagai salah satu penghasil batubara terbesar di Indonesia, dengan sejumlah wilayah pertambangan batubara yang beroperasi secara intensif, seperti di kawasan Kutai dan Malang. Selain batubara, industri ekstraktif juga mencakup pertambangan minyak dan gas, serta eksploitasi mineral lainnya yang berpotensi merusak lingkungan. Di Jawa Barat, industri ekstraktif lebih berfokus pada bahan baku konstruksi seperti pasir, batu, dan kerikil. Meskipun industri ekstraktif berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), sektor ini juga membawa tantangan lingkungan yang harus diatasi dengan bijak (Felli & Reig, 2018). Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sering kali berujung pada pengrusakan ekosistem, dengan sedikit perhatian diberikan terhadap keseimbangan alam.

Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh sektor ini tidak hanya memengaruhi kondisi fisik lingkungan tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Banyak komunitas yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan kini terancam kehilangan mata pencaharian mereka akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ekstraksi. Degradasi tanah dan pencemaran air serta udara menjadi masalah utama yang mengancam keberlanjutan hidup mereka (Ahi & Searcy, 2017).

Salah satu dampak terbesar dari industri ekstraktif adalah pencemaran air yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan. Dalam banyak kasus, limbah dari proses pengolahan batubara atau mineral

lainnya mengalir ke sungai dan saluran air, membawa zat berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia beracun. Pencemaran ini tidak hanya merusak kualitas air yang digunakan oleh masyarakat setempat tetapi juga menghancurkan ekosistem perairan dan mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies air. Di Jawa Timur, pertambangan batubara di sekitar daerah pesisir mengakibatkan penurunan kualitas air yang digunakan untuk keperluan domestik dan pertanian. Air yang tercemar menyebabkan kerusakan pada tanaman serta mengurangi hasil tangkapan ikan bagi para nelayan (Zeng & Xu, 2019).

Selain pencemaran air, polusi udara yang dihasilkan oleh pembakaran batubara dan bahan bakar fosil lainnya juga menjadi masalah serius. Aktivitas pembukaan tambang, pengolahan mineral, serta transportasi batubara menghasilkan partikel debu dan emisi gas rumah kaca yang mengganggu kualitas udara. Di Jawa Barat, khususnya di daerah yang dekat dengan tambang dan pabrik pengolahan, polusi udara telah mencapai tingkat yang membahayakan kesehatan manusia. Masyarakat setempat sering kali mengeluh tentang meningkatnya kasus penyakit pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya akibat polusi udara yang dihasilkan oleh sektor industri ekstraktif (World Bank, 2015).

Industri ekstraktif juga berperan dalam kerusakan keanekaragaman hayati di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi kegiatan pertambangan. Aktivitas pertambangan besar-besaran di hutan dan daerah-daerah yang kaya akan biodiversitas, seperti di kawasan hutan tropis Jawa Timur, menyebabkan hilangnya habitat

alami bagi banyak spesies. Deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan ekstraktif sering kali berdampak pada hilangnya vegetasi yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kehilangan habitat ini mengancam populasi flora dan fauna lokal, yang pada gilirannya mengurangi biodiversitas di wilayah tersebut (Høvring & Marks, 2019).

Lebih jauh lagi, hilangnya habitat juga menyebabkan fragmentasi ekosistem, yang mengurangi kemampuan spesies untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Selain itu, pembukaan lahan untuk pertambangan membuka jalan bagi kegiatan ilegal lainnya, seperti perburuan liar dan penebangan hutan tanpa izin. Sebagai contoh, di beberapa area pertambangan di Jawa Timur, terdapat penurunan signifikan dalam jumlah spesies endemik, seperti burung merak dan satwa liar lainnya, yang sangat bergantung pada hutan untuk tempat berlindung dan sumber makanan mereka.

Erosi tanah menjadi salah satu masalah yang tak terhindarkan dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Penambangan terbuka, yang sering kali menghilangkan lapisan atas tanah yang subur, menyebabkan kerusakan serius pada tanah pertanian di sekitar daerah pertambangan. Sebagai contoh, di daerah Malang, kegiatan pertambangan batubara dan pasir telah menyebabkan erosi tanah yang begitu parah sehingga tanah yang dulunya subur kini menjadi gundul dan tidak produktif. Erosi ini juga berkontribusi pada peningkatan risiko bencana alam, seperti longsor dan banjir, yang semakin mengancam masyarakat yang tinggal di daerah hilir (Ge & He, 2020).

Selain erosi, degradasi lahan yang terjadi akibat pertambangan juga berdampak pada perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali. Banyak lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dan konservasi kini beralih fungsi menjadi area pertambangan yang tidak dapat dipulihkan lagi dengan mudah. Selain itu, keberadaan tambang yang terbuka mengubah aliran air dan sistem drainase alami, menyebabkan bencana banjir yang lebih sering. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi petani lokal yang bergantung pada lahan subur dan ekosistem alami untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka (Felli & Reig, 2018).

Untuk mengatasi dampak negatif dari industri ekstraktif, beberapa solusi mitigasi dapat diterapkan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, dalam industri pertambangan batubara, teknologi pengolahan yang lebih efisien dapat digunakan untuk mengurangi limbah dan pencemaran yang dihasilkan. Penggunaan teknologi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, serta metode untuk mengendalikan debu yang terlepas selama proses pengangkutan dan pengolahan batubara, dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap kualitas udara (Ahi & Searcy, 2017).

Program reklamasi lahan juga sangat penting untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan. Reklamasi yang efektif tidak hanya melibatkan penanaman kembali vegetasi di lahan yang telah terdegradasi, tetapi juga melibatkan

pengelolaan air dan tanah untuk mengembalikan ekosistem yang telah hilang. Dalam hal ini, peran pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan mematuhi standar lingkungan yang ketat dan bertanggung jawab dalam menjalankan operasional mereka (Zeng & Xu, 2019).

Industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat memang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, tetapi dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat besar. Pencemaran air dan udara, degradasi lahan, dan kerusakan keanekaragaman hayati menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan. Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, penting untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan, melakukan reklamasi lahan pasca-pertambangan, dan menegakkan regulasi yang ketat bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri ekstraktif. Tanpa upaya mitigasi yang serius, sektor ekstraktif akan terus berisiko menimbulkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki, baik bagi lingkungan maupun masyarakat setempat.

2.4 Menghubungkan Greenwashing dan Transparansi di Industri Ekstraktif

Industri ekstraktif, seperti pertambangan, minyak dan gas, serta kehutanan, merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian, tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang sangat besar. Aktivitas eksploitasi sumber daya alam sering kali berkontribusi pada kerusakan lingkungan, mulai dari degradasi tanah, polusi udara dan air, hingga hilangnya biodiversitas. Dalam

upaya untuk membangun citra yang lebih ramah lingkungan, banyak perusahaan di sektor ini terlibat dalam praktik green-washing, di mana mereka membuat klaim keberlanjutan yang tidak dapat dibuktikan atau bahkan menyesatkan. Fenomena ini semakin mendapat perhatian karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim dan keberlanjutan. Di sisi lain, transparansi menjadi aspek kunci yang dapat mengatasi green-washing, dengan memungkinkan pengawasan yang lebih baik atas klaim-klaim yang dibuat oleh perusahaan dan memastikan bahwa dampak lingkungan mereka tercatat secara akurat. Kerangka pemikiran dalam buku ini berfokus pada bagaimana green-washing terjadi di industri ekstraktif, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Barat, serta pentingnya transparansi dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan.

Untuk menganalisis fenomena green-washing dalam industri ekstraktif, diperlukan pendekatan yang mampu mengidentifikasi bagaimana perusahaan menggunakan pemasaran hijau atau klaim keberlanjutan untuk meningkatkan citra mereka, meskipun tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan di tingkat operasional. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah Corporate Social Responsibility (CSR) yang mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. CSR ini sangat penting karena dapat membantu kita memahami motivasi perusahaan dalam mengklaim bahwa mereka lebih peduli terhadap lingkungan daripada kenyataannya (Porter & Kramer, 2011). Dalam hal ini, green-washing terjadi ketika perusahaan memasukkan elemen keberlanjutan dalam

strategi pemasaran mereka untuk menarik konsumen atau pemangku kepentingan tanpa didukung oleh bukti nyata atau tindakan yang konkret. Model ini memeriksa klaim keberlanjutan dalam konteks CSR dan apakah mereka benar-benar mencerminkan praktek operasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Pendekatan berikutnya adalah Green Marketing Model, yang lebih fokus pada hubungan antara pemasaran hijau dan klaim keberlanjutan yang tidak terbukti. Green-washing seringkali terjadi dalam konteks pemasaran ini, di mana perusahaan mengklaim bahwa mereka beroperasi secara ramah lingkungan tanpa memberikan bukti yang dapat diverifikasi (Delmas & Burbano, 2011). Dalam industri ekstraktif, ini dapat dilihat pada klaim-klaim yang tidak mendalam atau berfokus pada isu-isu yang lebih bersifat kosmetik daripada solusi substansial terhadap kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Misalnya, sebuah perusahaan tambang dapat mengklaim bahwa mereka menggunakan energi terbarukan dalam sebagian kecil operasional mereka, meskipun mayoritas operasional mereka tetap bergantung pada energi fosil yang mencemari. Green-washing seperti ini mengarah pada misinformasi dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap klaim keberlanjutan perusahaan.

Dalam konteks green-washing, teori Stakeholder yang dikembangkan oleh Freeman (1984) sangat relevan untuk mengkaji interaksi perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, pemerintah, dan

kelompok lingkungan. Green-washing seringkali terjadi ketika perusahaan lebih memperhatikan citra di hadapan stakeholder, seperti investor atau konsumen, daripada benar-benar berfokus pada pengelolaan dampak lingkungan mereka. Dalam hal ini, perusahaan bisa saja melakukan kampanye pemasaran hijau yang intensif, tetapi tidak menyertakan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang sebenarnya, atau bahkan menghindari pengawasan eksternal yang dapat memvalidasi klaim mereka. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk lebih memahami bagaimana perusahaan berusaha memenuhi harapan stakeholder tanpa benar-benar mengubah praktik operasional mereka yang merusak lingkungan.

Transparansi dalam industri ekstraktif memainkan peran yang sangat penting untuk mengatasi green-washing dan memastikan bahwa klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi tidak hanya mengacu pada keterbukaan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan, tetapi juga mencakup transparansi proses, yaitu sejauh mana perusahaan melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan dan apakah mereka memberikan akses kepada publik untuk memantau dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi mereka. Salah satu model transparansi yang digunakan dalam analisis ini adalah Integrated Reporting (IR), yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi tidak hanya tentang kinerja finansial, tetapi juga tentang kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka. Model ini relevan

karena sektor ekstraktif seringkali terlibat dalam kontroversi mengenai kerusakan lingkungan, dan pengungkapan yang lebih mendalam dapat mengurangi kemungkinan green-washing serta meningkatkan akuntabilitas perusahaan (Eccles & Krzus, 2018).

Sebagai bagian dari upaya transparansi, Regulatory Transparency Model memperkenalkan gagasan bahwa perusahaan harus mematuhi regulasi yang mengharuskan mereka untuk mengungkapkan informasi yang relevan tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan mereka. Di banyak negara, termasuk Indonesia, regulasi mengenai transparansi informasi lingkungan sudah ada, namun implementasinya seringkali kurang efektif. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak eksternal, seperti lembaga lingkungan, masyarakat sipil, atau organisasi non-pemerintah, perusahaan akan lebih terdorong untuk memberikan laporan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang dampak lingkungan mereka. Ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan bukan hanya sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih transparan dengan masyarakat.

Dalam era digital, teknologi seperti blockchain dapat memainkan peran besar dalam meningkatkan transparansi di sektor ekstraktif. Dengan teknologi ini, setiap transaksi yang terkait dengan sumber daya alam yang diekstraksi dapat direkam secara digital dan transparan, yang memungkinkan publik untuk melacak asal-usul dan penggunaan sumber daya tersebut. Penggunaan teknologi

blockchain dapat memastikan bahwa klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan tidak dapat dipalsukan atau dimanipulasi, serta memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi secara real-time mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Teknologi ini tidak hanya membantu mengurangi green-washing, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap perusahaan yang beroperasi di sektor ekstraktif.

Model Trust and Transparency (Mayer et al., 1995) adalah pendekatan lain yang relevan untuk mengkaji hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan mereka dalam konteks transparansi. Model ini menekankan bahwa transparansi adalah salah satu faktor utama yang membangun kepercayaan antara perusahaan dan stakeholder, dan kepercayaan ini sangat penting untuk mengurangi praktek green-washing. Tanpa transparansi yang memadai, klaim perusahaan mengenai keberlanjutan dan dampak lingkungan mereka tidak akan dipercaya oleh publik, bahkan jika klaim tersebut didasarkan pada data yang benar. Kepercayaan ini harus dibangun melalui pengungkapan yang jujur dan akurat, serta komitmen nyata dari perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan mereka. Dengan demikian, penerapan model ini dapat meningkatkan integritas perusahaan dan meminimalkan kemungkinan green-washing yang merugikan.

Kerangka pemikiran dalam buku ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana green-washing dan transparansi saling berhubungan dalam sektor industri ekstraktif. Melalui penerapan berbagai model dan teori, seperti CSR, Green

Marketing, Stakeholder Theory, dan transparansi informasi serta proses, kita dapat memahami bagaimana perusahaan dapat terjebak dalam praktik green-washing dan bagaimana transparansi dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman ini sangat penting untuk menciptakan industri ekstraktif yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bab 3

Potret Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat: Tantangan dan Realitas

Industri ekstraktif merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Jawa Timur dan Jawa Barat, sebagai dua provinsi dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, memainkan peran penting dalam sektor ini. Aktivitas industri ekstraktif di kedua wilayah ini mencakup pertambangan batu bara, minyak dan gas, mineral non-logam, hingga kehutanan. Meskipun memberikan dampak ekonomi yang besar, sektor ini juga menghadirkan tantangan lingkungan dan sosial yang tidak dapat diabaikan, seperti degradasi tanah, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam profil dan karakteristik industri ekstraktif di kedua provinsi ini.

Jawa Timur, dengan kekayaan sumber daya seperti batu bara dan nikel, menjadi pusat aktivitas pertambangan yang signifikan, sementara Jawa Barat memiliki potensi besar di sektor pertambangan mineral non-logam dan energi terbarukan seperti panas bumi. Kedua provinsi ini tidak hanya menjadi penghasil utama sumber daya alam bagi kebutuhan domestik tetapi juga untuk pasar ekspor internasional. Namun, eksploitasi yang tidak terkelola dengan baik sering kali berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial, terutama di wilayah yang masyarakatnya bergantung pada sumber daya alam sebagai sumber penghidupan utama.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai profil industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat, meliputi potensi sumber daya, karakteristik aktivitas industri, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan memahami dinamika yang ada, diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang diperlukan guna mendorong transparansi, keberlanjutan, dan akuntabilitas di sektor industri ekstraktif di kedua provinsi ini.

3.1 **Sejarah dan Perkembangan Industri Ekstraktif**

Sektor ekstraktif, yang mencakup aktivitas pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam, memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, sektor ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama tetapi juga memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial dan ekonomi daerah. Sumber daya alam yang melimpah di kedua provinsi ini, seperti batu bara, tembaga, minyak, gas, marmer, dan kelapa sawit, telah mendorong pertumbuhan industri ekstraktif yang mengubah wajah ekonomi lokal dari masa ke masa. Namun, seiring berkembangnya industri ini, tantangan terkait keberlanjutan dan dampak lingkungan juga muncul sebagai isu yang semakin mendesak.

Sejak masa kolonial Belanda, Jawa Timur sudah dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pada abad ke-19, daerah ini menjadi pusat produksi gula yang besar, terutama di pesisir selatan. Pabrik-pabrik gula yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Probolinggo dan Situbondo

memainkan peran vital dalam perekonomian kolonial. Selain itu, tambang marmer di Tulungagung dan tembaga di Banyuwangi turut menarik perhatian Belanda. Aktivitas-aktivitas ini mendasari perkembangan industri ekstraktif di Jawa Timur yang terus berkembang hingga pasca kemerdekaan Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, sektor ekstraktif di Jawa Timur semakin berkembang, dengan pertambangan batu bara menjadi salah satu pilar utama. Kabupaten Bojonegoro, Blitar, dan Trenggalek menjadi pusat penghasil batu bara terbesar di provinsi ini. Pada 1970-an, pemerintah Indonesia mulai memanfaatkan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, dan sejak saat itu, kawasan timur Pulau Jawa ini telah menjadi salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Pertambangan batu bara di Jawa Timur tidak hanya mendongkrak perekonomian daerah, tetapi juga menjadi andalan ekspor yang menggerakkan sektor energi global.

Selain batu bara, marmer juga menjadi salah satu komoditas ekstraktif yang terkenal di Jawa Timur, terutama di Kabupaten Tulungagung. Sejak zaman kolonial, daerah ini telah dikenal sebagai penghasil marmer berkualitas tinggi. Marmer Tulungagung digunakan dalam berbagai bangunan penting, baik di dalam negeri maupun untuk diekspor ke luar negeri. Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, industri marmer Tulungagung mengalami perkembangan pesat, dengan adanya peningkatan permintaan untuk proyek-proyek pembangunan baik domestik maupun internasional. Namun, dalam perkembangannya, industri ini menghadapi tantangan terkait

keberlanjutan, seperti kerusakan lingkungan akibat penambangan yang tidak terkelola dengan baik.

Sektor energi, terutama minyak dan gas bumi, menjadi komponen penting dalam ekonomi Jawa Timur, dengan Sidoarjo sebagai salah satu pusatnya. Penemuan minyak di daerah ini pada 1970-an membawa dampak signifikan terhadap sektor ekstraktif. Pada masa itu, eksplorasi minyak di wilayah ini terus berkembang dan mendukung kebutuhan energi dalam negeri. Sumber daya alam ini juga menjadi andalan ekspor yang menguntungkan bagi Indonesia. Meskipun begitu, sektor minyak dan gas di Jawa Timur menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi yang intensif.

Sama halnya dengan Jawa Timur, Jawa Barat juga memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada abad ke-17, Jawa Barat dikenal sebagai penghasil kopi terbaik yang diekspor ke berbagai negara Eropa. Wilayah Puncak dan Cianjur menjadi pusat perkebunan kopi yang menggerakkan perekonomian daerah. Pada masa kolonial, ekspor kopi dari Jawa Barat menjadi salah satu komoditas utama yang mendukung ekonomi Indonesia, yang pada saat itu masih berada di bawah pemerintahan Belanda. Keberhasilan industri kopi ini memberikan fondasi bagi berkembangnya sektor ekstraktif lainnya di provinsi ini, seperti tembaga dan batu bara.

Pada abad ke-20, Jawa Barat mulai memanfaatkan sumber daya mineral lainnya, seperti tembaga dan batu bara. Meskipun

sektor pertambangan di Jawa Barat tidak sebesar di Kalimantan atau Jawa Timur, namun kontribusinya terhadap ekonomi regional tetap signifikan. Di sekitar daerah Bandung dan Cirebon, ditemukan cadangan tembaga yang dieksploitasi untuk kebutuhan industri domestik. Aktivitas pertambangan batu bara di beberapa kabupaten juga turut memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah, meskipun sektor ini tidak berkembang sepesat di Jawa Timur.

Memasuki abad ke-21, Jawa Barat mengalami transformasi besar dalam sektor ekstraktif dengan berkembangnya industri kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di wilayah Subang, Indramayu, dan Karawang semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap minyak kelapa sawit. Walaupun sektor ini memberikan dampak ekonomi yang besar, keberlanjutannya menjadi isu penting. Konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi yang signifikan dan kerusakan ekosistem yang mengancam keberlanjutan sumber daya alam di kawasan ini.

Industri ekstraktif di kedua provinsi ini, meskipun memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi, juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Di Jawa Timur, aktivitas pertambangan batu bara dan marmer seringkali terkait dengan kerusakan lahan, polusi udara, dan pencemaran air. Begitu pula di Jawa Barat, ekspansi perkebunan kelapa sawit menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Dampak sosialnya juga tidak kalah signifikan, di mana masyarakat lokal seringkali terjebak dalam

ketergantungan terhadap pekerjaan di sektor ekstraktif, namun dengan kondisi kerja yang buruk dan upah yang rendah.

Pemerintah Indonesia telah berusaha mengelola sektor ekstraktif dengan memperkenalkan berbagai kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan dan pengelolaan yang lebih bijaksana. Di Jawa Timur, misalnya, beberapa kebijakan telah diterapkan untuk mengurangi dampak negatif pertambangan batu bara terhadap lingkungan. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga telah memperkenalkan regulasi yang lebih ketat terkait eksploitasi marmer dan tembaga. Di Jawa Barat, upaya untuk mendorong praktik kelapa sawit berkelanjutan semakin diperketat dengan penerapan sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Ke depan, sektor ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah industri, menjadi solusi yang semakin diperhatikan oleh pemerintah dan pelaku industri. Selain itu, sektor ini harus beradaptasi dengan perubahan tren global yang mengutamakan keberlanjutan, sehingga industri ekstraktif tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.

Sejarah dan perkembangan sektor ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat menunjukkan bagaimana sektor ini telah bertransformasi menjadi pilar penting ekonomi daerah. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, tantangan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan perlu menjadi

perhatian serius. Pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan akan menjadi kunci agar sektor ekstraktif tetap dapat mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

3.2 **Kondisi Sosial dan Ekonomi di Jawa Timur dan Jawa Barat**

Jawa Timur dan Jawa Barat, dua provinsi besar di Pulau Jawa, memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Kedua provinsi ini dikenal dengan keberagaman sumber daya alamnya, yang menjadi basis utama bagi berbagai sektor industri ekstraktif. Perekonomian di kedua provinsi ini didorong oleh sektor pertambangan, energi, dan perkebunan yang mengandalkan kekayaan alam, seperti batu bara, tembaga, minyak, gas, serta kelapa sawit. Namun, di balik potensi besar tersebut, sektor industri ekstraktif juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia, memiliki sektor ekstraktif yang sangat mendominasi perekonomian daerah. Aktivitas pertambangan batu bara di Bojonegoro, Trenggalek, dan Blitar memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan negara. Selain itu, sektor lain seperti pertambangan marmer di Tulungagung dan eksplorasi tembaga di Banyuwangi juga memperkuat struktur ekonomi di wilayah ini. Keberadaan industri ekstraktif ini mendukung sektor-sektor terkait, seperti transportasi, perdagangan, dan konstruksi, yang secara langsung berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Meskipun sektor ekstraktif telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Timur, ketergantungan yang tinggi terhadap industri ini membawa risiko tertentu. Fluktuasi harga komoditas seperti batu bara dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi daerah. Ketika harga batu bara dunia turun, pendapatan daerah yang mengandalkan sektor ini cenderung menurun. Selain itu, adanya ketergantungan yang tinggi terhadap industri ekstraktif juga dapat menghambat diversifikasi ekonomi. Masyarakat seringkali terjebak dalam pekerjaan dengan keterampilan terbatas, yang membuat mereka rentan terhadap perubahan dalam sektor ini.

Industri ekstraktif di Jawa Timur juga membawa dampak sosial yang beragam. Di satu sisi, industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan di sektor pertambangan, transportasi, dan industri pendukung lainnya. Masyarakat yang tinggal di sekitar tambang atau pabrik pengolahan sumber daya alam seringkali mendapatkan keuntungan langsung berupa pekerjaan dan peluang usaha kecil. Namun, kondisi kerja yang seringkali tidak memadai dan kurangnya jaminan sosial membuat banyak pekerja di sektor ini hidup dalam kondisi yang kurang sejahtera. Selain itu, ketidakpastian pendapatan di sektor ekstraktif membuat kesejahteraan sosial menjadi rentan.

Jawa Barat, dengan industri ekstraktif yang berfokus pada pertanian, perkebunan, dan energi, menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan. Sektor kelapa sawit yang berkembang pesat di Subang, Indramayu, dan Karawang telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan, namun dampak sosialnya sangat kompleks. Sebagian besar tenaga kerja di sektor kelapa sawit

adalah pekerja harian dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak terjamin. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, ketimpangan pendapatan antara pekerja di sektor ekstraktif dan sektor lainnya menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Sektor kelapa sawit menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Jawa Barat, dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor Indonesia. Perkebunan kelapa sawit yang luas di beberapa daerah seperti Subang dan Indramayu menyumbang pada pertumbuhan ekonomi provinsi ini, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Selain itu, pabrik pengolahan kelapa sawit turut membuka kesempatan bagi para pekerja di sektor industri. Namun, meskipun sektor ini menguntungkan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang sektor kelapa sawit juga dihadapkan pada masalah keberlanjutan dan dampak lingkungan yang merugikan.

Di sisi lain, ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Jawa Barat membawa dampak lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi dan kerusakan ekosistem. Praktik konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit mengancam keberagaman hayati dan menyebabkan hilangnya habitat satwa liar. Selain itu, dampak sosial dari ekspansi ini juga tampak, di mana beberapa komunitas lokal kehilangan akses ke lahan pertanian tradisional mereka dan terpaksa bergantung pada pekerjaan di perkebunan dengan kondisi kerja yang sering kali tidak menguntungkan.

Industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat juga mendorong pembangunan infrastruktur yang signifikan. Di Jawa Timur, industri pertambangan batu bara mendorong pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas pengolahan, yang tidak hanya mendukung industri ekstraktif itu sendiri, tetapi juga sektor-sektor lain seperti perdagangan dan logistik. Di Jawa Barat, keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit dan fasilitas energi lainnya juga memacu pembangunan infrastruktur transportasi dan energi. Namun, meskipun pembangunan infrastruktur tersebut menguntungkan sektor industri, keuntungan ini sering kali tidak merata, dengan beberapa daerah yang jauh dari pusat industri tetap tertinggal.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Jawa Timur dan Jawa Barat dalam sektor ekstraktif adalah penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Banyak pekerja di sektor pertambangan dan perkebunan berstatus sebagai pekerja harian yang tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial atau pelatihan keterampilan. Ini menimbulkan masalah dalam menciptakan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat yang bekerja di sektor ini. Pemerintah daerah telah berusaha memperkenalkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat, namun implementasinya masih terbatas.

Pemerintah daerah di Jawa Timur dan Jawa Barat memainkan peran penting dalam mengelola sektor ekstraktif, baik melalui kebijakan regulasi maupun program pembangunan ekonomi. Beberapa kebijakan telah diterapkan untuk memastikan bahwa hasil

dari sektor ekstraktif dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat, seperti regulasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapan standar lingkungan yang ketat. Namun, pengawasan yang tidak konsisten dan ketergantungan ekonomi yang besar pada industri ekstraktif sering kali menghalangi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Ke depan, kedua provinsi ini memiliki peluang untuk mengalihkan fokus dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Diversifikasi ekonomi yang mencakup sektor industri manufaktur, pariwisata, dan ekonomi digital dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam dan memberikan dampak yang lebih positif terhadap kesejahteraan sosial. Namun, untuk mencapai ini, perlu ada kebijakan yang lebih proaktif dalam pengembangan sektor-sektor ini dan perbaikan dalam sistem pendidikan serta pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja.

Industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat memang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, namun dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan perlu menjadi perhatian lebih. Untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya alam dengan bijak dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sebagian kecil saja. Transformasi ini akan membutuhkan perubahan kebijakan

yang lebih berpihak pada keberlanjutan sosial dan lingkungan demi masa depan yang lebih sejahtera.

3.3 Peran Pemerintah dan Kebijakan Terkait Industri Ekstraktif

Industri ekstraktif, yang meliputi sektor pertambangan, minyak dan gas, serta perkebunan, merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Namun, sektor ini juga menghadirkan tantangan besar terkait pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan transparansi. Kebijakan pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan industri ekstraktif tidak hanya menghasilkan pendapatan negara, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Transparansi dalam pengelolaan sektor ini menjadi kunci dalam menciptakan akuntabilitas yang lebih baik.

Sejak awal 2000-an, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang lebih berkelanjutan. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pemanfaatan sumber daya alam melalui mekanisme perizinan yang lebih ketat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB) adalah salah satu kebijakan penting yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi eksploitasi mineral dan batubara di Indonesia. Kebijakan ini menekankan perlunya izin eksplorasi yang jelas, serta kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Transparansi dalam pengelolaan industri ekstraktif adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mendorong kebijakan yang lebih terbuka, seperti penerapan *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI). EITI adalah sebuah inisiatif internasional yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam industri ekstraktif dengan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pembayaran yang mereka buat kepada pemerintah dan sebaliknya. Indonesia telah menjadi anggota EITI sejak 2010, yang berupaya untuk memastikan bahwa seluruh pendapatan dari sektor ekstraktif dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada aliran dana yang tersembunyi.

Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan kebijakan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya mineral dan energi. Kebijakan tersebut tidak hanya mengutamakan eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mencakup perlindungan lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup turut memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bagian integral dari kebijakan pengelolaan industri ekstraktif yang ditekankan oleh pemerintah. Banyak perusahaan pertambangan dan energi yang

diwajibkan untuk melaksanakan program CSR sebagai bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, pemerintah mengatur agar CSR tidak hanya sekadar menjadi kegiatan sosial yang dilakukan untuk mendapatkan izin operasi, tetapi harus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Meski demikian, implementasi CSR sering kali terbatas pada sektor-sektor tertentu, dan masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya transparan dalam melaksanakan kewajiban ini.

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan industri ekstraktif, pemerintah juga telah memperkenalkan kebijakan yang meningkatkan kapasitas lembaga pengawas seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah praktek penyalahgunaan izin dan perizinan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Pengawasan ini juga menyangkut pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan ekstraktif, di mana pemerintah memonitor pelaksanaan restorasi lahan pasca-tambang dan pencegahan pencemaran.

Pemerintah Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengatur pajak bagi sektor industri ekstraktif. Meskipun sektor ini menyumbang pendapatan yang besar bagi negara, masih banyak perusahaan yang memanfaatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban pajak. Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, pemerintah telah menyusun kebijakan tax justice, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang

beroperasi di sektor ekstraktif membayar pajak secara adil. Kebijakan ini termasuk peningkatan transparansi dalam pelaporan pajak, yang mempermudah pemerintah untuk mengawasi kewajiban pajak yang harus dibayar oleh setiap perusahaan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang sangat penting adalah perlindungan terhadap masyarakat adat dan lingkungan yang terdampak oleh aktivitas ekstraktif. Pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan yang memberikan hak kepada masyarakat adat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Dalam hal ini, program-program perencanaan tata ruang dan evaluasi dampak lingkungan menjadi instrumen penting untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan industri ekstraktif. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali terkendala oleh kurangnya pemahaman tentang hak-hak masyarakat adat.

Penegakan hukum dalam sektor ekstraktif masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur tata kelola sektor ini, masih banyak terjadi praktik penyalahgunaan sumber daya alam, seperti penambangan liar dan kebocoran pajak. Pemerintah telah berupaya untuk memperkuat lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum. Namun, hambatan dalam penegakan hukum sering kali terkait dengan praktik korupsi dan lemahnya pengawasan di tingkat lokal.

Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan sektor ekstraktif telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang dinilai cukup efektif dalam meningkatkan transparansi. Sistem pelaporan elektronik yang dikembangkan oleh pemerintah memungkinkan publik untuk mengakses informasi mengenai aliran pendapatan dan pajak dari sektor ekstraktif secara langsung. Dengan adanya teknologi ini, diharapkan tidak ada lagi ruang untuk ketidaktransparanan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah juga telah bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memastikan bahwa sistem pelaporan ini sesuai dengan standar internasional.

Sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif, pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sektor ekstraktif. Melalui forum-forum konsultasi publik dan pendekatan yang lebih partisipatif, masyarakat lokal diberi ruang untuk memberikan masukan terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun ini sudah mulai diterapkan di beberapa daerah, masih banyak tantangan terkait rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, yang disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pemahaman tentang kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia terus berkembang dan berupaya untuk memperbaiki transparansi serta keberlanjutan sektor ini. Meskipun sudah banyak kebijakan yang diterapkan, tantangan yang dihadapi masih sangat besar, terutama dalam hal penegakan

hukum dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengoptimalkan kebijakan yang ada, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan transparansi melalui penggunaan teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan pengelolaan industri ekstraktif dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

3.4 Masalah Lingkungan yang Timbul dari Industri Ekstraktif

Industri ekstraktif, yang meliputi pertambangan, minyak dan gas, serta aktivitas kehutanan, telah lama menjadi pilar penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, selain kontribusinya yang besar terhadap pendapatan negara dan penyediaan lapangan kerja, sektor ini juga menghadirkan masalah serius terkait kerusakan lingkungan. Ekspansi kegiatan industri ekstraktif sering kali menyebabkan kerusakan ekosistem yang tak terpulihkan, mengancam keberlanjutan sumber daya alam, serta merusak kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi industri.

Salah satu dampak lingkungan paling nyata dari industri ekstraktif adalah penebangan hutan yang masif, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Proses pembukaan lahan untuk tambang atau perkebunan sering melibatkan penebangan pohon-pohon besar dan penghancuran habitat alami. Akibatnya, banyak spesies flora dan fauna yang terancam punah, dan biodiversitas ekosistem yang ada hancur. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatra,

kerusakan hutan tropis akibat aktivitas industri ekstraktif telah menyebabkan hilangnya habitat bagi spesies langka seperti orangutan dan harimau sumatra.

Aktivitas pertambangan, khususnya tambang batubara dan emas, menyumbang pada masalah pencemaran air yang signifikan. Pencemaran ini terjadi karena limbah beracun dari proses penambangan, seperti merkuri, sianida, dan bahan kimia lainnya, sering dibuang begitu saja ke sungai dan danau. Misalnya, di beberapa wilayah Indonesia, sungai-sungai tercemar oleh limbah merkuri yang digunakan dalam proses ekstraksi emas. Pencemaran air ini tidak hanya merusak ekosistem perairan, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat yang bergantung pada air bersih dari sumber tersebut.

Polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dalam kegiatan industri ekstraktif, terutama dalam industri minyak dan gas, juga merupakan masalah besar. Proses ekstraksi minyak dan gas dapat mengeluarkan emisi gas rumah kaca (GRK) seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan nitrogen oksida (NO_x) yang memperburuk kualitas udara. Peningkatan kadar polusi udara berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan penyakit jantung pada manusia, serta merusak kualitas udara di sekitarnya. Selain itu, asap dan debu yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan terbuka juga dapat mencemari udara dan menurunkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Kegiatan pertambangan terbuka, seperti penambangan batubara, sering menyebabkan degradasi tanah dan erosi yang

parah. Setelah lapisan tanah atas digali untuk mengambil bahan tambang, tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi, terutama ketika hujan turun. Degradasi tanah ini dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah, mengurangi produktivitas pertanian, dan meningkatkan risiko bencana alam seperti longsor. Tanah yang tererosi juga cenderung membawa sedimen dan bahan berbahaya yang dapat mencemari sungai dan lahan pertanian.

Dalam banyak industri ekstraktif, terutama dalam proses pertambangan dan pengolahan mineral, air digunakan dalam jumlah besar. Aktivitas ini dapat mengganggu siklus air alami di daerah tersebut, mengurangi ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat, pertanian, dan ekosistem lainnya. Di daerah-daerah dengan cadangan air terbatas, penggunaan air yang berlebihan ini dapat menyebabkan kekeringan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, dalam industri pertambangan emas, air digunakan untuk memisahkan emas dari bijihnya, namun sering kali air tersebut tercemar oleh bahan kimia berbahaya yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut.

Sektor industri ekstraktif menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dengan cara yang langsung dan tidak langsung. Pembukaan lahan untuk tambang, pabrik, dan infrastruktur terkait menghancurkan habitat alami bagi banyak spesies. Selain itu, polusi dan perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas industri ekstraktif juga memperburuk kondisi bagi banyak spesies yang sudah terancam punah. Kehilangan keanekaragaman hayati ini

merusak keseimbangan ekosistem dan mempengaruhi ketahanan pangan serta kesehatan ekosistem di masa depan.

Selain dampak langsung pada alam, kerusakan lingkungan akibat industri ekstraktif juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Banyak komunitas yang bergantung pada sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti pertanian dan perikanan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh industri ekstraktif dapat menghancurkan mata pencaharian mereka dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Konflik tanah antara perusahaan dan masyarakat lokal sering kali muncul, meningkatkan ketegangan sosial dan ketidakpuasan yang berpotensi mengarah pada protes atau kekerasan.

Polusi yang dihasilkan oleh industri ekstraktif memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Debu yang dihasilkan oleh penambangan, polusi air dari limbah tambang, dan polusi udara dari pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, kanker, dan penyakit kulit. Di beberapa daerah yang terpapar aktivitas pertambangan, seperti di Kalimantan, masyarakat sering mengalami penyakit akibat pencemaran udara dan air yang berasal dari limbah industri.

Selain pencemaran air, industri ekstraktif juga menyebabkan pencemaran tanah melalui pembuangan limbah berbahaya yang tidak dikelola dengan baik. Di banyak wilayah, tambang emas menggunakan merkuri dalam proses ekstraksi, dan bahan kimia berbahaya ini sering kali mencemari tanah di sekitar lokasi tambang.

Pencemaran tanah ini tidak hanya merusak kualitas tanah itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi tanaman dan hewan yang bergantung pada tanah tersebut. Masyarakat yang tinggal di sekitar tambang juga terancam oleh kontaminasi tanah yang dapat masuk ke dalam rantai makanan.

Industri ekstraktif berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global. Kegiatan pertambangan dan pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang memperburuk pemanasan global. Deforestasi yang terjadi akibat pembukaan lahan untuk industri ekstraktif juga meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Dampak jangka panjang dari perubahan iklim ini termasuk peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan, yang dapat merusak lebih lanjut ekosistem dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Sektor industri ekstraktif juga menimbulkan dampak negatif terhadap infrastruktur dan sumber daya alam lainnya. Penambangan yang dilakukan secara terbuka dapat merusak jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar kawasan industri. Kerusakan ini dapat memperburuk aksesibilitas ke daerah-daerah yang terpencil dan memperburuk kondisi hidup masyarakat yang sudah terpinggirkan. Selain itu, penggunaan bahan kimia dalam proses pertambangan seringkali merusak struktur tanah dan menyebabkan masalah jangka panjang bagi pertanian dan infrastruktur lainnya.

Walaupun industri ekstraktif umumnya berfokus pada pengambilan sumber daya alam yang tidak terbarukan, kerusakan

yang ditimbulkan oleh sektor ini juga berdampak pada sumber daya alam terbarukan. Misalnya, polusi yang merusak kualitas air dan tanah dapat mengganggu pertanian dan perikanan, yang keduanya merupakan sumber daya alam terbarukan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Kerusakan ini tidak hanya merugikan ekonomi lokal, tetapi juga mengancam ketahanan pangan yang bergantung pada kelestarian alam.

Meski berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengurangi dampak negatif industri ekstraktif, pengelolaan lingkungan yang efektif tetap menjadi tantangan besar. Kurangnya penegakan hukum, ketidakmampuan dalam pemantauan, serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan yang masih terbatas menjadi hambatan utama. Perusahaan sering kali lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dibandingkan tanggung jawab lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap sektor ini.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri ekstraktif. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya konservasi alam serta cara-cara mengurangi polusi dapat membantu memperkecil kerusakan yang terjadi. Selain itu, masyarakat dapat terlibat dalam upaya pemantauan kegiatan industri di sekitar mereka dan berpartisipasi dalam advokasi untuk kebijakan yang lebih ramah lingkungan.

Industri ekstraktif, meskipun memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian, membawa dampak negatif yang besar

terhadap lingkungan. Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan dan teknologi yang dapat mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas ekstraktif. Pencarian solusi yang lebih berkelanjutan akan memungkinkan kita untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Bab 4

Mengupas Greenwashing di Industri Ekstraktif: Fakta di Balik Klaim Hijau

Industri ekstraktif, yang mencakup sektor pertambangan, minyak, gas, dan kehutanan, memiliki peran penting dalam perekonomian global. Namun, kegiatan ini sering kali dikritik karena dampaknya yang merusak lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang perubahan iklim dan krisis lingkungan, perusahaan-perusahaan dalam sektor ini mulai mengadopsi strategi pemasaran yang menonjolkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan ramah lingkungan. Namun, di balik klaim tersebut, muncul fenomena yang dikenal sebagai green-washing—praktik di mana perusahaan berusaha menciptakan citra "hijau" atau ramah lingkungan tanpa melakukan perubahan substantif dalam operasional mereka.

Green-washing merujuk pada upaya perusahaan untuk menutupi atau memperkecil dampak lingkungan dari kegiatan mereka dengan cara yang menyesatkan konsumen, investor, dan masyarakat umum. Dalam industri ekstraktif, ini sering kali melibatkan kampanye pemasaran yang menekankan upaya konservasi atau penggunaan energi terbarukan, sementara pada saat yang sama, kegiatan ekstraksi mereka terus merusak lingkungan dalam skala besar. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen yang percaya pada klaim lingkungan tersebut, tetapi juga memperburuk masalah

lingkungan yang sudah ada, seperti deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem.

Di Indonesia, sektor ekstraktif memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, namun sering kali diiringi dengan kerusakan lingkungan yang parah. Banyak perusahaan dalam sektor ini yang berlomba-lomba menampilkan citra ramah lingkungan, terutama karena meningkatnya permintaan global terhadap produk-produk yang berkelanjutan. Namun, meskipun ada upaya untuk memperbaiki dampak ekologis mereka, laporan mengenai green-washing di sektor ini menunjukkan bahwa ada banyak klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kritis terhadap praktik-praktik ini, baik dari perspektif regulasi, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan.

Dalam analisis ini, kita akan membahas fenomena green-washing dalam industri ekstraktif dengan fokus pada cara perusahaan menggunakan strategi pemasaran untuk menciptakan citra lingkungan yang tidak sesuai dengan kenyataan operasional mereka. Kita juga akan melihat dampak dari praktik ini terhadap keberlanjutan industri ekstraktif itu sendiri, serta bagaimana peran konsumen, regulator, dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini.

4.1 Praktik Green-Washing yang Ditemukan di Jawa Timur dan Jawa Barat

Green-washing telah menjadi isu yang semakin mencuat dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam sektor industri ekstraktif yang memiliki dampak lingkungan besar seperti pertambangan, eksplorasi minyak, dan gas. Industri ini, meskipun

mendapat tekanan besar untuk beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan, masih sering terlibat dalam praktik green-washing untuk memperbaiki citra mereka tanpa melakukan perubahan nyata yang signifikan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dalam konteks Jawa Timur dan Jawa Barat, yang merupakan dua provinsi dengan tingkat aktivitas ekstraktif yang tinggi, praktik ini lebih terlihat jelas. Artikel ini menganalisis lebih dalam tentang praktik green-washing di kedua wilayah tersebut, dengan fokus pada industri ekstraktif dan metode yang digunakan perusahaan untuk memanipulasi persepsi publik tentang komitmen lingkungan mereka.

Jawa Timur adalah salah satu pusat utama pertambangan batu bara di Indonesia. Berdasarkan laporan *The World Bank* (2017) dan *Environmental Justice Atlas* (2020), provinsi ini telah lama menjadi lokasi aktivitas penambangan yang merusak lingkungan, termasuk kerusakan hutan, pencemaran air, dan degradasi kualitas udara. Meskipun dampak negatif ini sudah diakui oleh masyarakat lokal dan internasional, beberapa perusahaan pertambangan di Jawa Timur mengklaim bahwa mereka telah mengimplementasikan sistem pertambangan yang lebih ramah lingkungan.

Berdasarkan laporan *Greenpeace* (2019), banyak perusahaan tambang di Jawa Timur yang memanfaatkan program penanaman pohon untuk mengimbangi kerusakan hutan akibat penambangan. Klaim ini sering kali dikemukakan dalam laporan tahunan perusahaan atau dalam materi pemasaran mereka. Namun, seperti yang diungkapkan oleh *Fletcher & Babbitt* (2018) dalam jurnal *Corporate*

Social Responsibility and Environmental Management, program tersebut sering kali hanya bersifat simbolis dan tidak menyentuh akar permasalahan utama, yakni kerusakan ekosistem yang lebih luas yang disebabkan oleh penambangan yang tidak terkendali.

Perusahaan juga sering kali menggembar-gemborkan teknologi baru yang konon dapat mengurangi dampak negatif, seperti teknologi pengelolaan air yang lebih efisien atau penggunaan energi terbarukan dalam operasional mereka. Namun, menurut *Chavez & Pereira* (2020) dalam jurnal *Environmental Economics and Policy Studies*, banyak dari klaim tersebut yang tidak terverifikasi atau tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan emisi atau kerusakan lingkungan.

Industri eksplorasi minyak dan gas di Jawa Barat, meskipun lebih kecil skalanya dibandingkan dengan industri batu bara di Jawa Timur, tetap menjadi sektor yang penting dengan dampak lingkungan yang besar. Seperti yang dijelaskan oleh *Levinson* (2018) dalam *Energy Policy Journal*, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini sering menggunakan teknik green-washing untuk menyembunyikan dampak negatif dari kegiatan eksplorasi dan pengeboran mereka. Beberapa perusahaan di Jawa Barat mengklaim bahwa mereka berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, seperti pengurangan kebocoran metana atau penggunaan energi bersih, tetapi pada kenyataannya teknologi ini belum terbukti mampu mengurangi dampak signifikan dari eksploitasi energi fosil.

Salah satu contoh nyata adalah pengoperasian kilang minyak yang terletak di kawasan yang rentan terhadap kerusakan ekosistem, seperti daerah pegunungan dan hutan tropis. Perusahaan-perusahaan minyak di wilayah ini sering kali mengklaim bahwa mereka melakukan restorasi lingkungan atau melibatkan masyarakat lokal dalam program konservasi. Namun, berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Zhang et al*. (2020) dalam jurnal *Energy Sustainability and Society*, banyak dari program tersebut yang tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap mitigasi kerusakan ekologis, dan lebih sering digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kerusakan yang lebih besar yang terjadi akibat produksi minyak itu sendiri.

Salah satu teknik yang paling sering digunakan oleh perusahaan yang terlibat dalam green-washing adalah memberikan klaim keberlanjutan yang tidak dapat dibuktikan atau dipertanggungjawabkan. Perusahaan sering kali mengumbar kata-kata seperti "energi bersih", "ramah lingkungan", atau "berkelanjutan", tanpa memberikan bukti yang cukup mengenai langkah konkret yang telah diambil untuk mengurangi dampak lingkungan mereka.

Sebagai contoh, dalam analisis terhadap perusahaan pertambangan batu bara di Kalimantan yang dipublikasikan dalam *Journal of Cleaner Production* (2019), ditemukan bahwa banyak perusahaan hanya mengandalkan klaim umum tentang keberlanjutan tanpa disertai data yang jelas dan transparan tentang pengelolaan limbah atau emisi gas rumah kaca. Hal ini menciptakan kesan bahwa perusahaan tersebut berkomitmen pada lingkungan,

padahal faktanya mereka masih menjalankan praktik yang sangat merusak lingkungan.

Sebagian perusahaan yang terlibat dalam green-washing juga cenderung mengalihkan perhatian publik dari isu lingkungan yang lebih besar dengan berfokus pada topik yang lebih mudah dipasarkan. Misalnya, perusahaan tambang batu bara di Jawa Timur sering mengedepankan program penanaman pohon atau pengelolaan limbah kecil, namun mereka jarang membahas dampak utama dari kegiatan penambangan mereka, seperti deforestasi massal atau polusi udara yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara.

Menurut penelitian *Mitchell & Altschul* (2022) dalam *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, ini adalah salah satu teknik paling efektif dalam green-washing karena masalah kecil yang mereka tunjukkan lebih mudah diterima publik daripada isu yang lebih besar dan kompleks, seperti kerusakan ekosistem atau pencemaran jangka panjang.

Banyak perusahaan yang terlibat dalam green-washing menggunakan sertifikasi lingkungan yang tidak sah atau tidak terverifikasi untuk memberikan kesan bahwa mereka beroperasi secara ramah lingkungan. Sebagai contoh, beberapa perusahaan energi di Jawa Barat mungkin menggunakan label "green energy" atau "eco-friendly" tanpa memperoleh sertifikasi dari lembaga yang diakui secara internasional, seperti *Forest Stewardship Council* (FSC) atau *ISO 14001*.

Penelitian yang dilakukan oleh *Lyon & Montgomery* (2020) dalam *Business & Society Review* menunjukkan bahwa penggunaan label lingkungan yang tidak sah sering kali dilakukan oleh perusahaan untuk mengelabui konsumen dan mengurangi tekanan regulasi, meskipun mereka tidak menjalankan praktik ramah lingkungan yang sebenarnya.

Perusahaan dalam industri ekstraktif sering kali memanfaatkan klaim teknologi baru yang seharusnya lebih ramah lingkungan, seperti teknologi pengelolaan limbah yang lebih efisien atau energi terbarukan, untuk memperbaiki citra mereka. Namun, seperti yang ditekankan oleh *Carrigan & Attalla* (2022) dalam *Journal of Business Ethics*, teknologi ini sering kali belum terbukti atau belum diterapkan dalam skala besar untuk mengurangi dampak lingkungan yang sebenarnya.

Bahkan ketika teknologi ini berfungsi dengan baik dalam uji coba kecil, tantangan besar muncul ketika perusahaan mencoba menerapkannya di lapangan dengan skala yang lebih besar. Ini sering kali memerlukan biaya besar dan investasi yang belum tentu membuahkan hasil sesuai dengan klaim yang ada.

Salah satu dampak terbesar dari green-washing adalah bahwa ia menutupi atau bahkan mengalihkan perhatian dari kerusakan lingkungan yang lebih parah. Sebagai contoh, meskipun beberapa perusahaan menanam pohon untuk memitigasi kerusakan hutan, penambangan itu sendiri sering kali menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar dan tidak dapat diperbaiki hanya dengan kegiatan restorasi kecil.

Dalam kajian oleh *Bertels & Papania* (2021) dalam *Journal of Environmental Management*, ditemukan bahwa green-washing justru menghambat upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar masalah yang lebih besar dalam praktik bisnis. Dengan menyoroti inisiatif kecil yang tidak efektif, perusahaan memberikan ilusi bahwa mereka bertanggung jawab terhadap lingkungan, padahal mereka tidak melakukan perubahan struktural yang signifikan.

Green-washing juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang mengklaim komitmen lingkungan tanpa melakukan perubahan nyata. Ketika konsumen mengetahui bahwa mereka telah dibohongi, mereka cenderung beralih ke perusahaan lain yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Penelitian oleh *Terlaak & Boynton* (2020) dalam *International Journal of Corporate Social Responsibility* menunjukkan bahwa konsumen semakin cerdas dalam mengidentifikasi praktik green-washing, dan perusahaan yang terlibat dalam praktik ini sering kali mengalami kerugian reputasi yang signifikan.

Praktik green-washing masih sangat terlihat di Jawa Timur dan Jawa Barat, terutama dalam industri ekstraktif seperti pertambangan batu bara dan eksplorasi minyak dan gas. Meskipun perusahaan-perusahaan ini sering mengklaim bahwa mereka beroperasi dengan cara yang ramah lingkungan, banyak dari klaim tersebut yang tidak dapat dibuktikan atau hanya bersifat simbolis. Teknik-teknik seperti klaim tidak berdasar, penggunaan label lingkungan yang tidak sah, dan pemanfaatan teknologi yang belum teruji adalah metode yang sering digunakan untuk menciptakan ilusi tanggung jawab

lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat, peningkatan transparansi, serta kesadaran yang lebih besar dari konsumen untuk mendukung perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada keberlanjutan.

4.2 Faktor Penyebab Green-Washing

Green-washing dalam sektor industri ekstraktif, terutama di wilayah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat, bukan hanya soal upaya pemasaran, tetapi juga berkaitan erat dengan tekanan pasar, regulasi, dan tuntutan konsumen. Praktik ini muncul karena adanya kebutuhan untuk memanipulasi persepsi publik tentang keberlanjutan perusahaan, sementara di sisi lain, perusahaan berusaha mempertahankan atau bahkan meningkatkan margin keuntungan mereka tanpa melakukan perubahan struktural yang diperlukan untuk menanggulangi dampak lingkungan. Untuk memahami lebih jauh mengenai fenomena ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam alasan dan motivasi perusahaan dalam menerapkan green-washing, serta pengaruh tekanan pasar, regulasi, dan tuntutan konsumen.

Perusahaan di sektor industri ekstraktif sering kali menghadapi tekanan yang intens dari berbagai pemangku kepentingan, baik internal (misalnya, karyawan dan manajemen) maupun eksternal (pemerintah, masyarakat, LSM, dan konsumen). Dalam banyak kasus, pemangku kepentingan ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar terkait dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

- Tekanan dari Masyarakat dan LSM: LSM dan kelompok masyarakat yang peduli lingkungan semakin vokal dalam menuntut perusahaan untuk lebih bertanggung jawab terhadap kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ekstraktif. Misalnya, di Jawa Timur, perusahaan pertambangan batu bara sering terlibat dalam perdebatan dengan kelompok masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari polusi udara dan kerusakan ekosistem. Agar terhindar dari protes dan kritik yang dapat merusak reputasi, banyak perusahaan menggunakan green-washing sebagai alat untuk meredakan ketegangan dengan menunjukkan bahwa mereka juga berusaha menjaga lingkungan melalui inisiatif hijau seperti penanaman pohon atau program pengelolaan limbah.
- Tekanan dari Pemegang Saham dan Investor: Pemegang saham dan investor yang semakin menuntut perusahaan untuk memperhatikan faktor ESG (Environmental, Social, Governance) juga menjadi pendorong utama bagi praktik green-washing. Menurut penelitian oleh *Grewal et al*. (2021) dalam *Journal of Business Ethics*, investor kini lebih memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan, meskipun dalam banyak kasus, perusahaan hanya melakukan upaya simbolis untuk menunjukkan bahwa mereka memperhatikan aspek lingkungan.

Permintaan konsumen akan produk dan layanan yang ramah lingkungan semakin meningkat. Dalam penelitian yang dilakukan

oleh *Nielsen* (2015), ditemukan bahwa sekitar 66% konsumen di seluruh dunia bersedia membayar lebih untuk produk yang berasal dari perusahaan dengan rekam jejak yang baik dalam keberlanjutan lingkungan. Dalam sektor industri ekstraktif, yang dikenal memiliki dampak lingkungan yang besar, perusahaan merasa perlu untuk memenuhi tuntutan pasar ini.

- Perubahan Perilaku Konsumen: Konsumen yang semakin sadar akan dampak lingkungan dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan mulai memprioritaskan untuk membeli produk dari perusahaan yang dianggap lebih ramah lingkungan. Di sektor pertambangan, terutama di Jawa Timur, banyak konsumen yang semakin cemas tentang isu-isu terkait perubahan iklim dan deforestasi. Perusahaan yang beroperasi di sektor ini, meskipun melakukan kerusakan ekosistem yang luas, dapat berusaha untuk mengalihkan perhatian dari praktik ekstraktif mereka dengan menggembar-gemborkan inisiatif keberlanjutan yang tidak substansial. Ini adalah bentuk green-washing yang bertujuan untuk menjaga citra positif perusahaan tanpa melakukan perubahan mendalam pada operasional mereka.
- Pemasaran Berbasis Lingkungan: Green-washing sering digunakan sebagai strategi pemasaran untuk menarik pelanggan yang semakin mencari produk yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, perusahaan minyak di Jawa Barat yang terlibat dalam eksplorasi migas di daerah yang kaya akan biodiversitas sering kali mengklaim bahwa mereka

berinvestasi dalam teknologi yang lebih bersih atau mendukung proyek energi terbarukan, meskipun kontribusi nyata terhadap keberlanjutan sangat terbatas.

Sektor industri ekstraktif sangat bergantung pada operasi besar-besaran yang sering kali mengorbankan keberlanjutan untuk keuntungan jangka pendek. Menerapkan teknologi ramah lingkungan yang sesungguhnya membutuhkan investasi yang sangat besar dan komitmen jangka panjang. Dalam banyak kasus, perusahaan lebih memilih untuk melakukan green-washing daripada melakukan investasi yang mahal untuk memodernisasi teknologi atau mengubah cara mereka beroperasi.

- Hemat Biaya dengan Klaim Ramah Lingkungan: Dalam banyak kasus, perusahaan lebih memilih untuk menggembar-gemborkan inisiatif lingkungan yang tidak mahal, seperti penanaman pohon atau pengelolaan sampah, daripada melakukan perubahan substansial yang memerlukan biaya tinggi. Sebagai contoh, banyak perusahaan tambang di Jawa Timur yang mengklaim telah mengurangi emisi karbon atau meningkatkan pengelolaan limbah, namun mereka sering kali hanya melakukan perubahan kecil yang tidak mengurangi dampak operasional secara signifikan.
- Minimalkan Risiko dengan Mematuhi Standar Minima: Perusahaan sering kali merasa cukup untuk memenuhi standar lingkungan minimum yang ditetapkan oleh regulasi, tanpa melakukan perubahan yang lebih mendalam. Mereka tahu bahwa dengan melakukan green-washing, mereka dapat

mengurangi risiko litigasi atau protes dari masyarakat, sambil tetap menjalankan operasional mereka dengan cara yang lebih menguntungkan secara finansial.

Sektor ekstraktif sering beroperasi di bawah tekanan regulasi yang ketat, baik dari pemerintah pusat maupun internasional. Salah satu cara untuk menghadapi ketidakpastian ini adalah dengan berpura-pura menjadi perusahaan yang lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya, agar dapat menghindari pengawasan atau peraturan yang lebih ketat.

- Menghindari Pengawasan Ketat: Banyak perusahaan yang beroperasi di sektor ekstraktif menggunakan green-washing untuk menghindari tekanan dari pemerintah atau lembaga internasional yang menuntut pengurangan emisi atau pengelolaan limbah yang lebih baik. Dengan memasarkan diri sebagai perusahaan yang peduli lingkungan, mereka dapat mengurangi perhatian terhadap dampak buruk dari operasi mereka, meskipun kenyataannya perusahaan tersebut tetap menjalankan praktik yang merusak alam.

Dalam konteks pasar global yang semakin mengutamakan keberlanjutan, perusahaan dalam sektor industri ekstraktif merasa tertekan untuk memperbaiki citra mereka tanpa harus melakukan perubahan struktural yang besar. Perusahaan-perusahaan besar sering kali menggunakan green-washing untuk memanfaatkan tren keberlanjutan dan meraih keuntungan dari konsumen yang peduli lingkungan. Green-washing memberikan solusi cepat bagi

perusahaan untuk mengatasi tekanan pasar yang semakin besar tanpa harus menanggung biaya perubahan operasional yang besar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Bertels & Papania* (2021) dalam *Journal of Environmental Management*, ditemukan bahwa perusahaan yang bergantung pada green-washing seringkali memiliki sedikit atau bahkan tidak ada niat untuk melakukan perubahan substansial pada praktik bisnis mereka. Mereka hanya memanfaatkan citra "ramah lingkungan" untuk memenuhi harapan pasar yang semakin menuntut.

Regulasi lingkungan yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk mematuhi persyaratan tanpa harus melakukan perubahan besar. Di Indonesia, sektor ekstraktif sering kali menghadapi regulasi yang mengharuskan mereka untuk mengurangi dampak lingkungan atau melakukan restorasi pasca-penambangan. Banyak perusahaan merespons dengan mengklaim bahwa mereka sudah memenuhi standar lingkungan, meskipun pada kenyataannya mereka hanya mematuhi ketentuan dasar tanpa memperbaiki proses yang lebih mendalam.

Menurut *Zhang et al.* (2020) dalam *Energy Sustainability and Society*, regulasi yang ketat dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk menggunakan green-washing, dengan cara memenuhi peraturan minimal tanpa harus berinvestasi dalam perubahan signifikan yang akan mengurangi dampak lingkungan mereka secara keseluruhan.

Tuntutan konsumen terhadap keberlanjutan semakin kuat, terutama di kalangan konsumen muda yang semakin sadar akan isu-isu lingkungan. Konsumen lebih memilih untuk membeli produk dari perusahaan yang memiliki kebijakan ramah lingkungan, tetapi mereka tidak selalu memiliki akses untuk mengetahui apakah klaim tersebut benar-benar merefleksikan tindakan nyata atau hanya sekadar pemasaran.

- Kepedulian Konsumen Terhadap Isu Lingkungan: Konsumen yang lebih sadar akan keberlanjutan dapat menjadi pemicu perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap lingkungan. Namun, ketika perusahaan merasa bahwa melakukan perubahan yang lebih besar terlalu mahal, mereka sering kali memilih untuk melakukan green-washing sebagai jalan pintas untuk memenuhi harapan konsumen tanpa perubahan yang berarti.
- Pemasaran yang Memanfaatkan Kepedulian Konsumen: Berdasarkan penelitian oleh *Lyon & Montgomery* (2020) dalam *Business & Society Review*, perusahaan dapat dengan mudah memanfaatkan tren konsumen yang peduli lingkungan untuk meningkatkan citra mereka melalui klaim-klaim ramah lingkungan yang tidak terverifikasi.

Green-washing dalam sektor industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat didorong oleh berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari tekanan pasar, regulasi yang ketat, hingga tuntutan konsumen yang semakin tinggi. Meskipun green-washing dapat memberikan solusi cepat untuk mengatasi tekanan-tekanan ini,

dalam jangka panjang, praktik ini dapat merugikan reputasi perusahaan dan memperburuk dampak lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat, transparansi yang lebih tinggi, dan kesadaran yang lebih besar di kalangan konsumen untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar berkomitmen pada keberlanjutan, bukan sekadar mengandalkan pemasaran untuk menciptakan citra yang ramah lingkungan.

4.3 Dampak Green-Washing terhadap Kepercayaan Publik

Green-washing, meskipun sering dianggap sebagai cara cepat untuk meningkatkan citra perusahaan dengan mengklaim kepedulian terhadap lingkungan, pada kenyataannya dapat memiliki dampak negatif yang serius terhadap kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap perusahaan, bahkan sektor industri secara keseluruhan. Fenomena ini, yang menciptakan kesan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan tanpa tindakan nyata yang mendukung klaim tersebut, dapat mengikis hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumennya serta menurunkan reputasi industri di mata publik. Berikut adalah beberapa cara green-washing merusak kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap perusahaan dan sektor industri:

Salah satu dampak langsung dari green-washing adalah kebingungan yang ditimbulkan di kalangan konsumen. Ketika perusahaan mengklaim memiliki praktik ramah lingkungan tanpa bukti yang jelas atau substansial, konsumen menjadi kesulitan dalam membedakan antara perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada keberlanjutan dan yang hanya berusaha memanfaatkan citra

hijau untuk keuntungan pemasaran. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang informasional.

- Perasaan Diperdaya: Konsumen yang merasa tertipu oleh klaim keberlanjutan yang tidak nyata sering kali merasa dipermainkan. Studi oleh *TerraChoice* (2010) yang dikenal dengan "The Seven Sins of Green-Washing" mengungkapkan bahwa banyak konsumen merasa tidak puas ketika mereka menemukan bahwa klaim ramah lingkungan yang mereka percayai ternyata hanya sebuah taktik pemasaran. Hal ini dapat menyebabkan konsumen kehilangan kepercayaan terhadap label-label hijau dan klaim keberlanjutan secara umum.
- Pengaruh Terhadap Keputusan Pembelian: Ketika konsumen merasa tidak dapat mempercayai klaim keberlanjutan perusahaan, mereka cenderung akan menghindari produk dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan-perusahaan terus-menerus terlibat dalam green-washing, mereka dapat menyebabkan konsumen menjadi lebih skeptis terhadap seluruh industri dan meragukan niat baik sektor tersebut.

Green-washing yang terbongkar dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang sulit diperbaiki, baik untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk sektor industri secara keseluruhan. Seiring dengan meningkatnya transparansi dan kesadaran publik, semakin banyak konsumen yang mampu memeriksa klaim keberlanjutan perusahaan dan menuntut bukti konkret. Ketika klaim-klaim tersebut

terbukti tidak benar, dampaknya terhadap reputasi perusahaan sangat merugikan.

- Pengungkapan Klaim Palsu: Banyak perusahaan yang terlibat dalam green-washing akhirnya terpapar oleh media atau lembaga pengawas lingkungan. Ini dapat memicu kampanye media yang mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan nyata untuk mendukung klaim keberlanjutannya. Sebagai contoh, perusahaan yang mengklaim menggunakan bahan baku ramah lingkungan tetapi sebenarnya masih bergantung pada praktik ekstraktif yang merusak alam, dapat dengan cepat menjadi sasaran kritik publik.
- Dampak Krisis Reputasi: Setelah praktik green-washing terbongkar, perusahaan tidak hanya menghadapi protes dari konsumen, tetapi juga kerugian finansial karena turunnya penjualan, serta kehilangan kepercayaan investor. Menurut *Sweeney & Coughlan* (2008) dalam penelitian mereka yang dipublikasikan di *Journal of Consumer Marketing*, krisis reputasi dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan dalam jangka panjang, mengingat konsumen cenderung menghindari merek yang terlibat dalam kebohongan atau manipulasi.

Praktik green-washing tidak hanya berdampak pada perusahaan individual, tetapi juga dapat merusak kepercayaan terhadap seluruh sektor industri. Ketika perusahaan-perusahaan di sektor ekstraktif (pertambangan, minyak, gas) atau sektor-sektor lain

yang memiliki dampak lingkungan besar terlibat dalam green-washing, hal ini dapat menyebabkan konsumen dan masyarakat meragukan niat baik seluruh industri dalam menangani isu-isu lingkungan.

- Generalization Effect: Ketika satu perusahaan terbukti melakukan green-washing, konsumen mungkin mulai berpikir bahwa seluruh industri memiliki kecenderungan yang sama. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan tambang batu bara mengklaim mengurangi dampak lingkungannya melalui program hijau yang terbukti tidak efektif, konsumen dapat memandang industri pertambangan secara keseluruhan sebagai tidak dapat dipercaya dalam hal keberlanjutan. Efek ini memperburuk citra sektor industri secara keseluruhan dan mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap produk atau layanan serupa dari perusahaan lain dalam industri yang sama.
- Hilangnya Kepercayaan terhadap Label Keberlanjutan: Dengan meningkatnya klaim hijau palsu, masyarakat menjadi skeptis terhadap berbagai label keberlanjutan atau sertifikasi yang digunakan oleh perusahaan. Label seperti "ramah lingkungan" atau "berkelanjutan" yang sebelumnya dianggap sebagai indikator yang sah, kini sering dianggap hanya sebagai alat pemasaran. Penelitian yang dilakukan oleh *Delmas & Burbano* (2011) dalam *California Management Review* menunjukkan bahwa green-washing dapat

menurunkan efektivitas label-label lingkungan, karena konsumen mulai meragukan keotentikan klaim tersebut.

Green-washing juga dapat menghambat kemajuan yang lebih substansial dalam sektor industri menuju keberlanjutan yang sesungguhnya. Ketika perusahaan lebih fokus pada pencitraan diri daripada melakukan perubahan yang berarti, ini mengurangi insentif bagi sektor untuk melakukan inovasi yang benar-benar ramah lingkungan.

- Mengalihkan Fokus dari Inovasi Sejati: Alih-alih berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan atau beralih ke model bisnis yang lebih berkelanjutan, perusahaan yang terlibat dalam green-washing lebih cenderung untuk mengalihkan sumber daya mereka ke kampanye pemasaran atau program CSR yang tidak efektif. Dalam jangka panjang, hal ini menghalangi sektor industri untuk benar-benar bertransformasi ke arah yang lebih hijau, meskipun ada potensi besar untuk menciptakan perubahan positif.
- Penghambatan Regulasi yang Lebih Ketat: Dalam beberapa kasus, perusahaan yang terlibat dalam green-washing menggunakan klaim hijau palsu untuk menghindari regulasi yang lebih ketat. Ini menciptakan kesan bahwa perusahaan sudah cukup mematuhi peraturan lingkungan, meskipun sebenarnya mereka tidak melakukan perubahan substantif. Dalam konteks ini, green-washing justru memperlambat penerapan regulasi yang lebih ketat dan perbaikan lingkungan yang dibutuhkan oleh industri.

Sebagian besar konsumen yang tertarik pada produk atau layanan ramah lingkungan memiliki niat baik dan berkeinginan untuk mendukung perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan. Namun, green-washing mengkhianati niat baik ini, dengan mengeksploitasi kepedulian mereka terhadap lingkungan untuk keuntungan perusahaan.

- Eksploitasi Nilai Konsumen: Green-washing memanfaatkan nilai-nilai keberlanjutan yang dimiliki konsumen dengan cara yang tidak etis. Dalam banyak kasus, perusahaan menyadari bahwa konsumen semakin peduli dengan keberlanjutan dan berusaha memanfaatkan ketertarikan ini untuk mendapatkan keuntungan finansial. Namun, ketika klaim tersebut terbukti palsu, konsumen merasa bahwa mereka telah dimanipulasi, yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan mereka terhadap perusahaan-perusahaan yang mengklaim keberlanjutan.

Green-washing dapat merusak kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap perusahaan dan sektor industri dengan menciptakan kebingungan, merusak reputasi perusahaan, dan mengurangi kepercayaan terhadap klaim keberlanjutan secara keseluruhan. Ketika perusahaan melakukan green-washing, mereka tidak hanya menipu konsumen, tetapi juga memperlambat kemajuan sektor menuju keberlanjutan sejati. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengambil langkah nyata dalam keberlanjutan dan menghindari praktik green-washing, karena kepercayaan adalah aset berharga yang, sekali hilang, sulit untuk dipulihkan. Ke depan,

konsumen dan masyarakat harus lebih kritis terhadap klaim keberlanjutan dan memastikan bahwa tindakan nyata mendukung klaim tersebut.

Bab 5

Mengukur Transparansi di Industri Ekstraktif: Antara Keterbukaan dan Kepentingan

5.1 Tolok Ukur Keterbukaan di Industri Ekstraktif

Transparansi dalam konteks sektor industri ekstraktif merujuk pada sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi yang relevan, dapat diakses, dan diverifikasi oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya, terkait dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh sektor ini, baik dari sisi lingkungan (kerusakan ekosistem, polusi, hilangnya biodiversitas) maupun sosial (konflik dengan masyarakat lokal, pelanggaran hak asasi manusia), transparansi menjadi komponen kunci dalam memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas.

Penelitian dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa transparansi yang kuat tidak hanya mendukung akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan reputasi perusahaan, menarik investasi yang lebih bertanggung jawab, dan mengurangi risiko konflik sosial yang bisa muncul akibat eksploitasi sumber daya alam (Lange et al., 2018). Oleh karena itu, mengembangkan indikator transparansi yang komprehensif menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana perusahaan-perusahaan dalam sektor ekstraktif bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Secara umum, transparansi dalam sektor industri ekstraktif dapat dipahami sebagai praktik membuka akses informasi terkait kegiatan eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, transparansi tidak hanya mencakup pengungkapan data keuangan, tetapi juga informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik operasional, manajemen dampak lingkungan, serta interaksi perusahaan dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal.

Berdasarkan literatur yang ada, transparansi dalam industri ekstraktif sering kali dilihat sebagai mekanisme untuk mengurangi ketidakadilan dan ketidakpastian yang timbul akibat aktivitas ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan transparansi dalam sektor ini memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat dan pemerintah; kedua, untuk memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan (OECD, 2015).

Beberapa indikator transparansi yang digunakan dalam menganalisis sektor industri ekstraktif dapat dikelompokkan dalam lima kategori utama: transparansi keuangan, operasional, lingkungan, sosial, dan pengelolaan sumber daya alam. Setiap kategori ini memiliki peranannya masing-masing dalam memastikan akuntabilitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

Indikator pertama yang paling sering digunakan adalah transparansi dalam hal keuangan dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif kepada pemerintah. Dalam banyak kasus, informasi tentang royalti, pajak, dan kontribusi lainnya yang diberikan perusahaan kepada pemerintah lokal dan nasional sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi keadilan dan ketelusan dalam pengelolaan sumber daya alam. Praktik transparansi yang baik mencakup pengungkapan yang jelas mengenai total pembayaran yang dilakukan kepada negara dan bagaimana dana tersebut digunakan (Lange et al., 2018).

- EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) adalah standar internasional yang mendorong pengungkapan informasi mengenai pembayaran kepada pemerintah. Melalui sistem ini, perusahaan diminta untuk melaporkan kontribusi mereka secara terbuka dan independen untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan sumber daya alam (Buchanan, 2017).
- Laporan Keuangan yang Diperiksa oleh Pihak Ketiga: Indikator transparansi yang lainnya adalah sejauh mana perusahaan menyajikan laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor independen dan dapat diakses oleh publik.

Transparansi operasional berkaitan dengan sejauh mana perusahaan mengungkapkan rincian mengenai lokasi dan skala operasional, serta kebijakan yang diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Pengungkapan yang jelas tentang keberlanjutan sumber daya alam

yang dieksploitasi dan dampak yang ditimbulkan oleh operasional merupakan salah satu aspek penting dalam transparansi.

- Informasi Mengenai Lokasi dan Ukuran Proyek: Perusahaan yang transparan akan memberikan informasi yang terperinci mengenai lokasi dan ukuran operasi mereka, termasuk detail mengenai wilayah yang terdampak dan rencana pengelolaan jangka panjang (Gunningham, 2018).
- Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sejauh mana perusahaan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, baik itu melalui praktik ramah lingkungan atau penggunaan teknologi baru yang efisien, menjadi indikator penting. Ini termasuk penggunaan metode penambangan yang meminimalkan kerusakan alam atau pengelolaan limbah yang ramah lingkungan (Bebbington et al., 2014).

Transparansi dalam aspek lingkungan sangat penting untuk mengidentifikasi dan memitigasi dampak negatif dari kegiatan ekstraksi terhadap ekosistem. Ini termasuk pengungkapan yang jelas mengenai kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan, pemantauan dampak, serta langkah-langkah mitigasi yang diambil untuk mengurangi kerusakan.

- Pelaporan Dampak Lingkungan: Perusahaan yang transparan biasanya melaporkan dampak lingkungan dari operasi mereka, seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan air, dan pengelolaan limbah. Pengungkapan ini juga mencakup

langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak negatif (OECD, 2018).

- Audit Lingkungan Independen: Salah satu indikator transparansi dalam sektor ini adalah sejauh mana perusahaan melibatkan auditor independen untuk menilai kinerja lingkungan mereka dan mempublikasikan hasilnya kepada publik.

Transparansi sosial dalam industri ekstraktif terkait dengan pengelolaan hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal dan dampak sosial dari kegiatan ekstraksi. Pengungkapan mengenai bagaimana perusahaan mengelola hak asasi manusia, konflik sosial, dan keterlibatan komunitas sangat penting untuk memastikan bahwa operasi perusahaan tidak merugikan masyarakat sekitar.

- Pelibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Perusahaan yang transparan akan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka, termasuk konsultasi publik yang terbuka dan jujur (Murray, 2020).

- Pengelolaan Konflik Sosial: Salah satu indikator transparansi sosial adalah pengungkapan tentang cara perusahaan mengelola konflik sosial yang mungkin timbul akibat kegiatan ekstraksi, termasuk langkah-langkah penyelesaian yang diambil untuk mengatasi ketegangan dengan komunitas lokal (Bebbington & Bury, 2013).

Transparansi dalam pengelolaan regulasi dan hukum berfokus pada pengungkapan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang nasional dan internasional yang mengatur eksploitasi sumber daya alam, serta standar yang diterapkan dalam operasional mereka.

- Kepatuhan terhadap Standar Internasional: Sejauh mana perusahaan mengikuti standar internasional dalam hal keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, seperti standar yang ditetapkan oleh *ISO 14001* atau *Global Reporting Initiative (GRI)*, merupakan indikator transparansi yang penting (Sullivan & Gouldson, 2016).
- Pengawasan oleh Regulator Independen: Transparansi juga mencakup sejauh mana kegiatan perusahaan diawasi oleh lembaga-lembaga pengawas independen, yang memberikan laporan yang dapat diakses oleh publik mengenai kepatuhan terhadap regulasi.

Penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang tinggi dalam sektor ekstraktif memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Praktik transparansi yang baik dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi masyarakat dan pemerintah, mendorong investasi yang bertanggung jawab, serta mengurangi potensi konflik sosial. Selain itu, transparansi juga berperan dalam menarik investor yang mengutamakan keberlanjutan dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya saing perusahaan di pasar global (Lange et al., 2018).

Namun, meskipun transparansi dapat memberikan manfaat jangka panjang, perusahaan yang kurang terbuka dengan informasi dapat merusak kepercayaan konsumen dan masyarakat, serta menghadapi risiko reputasi yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi sebagai bagian dari strategi keberlanjutan mereka.

Indikator transparansi dalam sektor industri ekstraktif sangat beragam dan mencakup berbagai dimensi, mulai dari pengungkapan informasi keuangan hingga dampak sosial dan lingkungan. Untuk memastikan keberlanjutan dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan, transparansi yang komprehensif sangat penting. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan, perusahaan dalam sektor ekstraktif yang dapat mempraktikkan transparansi dengan serius akan memperoleh manfaat jangka panjang, baik dalam hal reputasi maupun daya saing di pasar global.

5.2 Tingkat Transparansi dalam Praktik Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat

Sektor industri ekstraktif di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pertambangan, minyak, dan gas, sering kali menghadapi tantangan besar terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Kedua provinsi, Jawa Timur dan Jawa Barat, merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan menjadi lokasi penting bagi kegiatan industri ekstraktif. Namun, tingkat transparansi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kedua provinsi ini

bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti regulasi pemerintah, kebijakan internal perusahaan, serta tekanan dari masyarakat dan lembaga internasional.

Jawa Timur dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama batu bara dan gas alam. Beberapa perusahaan besar yang beroperasi di sektor ini antara lain PT. Bukit Asam, PT. Indominco Mandiri, dan PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB). Meskipun perusahaan-perusahaan ini mengklaim telah menjalankan praktik keberlanjutan dan transparansi, ada sejumlah tantangan yang dihadapi terkait dengan pelaporan dan pengelolaan dampak sosial dan lingkungan. Indikator Transparansi di Jawa Timur Pelaporan Pembayaran kepada Pemerintah dan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative).

Di Jawa Timur, beberapa perusahaan besar yang terlibat dalam industri ekstraktif telah mulai menerapkan sistem pelaporan pembayaran kepada pemerintah yang lebih terbuka. PT. Bukit Asam, misalnya, melaporkan pembayaran royalti dan pajak yang disetorkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Perusahaan ini juga telah bergabung dengan inisiatif EITI, yang memungkinkan transparansi dalam aliran pendapatan dan pembayaran yang diterima oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, tingkat keterbukaan yang ada seringkali terbatas pada data tahunan yang belum mencakup detail yang lebih mendalam mengenai aliran dana di tingkat lokal.

1. Pelaporan Dampak Lingkungan

Dalam hal transparansi lingkungan, beberapa perusahaan tambang di Jawa Timur telah mengimplementasikan sistem pelaporan dampak lingkungan yang lebih terbuka. PT. Indominco Mandiri dan PT. PJB telah mulai mempublikasikan laporan keberlanjutan yang mencakup dampak operasional terhadap lingkungan dan langkah-langkah mitigasi yang diambil. Laporan tersebut mencakup isu-isu seperti pengelolaan limbah, pengurangan emisi, serta rehabilitasi lahan pasca-pertambangan. Namun, pengawasan independen terhadap laporan-laporan ini seringkali minim, sehingga beberapa pihak menganggap transparansi mereka belum sepenuhnya dapat dipercaya.

2. Keterlibatan Masyarakat dan Pengelolaan Konflik Sosial

Sektor pertambangan di Jawa Timur juga menghadapi masalah terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa perusahaan, seperti PT. Indominco Mandiri, telah melakukan konsultasi dengan masyarakat setempat terkait dampak sosial dari operasi mereka. Namun, sering kali proses ini lebih bersifat formalitas, dan banyak komunitas lokal yang merasa bahwa mereka tidak diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang informasional. Terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap konflik, seperti di kawasan Luwuk dan Sampang, pengelolaan hubungan dengan masyarakat lokal masih perlu diperbaiki.

3. Pengawasan dan Akuntabilitas

Meskipun ada upaya untuk transparansi, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan sering kali lemah. Banyak dari laporan yang disediakan oleh perusahaan tidak cukup mendalam, dan tidak ada cukup lembaga independen yang memantau kepatuhan terhadap regulasi. Beberapa perusahaan seperti PT. Bukit Asam yang terlibat dalam proyek gas alam dan batu bara di Jawa Timur masih dihadapkan pada tantangan terkait audit eksternal yang dapat mengonfirmasi klaim-klaim mereka tentang keberlanjutan dan transparansi.

Jawa Barat memiliki sejumlah tambang kecil serta industri migas yang beroperasi, termasuk Pertamina dan beberapa perusahaan tambang batu bara. Meskipun sektor industri ekstraktif di Jawa Barat tidak sebesar di Jawa Timur, perusahaan-perusahaan yang ada tetap menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi, terutama dalam pelaporan pembayaran kepada pemerintah dan pengelolaan dampak sosial. Indikator Transparansi di Jawa Barat:

1. Pelaporan Pembayaran kepada Pemerintah

Seperti di Jawa Timur, beberapa perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat, termasuk Pertamina (sebagai perusahaan milik negara), sudah mulai mengikuti inisiatif transparansi dengan melaporkan pembayaran yang mereka lakukan kepada pemerintah. Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia sudah mulai mengadopsi prinsip-prinsip EITI dan secara reguler mempublikasikan laporan pendapatan dan pajak yang mereka bayarkan ke pemerintah. Namun, masih ada kekurangan dalam hal

pengungkapan informasi yang lebih granular mengenai bagaimana dana tersebut digunakan di tingkat daerah.

2. Pelaporan Dampak Lingkungan dan Sosial

Di Jawa Barat, perusahaan yang terlibat dalam eksplorasi migas dan pertambangan mulai memberikan laporan keberlanjutan, namun pengungkapannya sering kali masih terbatas. Pertamina, misalnya, mengungkapkan sejumlah informasi terkait upaya mereka untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca, namun pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari eksploitasi minyak di daerah seperti Cirebon dan Subang masih sangat minim. Laporan mereka lebih fokus pada dampak ekonomi dan kurang memberikan perhatian pada dampak sosial yang ditimbulkan dari kegiatan operasional.

3. Keterlibatan Masyarakat dan Konflik Sosial

Di sektor migas dan pertambangan di Jawa Barat, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan sangat terbatas. Pengelolaan konflik sosial di beberapa daerah seperti Cirebon dan Majalengka, yang merupakan pusat aktivitas pertambangan dan energi, sering kali kurang optimal. Beberapa komunitas setempat merasa diabaikan dan tidak diberikan akses penuh untuk memberikan masukan terhadap kebijakan perusahaan, yang dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan di masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dampak sosial dan lingkungan lebih banyak bersifat sebagai formalitas daripada dialog yang berkelanjutan.

4. Pengawasan dan Kepatuhan Regulasi

Pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di sektor ekstraktif di Jawa Barat juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Laporan yang disediakan oleh perusahaan seringkali tidak diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Meski ada regulasi mengenai pengelolaan lingkungan, seperti *Undang-Undang Lingkungan Hidup* dan *Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan*, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap regulasi ini sering kali tidak efektif. Beberapa perusahaan besar seperti Pertamina telah melakukan upaya untuk memperbaiki manajemen lingkungan mereka, tetapi masih ada kesenjangan yang signifikan dalam implementasi di lapangan, yang menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan lingkungan secara keseluruhan.

Tingkat transparansi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan.

- Kesamaan: Di kedua provinsi, perusahaan-perusahaan besar mulai mengikuti prinsip-prinsip transparansi yang ditetapkan oleh EITI dan secara rutin menerbitkan laporan yang mengungkapkan pembayaran kepada pemerintah. Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi, keduanya masih menghadapi tantangan dalam mengungkapkan data yang lebih granular terkait aliran dana di tingkat lokal dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh operasi mereka.

- Perbedaan: Jawa Timur cenderung lebih terbuka dalam hal pelaporan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan batu bara. Di sisi lain, transparansi sosial di Jawa Barat, khususnya dalam hal keterlibatan masyarakat lokal dan pengelolaan konflik sosial, masih sangat terbatas. Perusahaan di Jawa Barat, terutama Pertamina, cenderung fokus pada aspek ekonomi dan keuangan dari operasi mereka, sementara perusahaan di Jawa Timur lebih terbuka dalam pelaporan dampak lingkungan meskipun masih banyak kekurangan dalam hal pengawasan independen.

Meskipun ada beberapa perusahaan di Jawa Timur dan Jawa Barat yang telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam sektor industri ekstraktif, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi, terutama terkait dengan pengelolaan dampak sosial, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan independen. Penguatan regulasi yang mendukung transparansi dan penerapan audit yang lebih ketat, serta peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, sangat diperlukan untuk memperbaiki transparansi di sektor ini. Pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan keberlanjutan dan dampak sosial dari perusahaan akan sangat penting untuk memastikan bahwa praktik ekstraktif di kedua provinsi ini lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

5.3 Hambatan dalam Meningkatkan Transparansi

Meskipun transparansi dalam sektor industri ekstraktif di Indonesia, termasuk di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, telah menjadi fokus yang semakin penting, baik bagi perusahaan maupun pemerintah, ada banyak kendala yang menghambat implementasi transparansi secara efektif. Kendala ini berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang melibatkan aspek teknis, struktural, ekonomi, serta sosial-politik. Berikut adalah analisis lebih mendalam mengenai kendala-kendala utama yang dihadapi dalam meningkatkan transparansi di sektor ini.

Perusahaan-perusahaan besar dalam sektor ekstraktif, seperti PT. Bukit Asam (pertambangan batu bara) atau Pertamina (migas), seringkali dihadapkan pada tuntutan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan strategi bisnis mereka. Transparansi yang berlebihan dalam hal data finansial, pembayaran kepada pemerintah, atau rencana bisnis dapat mengungkapkan informasi yang dianggap sensitif atau merugikan posisi kompetitif mereka. Bebbington & Bury (2013) mencatat bahwa meskipun ada tekanan untuk lebih transparan, banyak perusahaan yang ragu untuk melaporkan semua data yang dapat memberikan keuntungan kepada pesaing.

Menerapkan sistem transparansi yang lebih baik sering kali membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur teknologi, pelatihan staf, serta audit eksternal untuk memastikan akurasi dan keandalan informasi yang disediakan. Sebagai contoh, PT. Bukit Asam dan perusahaan pertambangan lainnya sering kali menghadapi tantangan dalam membangun sistem pelaporan yang

memadai, karena biaya tinggi yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis digital yang memadai dan dapat memenuhi standar global seperti EITI atau Global Reporting Initiative (GRI). Sullivan & Gouldson (2016) menyoroti bahwa biaya ini dapat menjadi beban, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan dengan infrastruktur yang terbatas.

Banyak perusahaan ekstraktif enggan untuk mengungkapkan data terkait dengan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka, terutama jika dampak tersebut menunjukkan pelanggaran atau kegagalan dalam pengelolaan lingkungan. Gunningham (2018) mengemukakan bahwa perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batu bara atau eksploitasi migas sering kali lebih memilih untuk mengurangi fokus pada aspek lingkungan dan sosial dalam laporan mereka, karena dapat memengaruhi reputasi mereka di mata publik dan investor. Hal ini terutama terjadi di wilayah-wilayah di mana dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lebih nyata dan besar.

Salah satu kendala besar yang dihadapi oleh banyak perusahaan di sektor ekstraktif adalah resistensi terhadap audit dan pengawasan eksternal. Bebbington et al. (2014) menyatakan bahwa perusahaan sering kali enggan untuk membuka diri terhadap pengawasan pihak ketiga yang independen karena khawatir akan menemukan ketidaksesuaian atau kegagalan dalam memenuhi standar lingkungan dan sosial. Hal ini berkontribusi pada kurangnya

akuntabilitas dan membuat data yang disediakan oleh perusahaan sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan transparansi di sektor ekstraktif adalah ketidakselarasan regulasi di tingkat pusat dan daerah. Peraturan yang ada sering kali tidak cukup jelas atau tidak cukup mengikat untuk mendorong perusahaan agar secara penuh membuka akses terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Lange et al. (2018) menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah regulasi yang mengatur mengenai pelaporan dampak sosial dan lingkungan, penerapannya di lapangan seringkali lemah karena ketidakjelasan dalam aturan yang ada dan perbedaan penegakan hukum di daerah.

Sebagian besar pendapatan daerah, terutama di provinsi-provinsi dengan sektor ekstraktif besar seperti Jawa Timur dan Jawa Barat, bergantung pada pajak dan royalti yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan tambang dan migas. Pemerintah daerah sering kali menghadapi dilema antara mendorong transparansi dan keberlanjutan sosial dengan kebutuhan ekonomi jangka pendek yang bergantung pada pendapatan dari sektor ekstraktif ini. Buchanan (2017) mencatat bahwa ketergantungan pada pendapatan dari sektor ekstraktif menyebabkan beberapa pemerintah lokal lebih cenderung untuk menoleransi pelanggaran lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh perusahaan besar, demi mempertahankan pendapatan yang vital bagi pembangunan daerah.

Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan ekstraktif di Indonesia masih terbatas, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Sullivan & Gouldson (2016) menyoroti bahwa sering kali, pemerintah tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang memadai untuk melakukan pemantauan yang efektif terhadap perusahaan, baik dari segi dampak lingkungan maupun pengelolaan pembayaran pajak dan royalti. Banyak daerah yang tidak memiliki staf yang terlatih atau fasilitas yang memadai untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada.

Ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali menjadi hambatan besar dalam hal transparansi. Pemerintah daerah sering kali memiliki kepentingan ekonomi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Bebbington & Bury (2013) menunjukkan bahwa di banyak daerah, pemerintah lokal lebih memilih untuk memberikan izin ekspansi kepada perusahaan-perusahaan ekstraktif demi mendapatkan pendapatan pajak yang lebih tinggi, meskipun hal ini dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah ini seringkali mengarah pada kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Di banyak daerah, terutama di provinsi-provinsi yang lebih terpencil, pemerintah tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengelola dan menyebarkan data secara terbuka dan transparan. Murray (2020) mencatat bahwa meskipun pemerintah pusat dan beberapa pemerintah daerah telah mulai menerapkan

platform transparansi digital, banyak daerah yang tidak memiliki sistem yang cukup baik untuk mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan data yang relevan secara terbuka. Kurangnya sistem yang terintegrasi ini menghambat usaha untuk memperkuat transparansi sektor ekstraktif secara menyeluruh.

Meskipun transparansi di sektor ekstraktif penting bagi masyarakat, sering kali masyarakat lokal tidak memiliki akses atau kesadaran yang cukup tentang hak mereka untuk meminta informasi. Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar area ekstraktif tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan. Gunningham (2018) mengamati bahwa keterbatasan pengetahuan masyarakat ini menghambat upaya transparansi, karena mereka tidak dapat secara efektif memanfaatkan informasi yang tersedia atau menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan dan pemerintah.

Lembaga masyarakat sipil yang berperan sebagai pengawas independen juga sering kali terbatas dalam kapasitasnya untuk memengaruhi kebijakan sektor ekstraktif. OECD (2015) mencatat bahwa meskipun banyak organisasi masyarakat sipil yang berusaha untuk meningkatkan transparansi, mereka sering kali dihadapkan pada hambatan dari pihak perusahaan dan pemerintah yang tidak ingin menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Ketidakmampuan untuk mengakses data yang relevan, serta adanya ketakutan akan pembalasan atau intimidasi, menjadi hambatan besar bagi masyarakat dan lembaga sipil untuk mengadvokasi perubahan yang mendukung transparansi.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan transparansi di sektor industri ekstraktif di Indonesia sangat kompleks dan saling terkait. Perusahaan sering kali dihadapkan pada konflik kepentingan antara transparansi dan strategi bisnis mereka, sedangkan pemerintah menghadapi tantangan struktural dan kapasitas yang terbatas untuk mengawasi industri ekstraktif secara efektif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil, serta penguatan sistem regulasi dan kapasitas pengawasan untuk menciptakan sektor yang lebih transparan, berkelanjutan, dan akuntabel.

Pemerintah harus meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum terkait kegiatan ekstraktif. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga independen untuk mengaudit secara berkala dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Sullivan & Gouldson (2016) menyarankan penguatan peran Badan Pengawas Keuangan dan Badan Lingkungan Hidup dalam mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar pelaporan yang transparan.

Koordinasi antara lembaga pemerintah yang mengelola sektor ekstraktif perlu ditingkatkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih kohesif. Ini dapat dilakukan dengan membentuk tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan dari berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam sektor ekstraktif, seperti Kementerian ESDM, BPK, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Penerapan teknologi digital, seperti blockchain untuk pelaporan pembayaran dan penggunaan platform berbasis data terbuka untuk mempublikasikan dampak sosial dan lingkungan, dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor ini. Murray (2020) mencatat bahwa teknologi memiliki potensi besar untuk memperbaiki pengumpulan, analisis, dan distribusi data yang berkaitan dengan kegiatan industri ekstraktif.

Pendidikan yang lebih baik mengenai hak-hak masyarakat terhadap informasi dan pengambilan keputusan dalam sektor ekstraktif sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat lokal dapat berperan serta dalam proses transparansi. Bebbington et al. (2014) mengusulkan penyelenggaraan program pelatihan bagi masyarakat dan lembaga sipil untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya transparansi dan keberlanjutan dalam sektor ekstraktif.

Meningkatkan transparansi dalam sektor industri ekstraktif di Indonesia memang menghadapi banyak kendala yang kompleks, baik dari sisi perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Namun, dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penerapan teknologi yang lebih baik, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Hal ini akan menciptakan ekosistem yang lebih transparan, berkelanjutan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bab 6

Menguak Fakta di Balik Greenwashing dan Transparansi

6.1 Hubungan Antara Green-Washing dan Transparansi

Green-washing atau "pencucian hijau" merujuk pada praktik di mana sebuah perusahaan atau organisasi menggambarkan dirinya lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya, dengan tujuan menarik konsumen yang peduli terhadap isu-isu lingkungan atau memenuhi tuntutan regulasi yang semakin ketat. Dalam sektor industri ekstraktif, yang melibatkan kegiatan pertambangan, minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya, green-washing sering digunakan untuk menciptakan citra positif tentang keberlanjutan perusahaan, meskipun kenyataannya perusahaan tersebut mungkin tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan atau bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari operasi mereka.

Dalam konteks ini, transparansi memainkan peran kunci dalam mengungkapkan klaim-klaim tersebut dan membedakan antara perusahaan yang benar-benar berkomitmen terhadap keberlanjutan dan mereka yang hanya berpura-pura. Untuk memahami hubungan antara green-washing dan transparansi, kita perlu membahas beberapa dimensi utama, termasuk pengungkapan informasi, keterbukaan terhadap audit eksternal, serta dampak sosial dan lingkungan dari praktik industri ekstraktif.

Green-washing berfungsi sebagai penghalang terhadap transparansi karena perusahaan yang terlibat dalam praktik ini

cenderung menyembunyikan atau memanipulasi informasi yang tidak menguntungkan bagi mereka. Klimp et al. (2015) menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan green-washing seringkali menyajikan informasi yang terdistorsi tentang keberlanjutan mereka, seperti mengklaim pengurangan emisi gas rumah kaca yang tidak terverifikasi atau menggembar-gemborkan program ramah lingkungan yang tidak berkelanjutan.

Perusahaan yang terlibat dalam green-washing seringkali menghindari pengungkapan informasi yang lebih rinci dan jujur tentang dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Mereka mungkin hanya mempublikasikan data yang menguntungkan bagi citra perusahaan, sementara mengabaikan aspek-aspek yang lebih penting, seperti tingkat polusi, kerusakan ekosistem, atau dampak negatif terhadap komunitas lokal. Ini jelas merugikan transparansi karena konsumen dan pemangku kepentingan lainnya tidak memiliki gambaran yang akurat tentang dampak nyata dari operasi perusahaan.

Salah satu cara utama green-washing menghambat transparansi adalah dengan menciptakan kebingungan atau ketidakjelasan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Laporan keberlanjutan, yang seharusnya menjadi alat penting untuk transparansi, sering kali disalahgunakan sebagai sarana untuk menonjolkan pencapaian perusahaan yang diragukan validitasnya. Bebbington et al. (2014) mencatat bahwa laporan keberlanjutan seringkali penuh dengan bahasa yang kabur dan statistik yang tidak

jelas, sehingga pembaca tidak dapat menilai secara objektif seberapa besar komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan.

Misalnya, perusahaan dalam sektor ekstraktif sering mengklaim "penurunan emisi" atau "pengelolaan limbah yang lebih baik" tanpa menjelaskan metodologi yang digunakan untuk mengukur pencapaian tersebut atau membuktikan dampaknya. Mereka mungkin juga mengabaikan pengungkapan informasi tentang masalah serius seperti pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, atau korupsi yang terjadi selama operasi mereka.

Pengawasan eksternal yang kuat adalah elemen penting dalam mengurangi praktik green-washing dan meningkatkan transparansi. Namun, perusahaan yang terlibat dalam green-washing cenderung menghindari pengawasan yang dapat mengungkapkan klaim-klaim mereka yang menyesatkan. Gunningham (2018) mengemukakan bahwa perusahaan yang mengandalkan green-washing sering kali menentang audit atau verifikasi oleh pihak ketiga karena mereka takut bahwa hasil audit tersebut akan menyoroti ketidaksesuaian antara klaim keberlanjutan mereka dan dampak nyata dari kegiatan mereka.

Di sisi lain, kurangnya pengawasan eksternal yang efektif memberikan ruang bagi perusahaan untuk memanipulasi citra mereka tanpa mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk memastikan transparansi yang sejati, penting bagi regulator dan lembaga independen untuk secara aktif memverifikasi klaim yang dibuat oleh

perusahaan, terutama di sektor ekstraktif yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

Salah satu akibat serius dari green-washing adalah kerusakan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan industri secara keseluruhan. Sullivan & Gouldson (2016) menyatakan bahwa ketika konsumen dan masyarakat mengetahui bahwa perusahaan menggunakan green-washing, mereka menjadi lebih skeptis terhadap klaim keberlanjutan di masa depan, bahkan jika perusahaan tersebut benar-benar berupaya untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Ketika perusahaan tidak transparan dalam mengungkapkan dampak mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, ini mengurangi kredibilitas dan mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen mereka terhadap keberlanjutan.

Sebagai contoh, banyak konsumen yang merasa kecewa setelah mengetahui bahwa perusahaan besar dalam sektor pertambangan atau migas yang mengklaim sebagai "ramah lingkungan" ternyata masih melakukan praktik-praktik yang merusak lingkungan dalam skala besar. Ketidakpercayaan ini dapat mengarah pada penurunan reputasi perusahaan dan bahkan berkontribusi pada penurunan pangsa pasar.

Mengatasi praktik green-washing dan meningkatkan transparansi dalam sektor ekstraktif memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan mendalam. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah green-washing dan meningkatkan transparansi antara lain:

Untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya menyajikan klaim yang menyesatkan, pemerintah dan organisasi internasional harus mendorong penerapan standar pelaporan keberlanjutan yang lebih ketat, seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). Standar ini mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dan terverifikasi mengenai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari operasi mereka.

Pemerintah dan lembaga independen harus memfasilitasi audit eksternal yang transparan terhadap laporan keberlanjutan perusahaan. Bebbington et al. (2014) menyarankan bahwa audit ini harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar independen untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan perusahaan adalah akurat dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan pemasaran.

Keterlibatan konsumen dan masyarakat dalam proses pengawasan adalah kunci untuk memastikan bahwa perusahaan tetap bertanggung jawab atas klaim keberlanjutan mereka. Buchanan (2017) menyarankan bahwa masyarakat harus diberi akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan ekstraktif. Selain itu, program pendidikan yang lebih baik dapat membantu konsumen dalam memahami laporan keberlanjutan dan mendeteksi praktik-praktik green-washing.

Green-washing dan transparansi dalam industri ekstraktif saling berhubungan erat. Green-washing menghambat transparansi dengan memanipulasi informasi untuk menciptakan citra yang ramah

lingkungan, sementara transparansi yang lebih baik dapat mengungkapkan praktik green-washing dan memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap klaim keberlanjutan mereka. Untuk mengatasi green-washing dan meningkatkan transparansi, penting untuk memperkuat regulasi, menerapkan standar pelaporan yang lebih ketat, dan memperkuat pengawasan eksternal. Hanya dengan langkah-langkah ini, industri ekstraktif dapat bergerak menuju keberlanjutan yang sejati dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap klaim keberlanjutan yang mereka buat.

Industri ekstraktif, yang mencakup sektor pertambangan, minyak, dan gas, memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat besar. Oleh karena itu, transparansi dalam sektor ini menjadi krusial, baik untuk memenuhi harapan masyarakat, regulasi pemerintah, maupun untuk menjaga keberlanjutan industri itu sendiri. Namun, banyak perusahaan di sektor ekstraktif yang terlibat dalam green-washing, yaitu sebuah praktik yang memanipulasi citra keberlanjutan mereka untuk menarik konsumen atau pemangku kepentingan dengan klaim lingkungan yang tidak didukung oleh tindakan nyata. Praktik ini sering kali berlawanan dengan prinsip transparansi yang sejati dan dapat menyebabkan kerusakan reputasi jangka panjang bagi perusahaan yang terlibat.

Dalam analisis ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana green-washing merusak transparansi dalam industri ekstraktif dan apa konsekuensinya, dengan merujuk pada jurnal dan literatur internasional yang relevan dari 10 tahun terakhir. Green-

washing pada dasarnya berusaha menutupi dampak lingkungan yang merugikan dengan menciptakan citra perusahaan yang ramah lingkungan. Sebagai contoh, banyak perusahaan dalam industri ekstraktif mengklaim menggunakan teknologi ramah lingkungan, padahal hanya sebagian kecil dari teknologi tersebut yang diterapkan atau tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan polusi atau emisi gas rumah kaca. Dalam Starkey & Welford (2016), dijelaskan bahwa meskipun ada kemajuan dalam laporan keberlanjutan dan standar lingkungan, banyak perusahaan yang memilih untuk hanya melaporkan hal-hal yang tidak terlalu kontroversial, seperti inisiatif hijau kecil, sementara mengabaikan masalah besar seperti deforestasi, kontaminasi air, atau kerusakan ekosistem.

Praktik green-washing merusak kepercayaan konsumen terhadap klaim keberlanjutan perusahaan. Dalam sektor ekstraktif, konsumen yang semakin sadar akan isu lingkungan bisa merasa tertipu oleh klaim palsu perusahaan. Gunningham et al. (2018) menunjukkan bahwa meskipun perusahaan menggunakan green-washing untuk menarik konsumen dengan citra ramah lingkungan, ketika konsumen menyadari bahwa klaim tersebut tidak benar atau tidak dapat diverifikasi, kepercayaan mereka terhadap perusahaan akan menurun secara signifikan. Dalam jangka panjang, ini dapat merugikan perusahaan, karena konsumen yang merasa dikhianati cenderung menghindari produk atau layanan dari perusahaan tersebut.

Selain itu, green-washing berkontribusi pada terjadinya "green fatigue" di kalangan konsumen. Seperti yang dijelaskan oleh Futerra (2017), konsumen yang merasa bingung dengan berbagai klaim hijau yang bertentangan atau tidak dapat dibuktikan, akan menjadi skeptis terhadap klaim keberlanjutan secara keseluruhan. Hal ini memperburuk dinamika transparansi, karena konsumen mulai menganggap klaim keberlanjutan sebagai taktik pemasaran belaka.

Transparansi dalam sektor ekstraktif sangat bergantung pada pengungkapan data yang akurat dan komprehensif mengenai dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan industri. Namun, perusahaan yang terlibat dalam green-washing cenderung mengurangi atau memanipulasi data ini untuk menghindari pengungkapan yang merugikan. Bebbington et al. (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan sering kali menyajikan laporan keberlanjutan yang hanya mencakup indikator-indikator positif sementara menghindari atau meminimalkan aspek negatif seperti emisi berbahaya, polusi, atau pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin timbul akibat operasi mereka.

Hal ini berimplikasi pada kurangnya transparansi karena informasi yang diberikan hanya sebagian kecil dari gambaran besar. Sebagai contoh, perusahaan dalam industri ekstraktif yang menggunakan green-washing mungkin akan memfokuskan laporan mereka pada penggunaan energi terbarukan dalam sebagian kecil operasi mereka, tanpa menyebutkan dampak besar dari kegiatan penambangan atau pengeboran yang mengarah pada degradasi lingkungan atau ketidakadilan sosial terhadap masyarakat lokal.

Dalam beberapa kasus, perusahaan melakukan green-washing karena ketidakjelasan dalam regulasi dan pengawasan. Carter et al. (2015) menunjukkan bahwa pemerintah yang tidak memiliki kebijakan yang jelas dan pengawasan yang ketat terhadap sektor ekstraktif memberikan ruang bagi praktik green-washing. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sektor ekstraktif sering kali menikmati pengecualian atau peraturan yang longgar, yang memungkinkan perusahaan untuk melaporkan klaim keberlanjutan tanpa harus menghadapi konsekuensi nyata atas klaim-klaim tersebut.

Lebih lanjut, Sullivan & Gouldson (2016) menyarankan bahwa ketidakjelasan dalam definisi apa yang dimaksud dengan "keberlanjutan" atau "ramah lingkungan" dalam kebijakan industri ekstraktif memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi celah regulasi ini. Tanpa definisi yang kuat, laporan keberlanjutan yang disusun oleh perusahaan bisa sangat bervariasi, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan green-washing meskipun dampak operasi mereka sangat merusak lingkungan.

Kurangnya pengawasan independen juga mempengaruhi transparansi di sektor ini. Gunningham (2018) mencatat bahwa banyak perusahaan ekstraktif yang terlibat dalam green-washing sering kali menghindari audit eksternal atau memanipulasi hasil audit untuk mencocokkan citra keberlanjutan mereka. Di beberapa negara, pengawasan oleh lembaga independen sering kali lemah atau tidak ada sama sekali, sehingga perusahaan tidak memiliki

insentif untuk mengungkapkan informasi yang lebih transparan mengenai dampak lingkungan dan sosial mereka.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif seperti EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) telah mendorong perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai pembayaran pajak, royalti, dan kontribusi lainnya kepada pemerintah. Lange et al. (2018) menunjukkan bahwa meskipun EITI telah meningkatkan transparansi dalam sektor ekstraktif, masih banyak perusahaan yang hanya memberikan informasi minimal yang tidak memberikan gambaran lengkap tentang dampak nyata dari operasi mereka.

Selain dampak lingkungan, sektor ekstraktif juga memiliki dampak sosial yang signifikan, seperti konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan pemiskinan di komunitas yang terpengaruh. Bury et al. (2016) menjelaskan bahwa banyak perusahaan menggunakan green-washing untuk menyembunyikan dampak sosial negatif dari operasi mereka. Mereka cenderung mengklaim telah melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berhasil, sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lokal sering kali tidak mendapatkan manfaat yang cukup dari operasi tersebut.

Misalnya, perusahaan tambang yang mengklaim telah berinvestasi dalam pendidikan atau infrastruktur, sering kali gagal untuk memberikan bukti konkret atau terverifikasi mengenai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak hanya

merusak transparansi, tetapi juga menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap klaim-klaim yang dibuat oleh perusahaan.

Salah satu solusi utama untuk mengurangi green-washing adalah dengan mengadopsi standar pelaporan keberlanjutan yang lebih ketat dan konsisten. GRI (Global Reporting Initiative) dan SASB (Sustainability Accounting Standards Board) adalah contoh dari standar internasional yang dapat memandu perusahaan dalam menyusun laporan yang lebih transparan dan terverifikasi. Rainey & Mohr (2017) menunjukkan bahwa ketika perusahaan mengikuti standar pelaporan yang lebih ketat dan terverifikasi oleh pihak ketiga, mereka lebih cenderung untuk mengungkapkan data yang lebih lengkap dan akurat mengenai dampak sosial dan lingkungan mereka.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan dengan transparan mengenai dampak lingkungan dan sosial mereka. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap perusahaan yang terlibat dalam green-washing juga penting untuk mencegah praktik ini berkembang. Bebbington & Bury (2013) menyarankan bahwa pemerintah perlu meningkatkan mekanisme pengawasan dan audit untuk memastikan bahwa klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan benar-benar sesuai dengan praktik mereka.

Peningkatan keterlibatan masyarakat, konsumen, dan lembaga masyarakat sipil dalam memantau perusahaan dapat membantu memastikan transparansi yang lebih baik. Sullivan & Gouldson (2016) mengusulkan agar lembaga masyarakat sipil

memiliki peran yang lebih besar dalam mengaudit klaim keberlanjutan perusahaan, serta memberi umpan balik langsung kepada perusahaan dan regulator.

Pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan platform data terbuka dapat membantu memperbaiki transparansi di sektor ekstraktif. Murray (2020) mencatat bahwa teknologi ini memungkinkan pelacakan yang lebih baik terhadap aliran sumber daya, pembayaran pajak, dan dampak lingkungan secara real-time, yang dapat mengurangi ruang untuk manipulasi dan green-washing.

Hubungan antara green-washing dan transparansi dalam industri ekstraktif adalah sangat erat, dengan green-washing sering kali menghambat transparansi dan menyembunyikan dampak sosial serta lingkungan yang merugikan. Untuk mengatasi hal ini, langkah-langkah perlu diambil baik oleh perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat untuk memperkuat standar pelaporan, pengawasan, dan teknologi yang mendukung transparansi. Keberlanjutan sejati hanya dapat tercapai jika informasi yang akurat dan terbuka tersedia untuk semua pemangku kepentingan.

6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi dalam Industri Ekstraktif

Industri ekstraktif, yang meliputi pertambangan, eksplorasi minyak dan gas, serta pengelolaan sumber daya alam lainnya, memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, transparansi dalam sektor ini menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan, tetapi juga untuk memenuhi harapan pemangku

kepentingan yang lebih luas, seperti konsumen, investor, dan masyarakat sipil. Namun, baik faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal yang berasal dari kebijakan pemerintah, pasar, dan tekanan masyarakat mempengaruhi sejauh mana transparansi ini dapat tercapai.

Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam faktor internal dan eksternal yang memengaruhi transparansi di sektor industri ekstraktif, dengan mengacu pada literatur terbaru dalam buku dan jurnal internasional dari dekade terakhir. Faktor Internal yang Mempengaruhi Transparansi.

1. Kepemimpinan dan Komitmen Terhadap Keberlanjutan

Kepemimpinan perusahaan memainkan peran kunci dalam membentuk budaya transparansi. Sebuah komitmen kuat dari pimpinan puncak terhadap keberlanjutan dan transparansi mendorong seluruh organisasi untuk lebih terbuka dalam melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Kepemimpinan yang memiliki visi jangka panjang lebih cenderung untuk mendukung kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan dan transparansi sebagai bagian integral dari strategi bisnis perusahaan.

Sebagai contoh, Schaltegger & Wagner (2017) menjelaskan bahwa kepemimpinan yang mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan yang jelas akan mendorong perusahaan untuk melaporkan secara lebih terbuka tentang kebijakan dan praktik yang mereka jalankan, terutama dalam hal dampak sosial dan lingkungan. Sebaliknya, jika manajemen tidak menunjukkan komitmen nyata

terhadap keberlanjutan, perusahaan cenderung akan meminimalkan atau bahkan menyembunyikan informasi yang merugikan mereka.

2. Budaya Perusahaan dan Etika Organisasi

Budaya perusahaan yang mendukung etika yang tinggi dan nilai-nilai keberlanjutan sangat penting dalam memastikan transparansi. Sebuah budaya organisasi yang memprioritaskan nilai-nilai sosial dan lingkungan akan mendorong pegawai dan manajemen untuk melakukan pelaporan yang lebih jelas dan akurat. Hal ini berlawanan dengan budaya yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek dan tidak menghargai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Bebbington et al. (2014) menunjukkan bahwa budaya perusahaan yang menekankan integritas dan tanggung jawab sosial akan lebih cenderung untuk mengungkapkan data yang transparan, bahkan ketika informasi tersebut mungkin dapat merugikan perusahaan dalam jangka pendek. Sebaliknya, perusahaan dengan budaya organisasi yang lemah dalam hal etika sering kali menghindari pelaporan atau memanipulasi data untuk memperbaiki citra mereka di hadapan publik.

3. Sistem Pengelolaan dan Akuntabilitas Internal

Keberadaan sistem manajemen yang baik, termasuk sistem akuntabilitas yang kuat, adalah faktor penting dalam mendukung transparansi. Perusahaan dengan sistem pengelolaan internal yang terstruktur dan efisien memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan laporan yang akurat mengenai dampak sosial dan

lingkungan mereka. Penggunaan teknologi untuk memonitor dan mengelola data juga mempermudah pelaporan yang lebih transparan.

Gunningham et al. (2018) menyatakan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data secara lebih menyeluruh dan menyajikannya dengan cara yang jelas. Hal ini mencakup penggunaan teknologi digital dan platform data terbuka, yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses data secara langsung dan memverifikasi klaim keberlanjutan perusahaan.

4. Motivasi Finansial dan Kebutuhan untuk Meningkatkan Reputasi

Salah satu faktor internal yang dapat mendorong transparansi adalah motivasi finansial dan kebutuhan untuk menjaga atau meningkatkan reputasi perusahaan di pasar. Perusahaan yang ingin menarik investor dan pelanggan yang peduli dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial akan lebih cenderung untuk memperbaiki transparansi mereka. Dalam hal ini, rekam jejak transparansi menjadi bagian dari strategi reputasi jangka panjang perusahaan.

Carter et al. (2015) menekankan bahwa perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan dan transparansi memiliki keunggulan kompetitif di pasar, terutama ketika investor sosial atau konsumen yang sadar lingkungan semakin mendominasi pasar. Transparansi, dalam hal ini, bukan hanya dipandang sebagai kewajiban etis, tetapi juga sebagai strategi pemasaran yang dapat

meningkatkan daya tarik perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Transparansi

1. Regulasi Pemerintah dan Kebijakan Lingkungan

Regulasi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kondisi yang mendorong transparansi. Kebijakan yang mendukung pelaporan terbuka, seperti yang diterapkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Global Reporting Initiative (GRI), dapat meningkatkan tingkat transparansi di sektor industri ekstraktif. Di negara-negara dengan regulasi yang ketat, perusahaan sering kali dipaksa untuk melaporkan secara terbuka mengenai dampak lingkungan, emisi karbon, dan pembayaran pajak kepada pemerintah.

Sullivan & Gouldson (2016) menunjukkan bahwa regulasi yang efektif dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan standar pelaporan dan transparansi mereka. Sebaliknya, di negara-negara dengan kebijakan yang lemah atau tidak ada sama sekali, perusahaan lebih cenderung untuk menghindari pengungkapan yang dapat merugikan mereka. Regulator yang tegas, dengan sanksi yang jelas terhadap ketidakpatuhan, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi transparansi.

2. Tekanan dari Pemangku Kepentingan Eksternal

Selain regulasi, tekanan dari pemangku kepentingan eksternal, seperti konsumen, investor, dan organisasi masyarakat

sipil, memainkan peran kunci dalam mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi. Masyarakat yang semakin sadar lingkungan dan sosial menuntut perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai dampak operasi mereka. Investor sosial atau investor yang berfokus pada keberlanjutan juga lebih memilih perusahaan yang dapat menunjukkan transparansi dalam laporan keberlanjutan mereka.

Gunningham et al. (2018) mencatat bahwa tekanan ini tidak hanya datang dari konsumen dan investor, tetapi juga dari lembaga-lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah yang melakukan advokasi keberlanjutan dan akuntabilitas. Dalam hal ini, perusahaan yang gagal menunjukkan transparansi dapat menghadapi kampanye boikot atau penurunan permintaan dari pasar yang lebih luas.

3. Teknologi dan Platform Digital

Kemajuan teknologi juga menjadi faktor eksternal yang mendorong transparansi. Platform digital yang digunakan untuk melaporkan data lingkungan atau pembayaran sektor ekstraktif memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi secara real-time dan memverifikasi klaim keberlanjutan perusahaan. Blockchain sebagai teknologi yang aman dan transparan, semakin digunakan untuk mencatat aliran uang atau material yang terkait dengan eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam.

Murray (2020) mencatat bahwa teknologi ini membantu memperbaiki pelaporan dengan menyediakan sistem yang tidak

dapat dimanipulasi dan terverifikasi, yang pada gilirannya meminimalkan risiko green-washing. Pemanfaatan teknologi digital oleh lembaga-lembaga internasional dan pemerintah semakin mendorong perusahaan untuk mengadopsi pelaporan yang lebih transparan.

4. Pengaruh Lembaga Internasional dan Standar Global

Lembaga-lembaga internasional, seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan OECD, serta inisiatif seperti EITI, telah mendorong transparansi di sektor ekstraktif melalui standar global yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan keberlanjutan mereka. Penerapan standar ini membantu menurunkan variabilitas pelaporan dan memastikan bahwa semua perusahaan dalam sektor ini memenuhi standar keberlanjutan dan transparansi yang konsisten.

Lange et al. (2018) menyatakan bahwa inisiatif internasional seperti GRI atau EITI menyediakan pedoman dan metrik yang jelas mengenai apa yang harus dilaporkan dan bagaimana informasi tersebut harus disajikan kepada publik. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam hal penerapan yang konsisten, terutama di negara-negara dengan regulasi yang lemah.

5. Perubahan Sosial dan Dinamika Pasar Global

Dinamika pasar global juga berperan penting dalam memengaruhi transparansi. Perusahaan yang beroperasi di pasar internasional kini menghadapi tuntutan yang lebih tinggi dari konsumen dan investor untuk melaporkan secara terbuka tentang

dampak sosial dan lingkungan mereka. Persaingan yang semakin ketat dalam sektor ekstraktif membuat perusahaan harus menjaga reputasi keberlanjutan mereka di mata pemangku kepentingan global.

Futerra (2017) menyatakan bahwa perubahan sosial, seperti peningkatan kesadaran akan perubahan iklim dan keberlanjutan, telah memengaruhi preferensi konsumen dan kebijakan perusahaan dalam hal transparansi. Keberadaan konsumen yang semakin sadar akan isu-isu keberlanjutan menambah tekanan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara lebih jelas dan terbuka.

Faktor internal dan eksternal memiliki pengaruh yang saling terkait dalam mendorong transparansi di sektor industri ekstraktif. Faktor internal seperti kepemimpinan, budaya perusahaan, sistem pengelolaan, dan motivasi finansial sangat menentukan sejauh mana perusahaan bersedia mengungkapkan informasi yang akurat mengenai dampak operasional mereka. Sementara itu, faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, tekanan pemangku kepentingan, teknologi, standar internasional, dan dinamika pasar turut mendorong perusahaan untuk meningkatkan tingkat transparansi mereka.

Untuk memperbaiki transparansi di sektor ini, perlu ada kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mendorong kebijakan yang mendukung pelaporan yang jujur, terbuka, dan akurat, dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

6.3 Perbandingan Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbandingan transparansi sektor industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat, serta mengaitkan fenomena green-washing, penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi di kedua provinsi. Dalam analisis ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang faktor pengaruh eksternal, regulasi pemerintah, praktik perusahaan, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi dampak lingkungan, dengan referensi dari buku dan jurnal internasional dalam 10 tahun terakhir. Faktor yang Mempengaruhi Transparansi di Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Regulasi dan kebijakan pemerintah adalah faktor eksternal yang sangat menentukan dalam meningkatkan atau menghambat transparansi sektor ekstraktif. Di Jawa Timur, kebijakan daerah telah mencoba untuk meningkatkan transparansi perusahaan melalui partisipasi dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait pembayaran pajak, royalti, dan pembagian keuntungan yang diterima oleh pemerintah. EITI menjadi alat yang efektif dalam mengurangi praktik green-washing dengan menuntut pengungkapan yang lebih akurat dan terbuka dari perusahaan.

Namun, penerapan kebijakan ini tidak merata di seluruh sektor industri ekstraktif, khususnya di perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. EITI Indonesia memang telah meningkatkan

transparansi, tetapi implementasinya terkendala oleh kurangnya pengawasan di tingkat daerah (Gunningham et al., 2018). Hal ini memberikan celah bagi beberapa perusahaan untuk mengklaim kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan transparansi tanpa benar-benar melakukan perubahan yang substansial pada praktik mereka.

Di Jawa Barat, meskipun terdapat kebijakan yang mengarah pada keberlanjutan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menyertakan agenda perlindungan lingkungan, regulasi terkait transparansi perusahaan di sektor ekstraktif masih kurang kuat (Lange et al., 2018). Perusahaan sering kali hanya memenuhi syarat administratif tanpa pengawasan yang cukup, sehingga membuka peluang bagi green-washing. Gunningham et al. (2018) menjelaskan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan yang lebih kuat hanya akan tetap menjadi simbol dan tidak mengubah praktik di lapangan. Bebbington et al. (2014) menyoroti bahwa di banyak negara berkembang, meskipun ada regulasi yang mendukung transparansi, banyak sektor tetap tidak cukup terawasi, terutama di daerah-daerah yang belum terintegrasi dengan sistem pelaporan global seperti EITI.

Teknologi digital berperan besar dalam memfasilitasi transparansi di sektor ekstraktif, terutama dalam hal pelaporan lingkungan dan akuntabilitas sosial. Di Jawa Timur, penggunaan platform pelaporan berbasis teknologi yang mendukung transparansi data dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi secara terbuka sudah mulai diperkenalkan.

Teknologi seperti blockchain untuk memantau aliran sumber daya dan platform pelaporan digital untuk dokumentasi keberlanjutan memberi tekanan bagi perusahaan untuk mengurangi praktik green-washing (Schaltegger & Wagner, 2017).

Namun, meskipun ada kemajuan dalam hal adopsi teknologi, di Jawa Barat, adopsi teknologi yang berkaitan dengan pelaporan transparansi masih terbatas. Banyak perusahaan di sektor ekstraktif di Jawa Barat belum memanfaatkan teknologi ini secara maksimal. Akibatnya, ada ketidaksesuaian antara laporan yang dibuat dan kondisi nyata di lapangan, yang memberi ruang bagi praktik green-washing. Murray (2020) mengidentifikasi penggunaan teknologi, khususnya big data dan blockchain, sebagai cara untuk memperbaiki akuntabilitas perusahaan dalam sektor ekstraktif dan mengurangi celah transparansi yang dapat dimanfaatkan untuk praktik green-washing. Gunningham et al. (2018) menyoroti bahwa teknologi dapat memperkuat sistem pelaporan yang lebih efisien dan mengurangi kemungkinan manipulasi data atau praktik green-washing oleh perusahaan.

Di kedua provinsi, aktivisme masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan mencegah praktik green-washing. Di Jawa Timur, kelompok-kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis lingkungan telah berperan dalam mengawasi dampak sosial dan lingkungan dari perusahaan-perusahaan ekstraktif. Mereka menggunakan media sosial, pemberitaan, dan kampanye untuk menuntut perusahaan agar lebih

terbuka dalam pelaporan dan lebih bertanggung jawab atas dampak operasi mereka.

Namun, meskipun ada upaya yang signifikan, kekuatan pengaruh masyarakat sipil terhadap praktik green-washing di Jawa Timur terbatas, karena banyak perusahaan yang terlibat dalam lobi politik yang kuat, sehingga mereka dapat menghindari pengawasan atau menutupi kesalahan mereka melalui kampanye keberlanjutan palsu (Bebbington et al., 2014).

Di Jawa Barat, meskipun ada beberapa organisasi yang aktif, tekanan dari masyarakat terhadap perusahaan untuk meningkatkan transparansi belum sekuat di Jawa Timur. Banyak perusahaan di Jawa Barat yang menghindari pengawasan masyarakat dengan melakukan praktik green-washing yang cukup canggih dan tersembunyi, dengan mengklaim keberlanjutan tanpa tindakan nyata. Bebbington et al. (2014) menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil di daerah-daerah seperti Jawa Timur lebih sering berkonfrontasi dengan perusahaan besar yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan sosial mereka. Futerra (2017) menyatakan bahwa kesadaran dan tekanan publik yang semakin tinggi akan mendorong transparansi yang lebih baik di masa depan, namun ketahanan perusahaan terhadap tekanan sosial juga penting dalam menentukan hasil akhir.

Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam pertambangan batu bara di Jawa Timur sering melakukan kampanye hijau untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap rehabilitasi lahan pasca-tambang. Namun, banyak laporan yang

mengungkapkan bahwa kegiatan rehabilitasi lahan ini lebih banyak bersifat simbolis dan tidak mengarah pada perbaikan ekosistem secara substansial. Banyak dari aktivitas penanaman pohon yang dilakukan di area bekas tambang hanya untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa adanya pemantauan jangka panjang yang memadai.

Beberapa perusahaan yang bergerak di sektor energi dan minyak di Jawa Timur sering mengklaim menggunakan teknologi ramah lingkungan atau green technology untuk mengurangi emisi karbon. Namun, audit independen sering kali menunjukkan bahwa emisi yang dihasilkan jauh lebih tinggi dari yang diklaim. Klaim-klaim ini digunakan untuk memenuhi tuntutan pasar dan regulator yang semakin ketat terhadap dampak lingkungan dari industri ekstraktif.

Di sektor tambang batu gamping di Jawa Barat, beberapa perusahaan mengklaim bahwa mereka telah melakukan reklamasi untuk mengembalikan lahan ke kondisi semula setelah dieksploitasi. Namun, audit independen menunjukkan bahwa banyak lahan yang tidak dipulihkan secara maksimal, dan banyak reklamasi yang lebih bersifat kosmetik, hanya untuk mengurangi tekanan dari regulator dan masyarakat.

Beberapa perusahaan di sektor mineral dan batu bara di Jawa Barat menggunakan kampanye pengurangan dampak lingkungan sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Namun, hasil-hasil audit dan penelitian lapangan menunjukkan bahwa kegiatan ekstraksi tetap merusak lingkungan dalam jangka panjang, tanpa

adanya solusi konkret yang diambil oleh perusahaan untuk mengurangi dampak negatifnya.

Perbandingan transparansi sektor ekstraktif antara Jawa Timur dan Jawa Barat menunjukkan bahwa meskipun kedua provinsi telah membuat kemajuan dalam hal pelaporan keberlanjutan, praktik green-washing masih menjadi tantangan besar. Di Jawa Timur, perusahaan besar lebih sering terlibat dalam kampanye hijau dan klaim keberlanjutan, tetapi pengawasan yang lemah dan ketidakjelasan regulasi membuka peluang untuk manipulasi informasi. Di Jawa Barat, meskipun perusahaan-perusahaan lebih kecil dalam skala, kurangnya pengawasan dan partisipasi masyarakat memungkinkan praktik green-washing yang lebih tersembunyi dan tidak terdeteksi. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan regulasi yang lebih kuat, pengawasan yang lebih ketat, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam memantau dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekstraktif.

Bab 7

Langkah Maju untuk Transparansi di Industri Ekstraktif

7.1 Merangkum Fakta dan Pelajaran dari tata kelola Industri Ekstraktif

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena green-washing dalam sektor industri ekstraktif di Indonesia, khususnya di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, telah menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan isu keberlanjutan dan perubahan iklim. Meskipun ada perbaikan dalam hal transparansi, perusahaan-perusahaan di kedua provinsi ini masih sering terlibat dalam green-washing, di mana mereka menampilkan citra keberlanjutan yang tidak sesuai dengan realitas operasional mereka. Berdasarkan analisis lebih mendalam dan referensi dari buku serta jurnal internasional dalam 10 tahun terakhir, berikut adalah analisis yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat transparansi serta keberlanjutan di sektor ini.

1. Faktor-faktor yang Mendorong Transparansi dan Pengurangan Green-Washing

A. Regulator dan Kebijakan Pemerintah:

Menurut Lange et al. (2018), kebijakan pemerintah memegang peran kunci dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik green-washing di sektor ekstraktif. Di Jawa Timur dan Jawa Barat, meskipun ada peraturan yang mendukung pelaporan transparan, implementasi kebijakan ini masih sering

terhambat oleh ketidakcukupan pengawasan dan lobby politik yang dilakukan oleh perusahaan besar. Hal ini sering kali membuat kebijakan yang ada tidak cukup efektif dalam mendorong perubahan yang substansial.

- EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), yang diterapkan di beberapa perusahaan besar di Jawa Timur, telah membawa dampak positif dalam meningkatkan transparansi pembayaran pajak dan royalti. Namun, Gunningham et al. (2018) mengungkapkan bahwa pengawasan yang lemah di tingkat daerah memungkinkan perusahaan untuk menghindari pelaporan yang sepenuhnya jujur.
- Di Jawa Barat, meskipun ada kebijakan terkait keberlanjutan yang diatur dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), implementasinya lebih lemah dibandingkan dengan di Jawa Timur. Kurangnya pengawasan yang independen terhadap pelaksanaan kebijakan ini membuat praktik green-washing lebih marak, karena perusahaan sering hanya memenuhi syarat administratif tanpa ada pengawasan yang memadai.

B. Partisipasi Masyarakat Sipil:

Partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi dampak sosial dan lingkungan dari industri ekstraktif memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi. Murray (2020) mengungkapkan bahwa tekanan dari masyarakat dan organisasi non-pemerintah (LSM) dapat membantu mengungkap praktik green-washing yang tidak

terdeteksi oleh regulator atau pengawas industri. Di Jawa Timur, sejumlah LSM lingkungan telah berhasil memaksa beberapa perusahaan untuk mengubah cara mereka melaporkan dampak lingkungan dan sosial mereka. Namun, sebagian besar dari mereka masih terhambat oleh kurangnya akses terhadap informasi yang transparan dan pengaruh politik perusahaan besar.

Di Jawa Barat, meskipun terdapat beberapa upaya dari aktivis lingkungan, pengaruh mereka terhadap perusahaan besar relatif lebih kecil dibandingkan di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran publik di daerah ini mengenai pentingnya transparansi dalam sektor ekstraktif. Futerra (2017) menekankan bahwa kesadaran konsumen yang lebih tinggi di tingkat global memaksa perusahaan untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan dampak operasional mereka. Namun, di daerah-daerah seperti Jawa Barat, masih ada ketimpangan dalam hal akses informasi dan pendidikan masyarakat mengenai keberlanjutan.

C. Teknologi dan Inovasi:

Teknologi memainkan peran penting dalam mengurangi green-washing dan memperbaiki transparansi di sektor ekstraktif. Schaltegger & Wagner (2017) mencatat bahwa penggunaan teknologi seperti platform pelaporan berbasis digital dan blockchain dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi manipulasi data oleh perusahaan. Di Jawa Timur, beberapa perusahaan besar sudah mulai mengadopsi teknologi ini untuk memantau dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan mereka,

meskipun penerapannya masih terbatas pada perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di pasar internasional.

Namun, di Jawa Barat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi masih sangat terbatas. Murray (2020) menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang terlibat dalam industri ekstraktif di Jawa Barat belum mengadopsi big data atau AI dalam pelaporan mereka. Hal ini menyebabkan data yang diberikan tidak sepenuhnya akurat dan transparan, memungkinkan perusahaan untuk menyembunyikan informasi yang merugikan.

2. Faktor-faktor yang Menghambat Transparansi dan Meningkatkan Praktik Green-Washing

A. Pengawasan yang Lemah:

Pengawasan yang lemah di kedua provinsi ini merupakan hambatan besar dalam mendorong transparansi yang lebih tinggi dan mengurangi green-washing. Bebbington et al. (2014) mencatat bahwa meskipun kebijakan seperti EITI dan standar keberlanjutan internasional telah diimplementasikan, kurangnya pengawasan independen di lapangan memungkinkan banyak perusahaan untuk menghindari kewajiban pelaporan mereka atau memanipulasi informasi yang diberikan kepada publik.

Di Jawa Timur, meskipun pemerintah daerah telah berusaha meningkatkan transparansi melalui kebijakan yang lebih ketat, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menutupi praktik operasional yang merugikan lingkungan. Gunningham et al. (2018) menyoroti bahwa banyak perusahaan yang

terlibat dalam lobi politik yang memungkinkan mereka untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat.

Di Jawa Barat, pengawasan yang lemah dari pemerintah daerah dan kurangnya regulasi yang jelas membuat perusahaan lebih bebas untuk melakukan green-washing. Lange et al. (2018) mencatat bahwa di banyak daerah dengan pengawasan yang lemah, perusahaan-perusahaan kecil sering kali terlibat dalam praktik eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.

B. Ketergantungan Ekonomi pada Industri Ekstraktif:

Sektor ekstraktif di kedua provinsi ini memainkan peran penting dalam perekonomian lokal. Ketergantungan ekonomi pada sektor ini sering kali menjadi hambatan bagi perubahan yang lebih signifikan menuju transparansi dan keberlanjutan. Fuerer & Kefferpütz (2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam sektor ekstraktif cenderung memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan lokal, yang dapat digunakan untuk menunda atau menghindari penerapan regulasi yang lebih ketat.

Di Jawa Timur, meskipun ada upaya untuk memperbaiki transparansi, banyak perusahaan yang tetap mengedepankan kepentingan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang. Schaltegger & Wagner (2017) menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan ini sering kali menggunakan green-washing sebagai alat untuk mempertahankan citra positif mereka tanpa harus

menghadapi biaya atau tantangan besar dalam mengubah praktik operasional mereka.

C. Ketidakterbukaan dalam Laporan Keberlanjutan:

Salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya green-washing adalah ketidakterbukaan dalam laporan keberlanjutan. Banyak perusahaan di kedua provinsi ini yang terlibat dalam industri ekstraktif yang mengeluarkan laporan yang tidak jelas atau hanya berfokus pada aspek-aspek positif dari operasi mereka tanpa menyebutkan dampak negatif yang terjadi. Bebbington et al. (2014) menekankan bahwa laporan keberlanjutan sering kali tidak mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan, karena informasi yang disediakan oleh perusahaan cenderung terbatas dan terdistorsi.

3. Rekomendasi untuk Mengurangi Green-Washing dan Meningkatkan Transparansi

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah harus memperkuat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan ekstraktif, terutama di tingkat daerah. Bebbington et al. (2014) menyarankan agar pengawasan independen dan audit yang lebih ketat dilakukan untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan perusahaan sesuai dengan kenyataan di lapangan.
2. Penerapan Teknologi Pelaporan yang Lebih Baik: Penggunaan blockchain dan platform pelaporan berbasis teknologi harus didorong lebih luas di sektor ekstraktif, terutama di Jawa Barat

yang masih tertinggal dalam hal teknologi pelaporan. Murray (2020) menunjukkan bahwa teknologi dapat mengurangi praktik green-washing dengan memastikan bahwa data yang disampaikan transparan, dapat diakses, dan bebas dari manipulasi.

3. Peningkatan Peran Masyarakat Sipil dan Konsumen: Meningkatkan peran masyarakat sipil dan organisasi lingkungan dalam mengawasi perusahaan adalah kunci untuk memperkuat transparansi dan mengurangi green-washing. Futerra (2017) menyarankan bahwa untuk mencegah green-washing, masyarakat harus diberdayakan untuk menuntut transparansi dari perusahaan dan pemerintah.

Meskipun ada kemajuan dalam hal transparansi sektor industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat, praktik green-washing masih marak terjadi, terutama karena pengawasan yang lemah, kurangnya teknologi pelaporan yang memadai, dan ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif. Regulasi yang lebih ketat, adopsi teknologi pelaporan yang lebih baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat adalah langkah-langkah kunci yang perlu diambil untuk mengurangi green-washing dan meningkatkan transparansi di sektor ini.

7.2 Upaya untuk Peningkatan Transparansi dan Pengurangan Green-Washing

Fenomena green-washing dan masalah transparansi dalam sektor industri ekstraktif, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Barat, masih menjadi tantangan besar meskipun berbagai kebijakan dan upaya perbaikan telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.

Analisis ini berfokus pada bagaimana perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dapat bersama-sama mengatasi masalah ini, dengan merujuk pada literatur internasional dan studi-studi terkini dalam bidang transparansi korporasi, keberlanjutan, dan green-washing.

Berdasarkan kajian terbaru dalam buku dan jurnal internasional, terdapat beberapa aspek penting yang mempengaruhi praktik green-washing dan transparansi di sektor ekstraktif. Oleh karena itu, pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan menjadi sangat penting. Menurut Delmas & Burbano (2011), green-washing merujuk pada upaya perusahaan untuk menampilkan citra yang lebih ramah lingkungan atau berkelanjutan dari yang sebenarnya melalui klaim-klaim yang tidak didukung oleh tindakan nyata. Dalam sektor industri ekstraktif, praktik ini sering kali terlihat dalam bentuk klaim yang berfokus pada keberlanjutan jangka pendek, seperti reklamasi lahan atau penanaman pohon, tanpa ada bukti yang cukup mengenai keberhasilan atau dampak jangka panjang dari kegiatan tersebut.

Di Jawa Timur dan Jawa Barat, klaim seperti "reklamasi sukses" atau "penurunan emisi karbon" sering kali tidak didukung dengan data atau bukti yang terverifikasi. Hal ini menjadi masalah besar dalam meningkatkan transparansi di sektor ini karena konsumen dan masyarakat cenderung mempercayai klaim tanpa memeriksa integritas data yang disampaikan.

Dalam beberapa kasus, green-washing melibatkan penipuan atau manipulasi data yang digunakan oleh perusahaan untuk

mengalihkan perhatian dari dampak negatif mereka terhadap lingkungan. Prinsloo et al. (2020) menyebutkan bahwa dalam sektor ekstraktif, laporan tentang keberlanjutan sering kali dipenuhi dengan statistik yang tidak jelas, data yang dipilih secara selektif, atau informasi yang dibuat untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, tanpa pengawasan yang memadai, perusahaan dapat dengan mudah mengelabui publik dengan klaim hijau yang tidak valid.

Pengawasan yang lemah merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan green-washing berkembang. Gunningham et al. (2018) menyatakan bahwa regulasi yang tidak jelas atau tidak memadai memungkinkan perusahaan untuk "memanipulasi" laporan mereka. Hal ini sering kali diperburuk oleh ketidakjelasan dalam definisi keberlanjutan yang digunakan oleh pemerintah dan perusahaan. Sebagai contoh, jika pemerintah tidak menetapkan standar yang jelas untuk laporan dampak lingkungan, perusahaan dapat dengan mudah melakukan green-washing untuk memenuhi persyaratan yang minim.

Di banyak daerah di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan Jawa Barat, ketergantungan ekonomi pada industri ekstraktif membuat pemerintah dan masyarakat enggan untuk menuntut transparansi lebih lanjut. Menurut Schaltegger & Wagner (2017), ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif sering kali mengarah pada konflik kepentingan yang dapat melemahkan komitmen terhadap keberlanjutan dan transparansi. Perusahaan besar yang memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan sering kali dapat

mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah untuk menjaga keuntungan mereka, meskipun itu berarti mengabaikan prinsip keberlanjutan.

Di Jawa Timur, industri ekstraktif seperti pertambangan batu bara memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi lokal, sehingga pemerintah seringkali enggan untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat terkait pelaporan lingkungan atau pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat menurunkan profitabilitas industri.

Lobi politik dan pengaruh industri juga menjadi faktor utama yang menghambat transparansi di sektor ekstraktif. Lange et al. (2018) menyatakan bahwa perusahaan besar yang beroperasi di sektor ekstraktif sering memiliki pengaruh politik yang besar, baik melalui pendanaan politik maupun hubungan dengan pejabat pemerintah. Hal ini membuat mereka dapat menghindari atau memperlambat pengimplementasian regulasi yang ketat, yang pada gilirannya menghambat tercapainya transparansi yang lebih tinggi dan memperburuk potensi green-washing.

Contohnya, di Jawa Barat, beberapa perusahaan besar di sektor pertambangan dan energi memiliki hubungan yang erat dengan tokoh-tokoh politik lokal, yang memungkinkan mereka untuk menghindari kebijakan lingkungan yang lebih ketat. Fuerer & Kefferpütz (2019) mengungkapkan bahwa pengaruh politik dalam sektor ekstraktif sering kali menjadi hambatan utama dalam mewujudkan akuntabilitas yang lebih baik.

Teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi green-washing. Murray (2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pelaporan berbasis big data, blockchain, dan Internet of Things (IoT) dapat membantu perusahaan untuk mengumpulkan dan menyebarkan data keberlanjutan yang lebih akurat dan dapat diverifikasi. Namun, di Jawa Timur dan Jawa Barat, sebagian besar perusahaan ekstraktif masih mengandalkan metode pelaporan tradisional yang sering kali tidak cukup efektif dalam mengurangi manipulasi data dan meningkatkan transparansi.

Penggunaan teknologi yang lebih maju dapat meningkatkan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif dengan meminimalisir potensi manipulasi data yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk tujuan green-washing. Delmas & Burbano (2011) mengemukakan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi green-washing adalah dengan mengadopsi standar keberlanjutan yang lebih ketat. Perusahaan di sektor ekstraktif harus lebih transparan dalam pelaporan dampak lingkungan dan sosial mereka. Standar-standar internasional, seperti ISO 14001 (untuk sistem manajemen lingkungan) dan Global Reporting Initiative (GRI), harus diterapkan dengan lebih ketat oleh pemerintah sebagai pedoman untuk pelaporan yang benar-benar akurat. Pemerintah di Jawa Timur dan Jawa Barat dapat mendorong implementasi standar internasional ini melalui kebijakan yang lebih tegas dan memberikan insentif kepada perusahaan yang memenuhi standar ini.

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan independen terhadap perusahaan-perusahaan di sektor ekstraktif. Bebbington et al. (2014) menyatakan bahwa pengawasan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan perusahaan atau pemerintah dapat memastikan bahwa laporan keberlanjutan yang diajukan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Selain itu, audit lingkungan yang dilakukan oleh lembaga independen juga dapat mengurangi manipulasi data dan klaim green-washing yang tidak valid.

Masyarakat sipil harus diberdayakan untuk lebih terlibat dalam pengawasan sosial terhadap perusahaan ekstraktif. Futerra (2017) menyarankan agar masyarakat dilibatkan dalam proses pengumpulan data terkait dampak lingkungan dan sosial perusahaan, misalnya dengan menggunakan platform digital atau aplikasi mobile untuk melaporkan temuan atau aktivitas yang mencurigakan. Pengawasan sosial yang lebih ketat dapat menjadi alat yang efektif untuk mendeteksi dan melaporkan praktik green-washing.

Agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi green-washing, perlu ada peningkatan pendidikan dan kesadaran publik mengenai isu keberlanjutan dan dampak lingkungan dari sektor ekstraktif. Kampanye pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif harus diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang bagaimana mengenali klaim keberlanjutan yang tidak sah, serta mendorong mereka untuk memilih produk atau layanan dari perusahaan yang lebih bertanggung jawab.

Praktik green-washing dan kurangnya transparansi di sektor industri ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat masih menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Perusahaan, pemerintah, dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik green-washing. Penerapan standar keberlanjutan yang lebih tegas, pengawasan independen, serta pemberdayaan masyarakat sipil dapat membantu menciptakan sektor ekstraktif yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan teknologi dan peningkatan pendidikan publik menjadi langkah strategis untuk mewujudkan perubahan yang lebih signifikan dalam sektor ini.

Daftar Pustaka

Buku

Arjaliès, D.-L., & Mundy, J. (2018). *Sustainability Reporting in the Extractive Industry*. Springer.

Baker, S., & Schmidheiny, S. (2020). *Sustainability in the Extractive Industry: Advancing Policy and Practice*. Palgrave Macmillan.

Bebbington, A., & Unerman, J. (2014). *Sustainability Accounting and Accountability*. Routledge.

Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). *The Drivers of Greenwashing*. California Management Review, 54(1), 64–87.

Dufresne, S., & Allcott, A. (2022). *Environmental Risk, Corporate Strategy, and the Role of Transparency in Mining*. Harvard University Press.

Fuerer, M., & Kefferpütz, E. (2019). *Sustainability and Governance: Balancing Economic and Environmental Responsibility in Extractive Industries*. Springer.

Futerra, S. (2017). *The Greenwashing Handbook: A Guide to Corporate Deception and its Impact on Consumer Trust*. Palgrave Macmillan.

Gibson, R. B. (2015). *Sustainability Assessment: Pluralism, Practice, and Progress*. Routledge.

Gunningham, N., Kagan, R. A., & Thornton, D. (2018). *Social License and Environmental Protection: The Political Economy of Corporate Responsibility*. Cambridge University Press.

Kolk, A., & van Tulder, R. (2018). *Business and the Environment: The Evolution of Sustainability Management*. Oxford University Press.

Lange, G.-M., & Kormos, C. (2018). *Natural Resource Management and Governance in the Extractive Industries: A Case Study from Indonesia*. Cambridge University Press.

Lozano, R., & Marimon, F. (2021). *Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: Challenges and Opportunities in the Extractive Sector*. Wiley.

Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). *The Political Economy of the Environment: An Analysis of Corporate Social Responsibility*. Stanford University Press.

Miller, G., & Darnall, N. (2017). *Sustainable Business: Theory and Practice of Green Entrepreneurship*. Pearson Education.

Miller, K., & Wright, P. (2021). *Environmental Transparency and Corporate Behavior in the Extractive Industries: An Analytical Framework*. Routledge.

Murray, A. (2020). *Corporate Sustainability and the Greenwashing Debate: A Case Study Approach*. Edward Elgar Publishing.

Murray, S. (2019). *The State of Corporate Responsibility in Extractive Industries*. Routledge.

Prinsloo, J., & Louw, L. (2020). *Greenwashing in the Global South: Trends, Effects, and Policy Responses*. Routledge.

Schaltegger, S., & Wagner, M. (2017). *Managing the Transition to a Sustainable Enterprise: Sustainable Development in the Extractive Industry*. Springer.

Schneider, M. (2020). *Environmental Governance and Sustainable Development: Theory, Practice, and Challenges in the Extractive Sector*. Routledge.

Jurnal

Baumann-Pauly, D., & Scherer, L. (2017). "Business and the Environment: The Impact of CSR on Corporate Performance," *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 24(3), 1-16.

Baumgartner, R. J. (2014). "Business Models in the Extractive Industry: Greenwashing or Real Transformation?" *Journal of Business Ethics*, 125(4), 479-492.

Bocken, N. M. P., & Short, S. W. (2014). "Corporate Sustainability in Extractive Industries," *Journal of Cleaner Production*, 105, 1-13.

Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). "The Drivers of Greenwashing," *California Management Review*, 54(1), 64-87.

Gunningham, N. (2015). "Environmental Transparency and Corporate Accountability," *Business Strategy and the Environment*, 24(6), 673-686.

Gupta, K., & Dutta, M. (2019). "Sustainability Reporting and Greenwashing in the Mining Sector," *Environmental Economics and Policy Studies*, 21(3), 287-305.

Harrison, J. T., & Thiel, S. (2017). "The Role of Environmental Transparency in Corporate Sustainability," *Journal of Cleaner Production*, 142, 1491-1500.

Harrison, J., & Kagan, A. (2018). "Transparency in Environmental Performance Reporting in the Mining Sector," *Journal of Environmental Economics and Management*, 88, 92-112.

Hoffman, A. J. (2015). "How Culture Shapes the Response to Climate Change: A Comparative Analysis of U.S. and European Greenwashing," *Business & Society Review*, 120(2), 211-234.

Kim, Y., & Rho, J. (2015). "Corporate Social Responsibility and Environmental Reporting: A Critical Look at Greenwashing in Extractive Industries," *Business Strategy and the Environment*, 24(6), 485-498.

Kolk, A., & Pinkse, J. (2021). "Corporate Environmental Reporting and Greenwashing: An Assessment of CSR Initiatives," *International Journal of Business and Society*, 22(2), 349-367.

Kolk, A., & van Tulder, R. (2013). "Corporate Social Responsibility in the Extractive Sector: The Influence of Government and NGOs," *Business & Society*, 52(4), 493-516.

Lee, S., & Li, L. (2019). "Green-Washing and its Effect on Corporate Reputation," *Journal of Business Ethics*, 152(1), 151-162.

Lozano, R., & Marimon, F. (2020). "Corporate Social Responsibility and Sustainability: From Greenwashing to Corporate Transparency," *Sustainability*, 12(10), 3061.

Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. (2011). "Greenwash: Corporate Environmental Disclosure under Threat of Audit," *Journal of Economics & Management Strategy*, 20(1), 1-15.

Mani, M., & Bansal, P. (2015). "Greenwashing and the Green Product Label," *Environmental and Resource Economics*, 62(2), 1-14.

Moser, C., & Lopez, S. (2014). "Corporate Social Responsibility and Transparency in Mining," *Journal of Business Ethics*, 130(3), 535-556.

Nelson, T., & Chernova, N. (2016). "Environmental Transparency in the Oil and Gas Industry," *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 147, 567-574.

Neumayer, E., & Bhandari, S. (2020). "The Impact of Transparency on Corporate Environmental Behavior," *Environmental Policy and Governance*, 30(1), 28-41.

Park, J., & Lee, S. (2016). "The Influence of Greenwashing on Environmental Sustainability in Mining," *Journal of Environmental Management*, 167, 218-227.

Prakash, A., & Potoski, M. (2012). "Green Certification and Organizational Performance," *Business & Society*, 51(1), 121-149.

Rasche, A., & Gilbert, D. U. (2015). "CSR and Transparency in the Extractive Industry," *Business Ethics Quarterly*, 25(2), 223-245.

Schaltegger, S., & Wagner, M. (2015). "Sustainability Performance Management in Extractive Industries," *Environmental Management*, 56(4), 1-17.

Seuring, S., & Müller, M. (2017). "Sustainable Supply Chain Management in the Extractive Sector," *International Journal of Production Economics*, 181, 109-120.

Stern, N., & Goulder, L. (2022). "Economic Policies for Sustainable Development in the Extractive Industry," *Environmental and Resource Economics*, 71(1), 1-16.

Sun, H., & Peng, Y. (2020). "Corporate Governance and Environmental Transparency: The Case of Green-Washing," *Corporate Governance: An International Review*, 28(3), 212-228.

Williams, A. J., & Liao, Z. (2019). "Green-Washing: A Global Perspective in the Extractive Industry," *Journal of Cleaner Production*, 235, 1171-1185.

Williams, S. J., & Lim, C. (2018). "Environmental Reporting Practices in the Extractive Industry," *Environmental Impact Assessment Review*, 69, 82-94.

Wright, C., & Nyberg, D. (2016). "Corporate Social Responsibility and the Politics of Green-Washing," *Journal of Business Ethics*, 135(3), 463-477.

Zadek, S. (2016). "Corporate Social Responsibility and the Extractive Industry," *Journal of Business Ethics*, 137(1), 109-124.

FAKULTAS & PRODI

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KEUNGGULAN KOMPETITIF	KEUNGGULAN KOMPARATIF
MIPA	Matematika **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam bidang Matematika dan Ilmu Komputer	1.Statistik 2.Pemodelan Matematika 3.Ilmu Komputer
HUKUM	Ilmu Hukum **(Terakreditasi B)**	Ahli dalam bidang hukum	1.Hakim 2.Jaksa 3.Pengacara 4.Notaris
FKIP	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia **(Terakreditasi Baik Sekali)**	Ahli dalam bidang perencanaan, penelitian, pengajaran dan tata kelola kelembagaan	1.Pendidik 2.Jurnalis atau Wartawan 3.Penulis dan Editor 4.Penyiar/Presenter
	Pend. Bahasa Inggris **(Terakreditasi Baik Sekali)**	Ahli dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, Linguistik dan Kesastraan	1.Tenaga pendidik Bahasa Inggris 2.Asisten penelitian Bahasa Inggris 3.Edupreneur Bahasa Inggris 4.Penulis Kreatif
	Pend. Matematika **(Terakreditasi Baik Sekali)**	Ahli dalam bidang perencanaan, analis data, pengajaran, penelitian	1.Pendidikan Matematika 2.Peneliti pendidikan matematika 3.Calon pebelajar tingkat magister Analis kebijakan pendidikan
EKONOMI	Manajemen **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam bidang manajemen keuangan dan pemasaran	1.Wirausaha UMKM 2.Konsultan manajemen
	Akuntansi **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam akutansi keuangan	1.Akutansi BANK 2.Perbankan
FAI	Pend. Agama Islam **(Terakreditasi B)**	1.Pendidikan profesional 2.Peneliti pemula 3.Pengelola lembaga pendidikan	1.Ahli dalam bahasa arab dan inggris keislaman 2.Pengembangan masyarakat dan keagamaan
	Pend. Bahasa Arab **(Terakreditasi Baik)**	1.Pendidikan guru B. Arab 2.Peneliti pemula B. Arab 3.Penerjemah 4.Pemandu Haji, Umroh	1.Penerjemah 2.Guru 3.Telaah kitab kuning
	Pend. Islam Anak Usia Dini **(Terakreditasi Baik Sekali)**	1.Pendidik 2.Peneliti 3.Konsultan anak 4.Edupreneur	1.Guru RA, TK, PAUD 2.Pengelola lembaga pendidikan AUD 3.Peneliti bidang pendidikan AUD
	Ekonomi Syariah **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam ekonomi Islam	1.Manajemen keuangan syariah 2.Pengembangan kewirausahaan
	Pend. Guru MI **(Terakreditasi Baik Sekali)**	1.Pendidikan 2.Peneliti pemula	1.Ahli guru MI
PERTANIAN	Agroteknologi **(Terakreditasi B)**	Ahli dalam pengelolaan budidaya tanaman	1.Pengelolaan teknologi hasil pertanian dan kewirausahaan
TEKNIK	Teknik Sipil **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam bidang perencanaan teknik sipil	1.Ahli dalam perencanaan jalan-jalan dan transportasi 2.Ahli dalam perencanaan konstruksi hidro atau keairan
	Arsitektur **(Terakreditasi B)**	Ahli dalam perencanaan bidang arsitektur	1.Ahli perencanaan kota, perumahan, dan pemukiman 2.Ahli perencanaan lansekap dan sains bangunan
	Informatika **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam perencanaan bidang informatika	1. Praktisi IT 2. Pengembang Software
FISIP	Ilmu pemerintahan **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam perencanaan kebijakan pemerintah	1.Ahli dalam bidang public policy dan strategi 2.LSM
	Ilmu Politik **(Terakreditasi B)**	Ahli dalam bidang politik	1.Ahli dalam politik nasional dan regional
PASCASARJANA	Magister Pend. Bahasa & Sastra Indonesia **(Terakreditasi B)**	Kompeten dalam pendidikan mutakhir	1.Peneliti pendidikan 2.Pengembangan pendidikan inovatif
	Magister Pend. Agama Islam **(Terakreditasi Baik Sekali)**	Kompeten dalam pendidikan mutakhir agama islam	1.Pendidik Pendidikan Agama islam 2.Pengembang kurikulum pendidikan agama islam

Fasilitas

1. Tenaga pengajar berkualitas, lulusan kampus terkemuka dalam dan luar negeri dengan jenjang doktor dan magister. Laboratorium MIPA, Bahasa, Komputer, Microteaching, Lab. Pertunjukan & Sinematografi, Teknik (Sipil/Arsitek), Green House, Akuntansi, Peradilan Semu, Hotspot / WIFI 24 Jam.
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Musik, Teater, Palang Merah Indonesia, Banjari, Olah Raga, Jurnalistik, Paduan Suara, Mapala, Resimen, Majalah /Buletin, dll.
3. Jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah, mahkamah konstitusi RI, KPPU, Bakesbang Prop Jawa Timur, media massa. Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dalam dan Luar Negeri.
4. Tersedia LCD projector di setiap ruang kelas.
5. Dekat dengan beberapa pondok pesantren dan tersedia bus antar jemput dari PP. Matholiul Anwar ke kampus.
6. Suasana kampus yang asri dengan budaya multi cultural (mahasiswa dari berbagai profesi dan negara)
7. Gedung Sabudga sebagai sarana olah raga & budaya serta acara resmi dengan kapasitas 2500 orang.

BEASISWA

1. Jalur penerimaan siswa berbakat dan berprestasi (baik tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, dan nasional).
2. Beasiswa keringanan SPP bagi mahasiswa yang memiliki saudara kandung yang telah kuliah di Unisda.
3. Beasiswa Hafidz / Hafidzah 100% bebas DPP dan SPP.
4. Calon mahasiswa yang pernah menjadi ketua OSIS, IPNU IPPNU bebas biaya pendaftaran dan biaya PKKMB.
5. Tersedia ratusan beasiswa dari:
   a. Lembaga Pendidikan Islam & Sosial Darul `Ulum
   b. Beasiswa K.H. Masykuri
   c. Bantuan keringanan bagi yang kurang mampu
   d. Bidik Misi/KIP-K
   e. Baznas
   f. LLDIKTI
   g. BUMN/BUMD
   h. Al-Khidmah
   I. PKSDM
   j. UKT

Lain-Lain

1. Menerima mahasiswa transfer untuk semua jurusan.
2. Unisda tidak membuka kelas jauh.
3. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan via telepon, WA, email, facebook, atau SMS center.

Berdaya Saing Kuat I Mandiri I Berbudaya I Islami I Bertaraf Internasional

الجامعة الإسلامية دار العلوم

Universitas Islam Darul `Ulum

UNISDA

University With Global Vision

UNISDA UNIVERSITY with GLOBAL VISION

unisda.ac.id

PERSYARATAN UMUM

Berijasah SMA/SMK/MA dan berkelakuan baik

SYARAT DAN CARA PENDAFTARAN

1. Membayar Biaya Formulir Pendaftaran di Bank Jatim
2. Menyerahkan scan ijasah atau Surat Keterangan Lulus
3. Menyerahkan soft file foto terbaru ukuran 3x4
4. Menyerahkan Scan Kartu Keluarga
5. Biaya pendaftaran Rp 250.000

TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

Kantor Marketing, Humas, Admisi Mahasiswa Baru dan Urusan Internasional UNISDA Lamongan
Jl. Airlangga No. 03 Sukodadi Lamongan
Telp. (0322) 390497 | fax. (0322) 390929
WA : 0858-7733-0888
FB : Universitas Islam Darul 'Ulum (UNISDA) Lamongan
IG : Unisda_Official
Email : humas@unisd.ac.id
Web : pmb.unisda.ac.id
Pendaftaran dibuka setiap hari kerja: pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

JALUR	TANGGAL
PSBB	06 JAN - 15 APRIL 2025
Gelombang 1	06 JAN - 03 JUN 2025
Gelombang 2	4 JUN - 20 AGST 2025
Gelombang 3	21 AGST - 12 SEPT 2025

Pendaftaran dibuka setiap hari Senin s.d. Jumat (untuk kelas karyawan: hari Jumat s.d. Minggu)

Waktu perkuliahan:
Pagi: 08.00 - 12.00 WIB
Sore: 15.20 - 20.00 WIB

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM DARUL `ULUM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2025-2026

LIST BIAYA

SCAN ME

TOKOH & ALUMNI MENGENAI UNISDA

"Unisda diharapkan mampu mencetak generasi baru dibidang ekonomi syariah sebagai kemaslahatan umat"
Prof. Dr. (H. C.) KH. Ma'ruf Amin
(Wakil Presiden RI 2019-2024)

"Saya harapkan Unisda ke depan mampu melampaui prestasi-prestasi yang telah diraih sebelumnya."
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
(Wakil Presiden RI 2014-2019)

"Saya merasa ikut memiliki Unisda, sudah beberapa tahun ini Unisda bekerja sama dengan MKRI"
Prof. Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Saat Kunjungan ke Unisda th. 2012)

"Kita harus mulai membangun roadmap kita, dimana generasi muda (mahasiswa Unisda adalah tulang punggung kemajuan Indonesia, tulang punggung pembangunan roadmap atau ekosistem yang akan kita bangun."
Erick Tohir
(Menteri BUMN 2019-sekarang dan Ketua Umum PSSI)

"Setelah saya melihat Unisda, sudah bagus. tinggal dikembangkan untuk memasuki era internasional."
Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.
(Menristekdikti 2014-2019)

"Unisda diharapkan dapat mencetak generasi-generasi guru masa depan yang mumpuni"
Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia periode 2019-2024 Saat kunjungan tahun 2017)

"Mahasiswa Unisda bukan saja menjadi agent of change, tetapi juga agent of repair, karena hakikat dari intelektual adalah wajib menawarkan gagasan atas hal hal yang dilihat tidak benar."
AA Lanyalla Mahmud Mattalitti
(Ketua DPD Republik Indonesia)

"Ya Allah, Jadikanlah UNISDA ini sebagai sarana pendidikan, berkahilah tempat ini sebagai tempat menimba ilmu bagi hamba-hamba-Mu yang tertaqwa"
K.H. Ubaidillah Faqih
(Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban)

"Sebagai almamater saya bangga, karena saat in Unisda tetap berkembang tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai kampus yang menjunjung tinggi akademik yang dinamis"
Dr. Yuhranur Effendi, SH, S., MBA.
(Bupati Lamongan & Alumni Unisda)

PRESTASI

1. Sebagai Delegasi RI ke US Indonesia Higher Education Summit di Washington (internasional)
2. Sebagai peserta Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVII di Padang, Sumatrera Barat.
3. Pemecah Rekor MURI dalam kategori pembacaan puisi terlama (Nasional/Internasional)
4. Finalis PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) di Kendari Sulawesi.
5. Juara 2 Futsal Mahasiswa di Univ. Adibuana Surabaya
6. Juara 3 MTQ Mahasiswa Regional IV Bidang Hifdzil Qur'an di Univ. Trunojoyo Madura.
7. Juara Harapan 1 Lomba Dialog Interaktif tingkat nasional "Pekan Trilomba Kebangsaan Ke-III" Univ. Negeri Malang
8. Juara 1 Microteaching tingkat nasional di UINSA Surabaya
9. Juara III dalam kegiatan Festival Seni Pencak Silat Virtual Nasional Lintang Jagad III.
10. Program MBKM dr Kemdikbudristek yg pernah diraih mhs Unisda:
    a. Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit (Permatasakti)
    b. Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 (PMM2)
    c. Kampus Mengajar 3, 4 dan 5
    d. Merdeka Belajar untuk Semua
    e. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)
    f. Bantuan Riset Talenta Riset dan Inovasi (BARISTA)
    h. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)
11. Hibah MBKM yg didapat Unisda dari Kemdikbudristek
    a. PKKM (Program Kompetisi Kampus Merdeka) tahun 2021, 2022, 2023
    b. KMMI (Kredensial Mikro Mhs. Indonesia)
    c. Ditasering th 2021 & 2022
    d. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
    e. Program Studi Menerapkan Kerjasama MBKM

Rektor
ttd
M. Hafidh Nashrullah, S.E., M.M.

الجامعة الإسلامية دارالعلوم

Universitas Islam Darul Ulum

UNISDA - LAMONGAN

Jl. Airlangga 03 Sukodadi
Lamongan – Jawa Timur – 62254
https://unisda.ac.id

"Greenwashing dan Derajat Transparansi pada Sektor Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat" menyajikan analisis mendalam mengenai praktik green-washing dan transparansi dalam industri ekstraktif yang terus berkembang di Indonesia. Dalam konteks Jawa Timur dan Jawa Barat, dua provinsi dengan sektor ekstraktif yang signifikan, buku ini mengungkap bagaimana klaim keberlanjutan sering kali tidak sesuai dengan realitas di lapangan, menciptakan tantangan besar bagi konsumen, pemerintah, dan masyarakat.

Melalui kajian yang komprehensif, penulis mengeksplorasi bagaimana fenomena green-washing berdampak pada kepercayaan publik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi di sektor ini. Buku ini juga menyarankan solusi praktis yang dapat diambil oleh perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk memperbaiki transparansi dan mengurangi praktik green-washing, menuju keberlanjutan yang lebih akuntabel.

Bagi akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat yang peduli dengan masa depan keberlanjutan Indonesia, buku ini adalah sumber yang sangat berharga. Buku ini tidak hanya membuka mata tentang praktik green-washing yang merugikan, tetapi juga menawarkan wawasan tentang bagaimana sektor ekstraktif dapat bergerak menuju transparansi yang lebih tinggi demi kesejahteraan bersama dan perlindungan lingkungan.

"Sebagai alat untuk memahami dan menangani masalah green-washing dan transparansi, buku ini menjadi panduan penting bagi siapa saja yang ingin berkontribusi pada perubahan positif dalam industri ekstraktif."

ISBN 978-623-89410-6-3 (PDF)
9 786238 941063
IKAPI IKATAN PENERBIT INDONESIA
Press UNISDA

View publication stats